EDISI 57/TH. XXXVI/2021

BALAIRUNG

Kebekuan Lembaga Pendidikan

"Memprivatisasi dan Meliberalisasi Pendidikan"

Oleh *Ki Darmaningtyas*

"Pernikahan di Musim Hujan"

Oleh *Bernard Batubara*

ISSN 0215-076X

Setelah melalui berbagai tahap pemilihan tema yang dikerjakan secara kolektif, penyusun majalah edisi ke-57 BPPM Balairung sepakat bahwa neoliberalisasi pendidikan tinggi menjadi tema yang patut diangkat. Hal tersebut dilatarbelakangi oleh perubahan status Perguruan Tinggi Negeri (PTN) menjadi Perguruan Tinggi Badan Hukum (PTNBH) melalui pengesahan Undang-Undang Perguruan Tinggi Nomor 12 Tahun 2012. Dalam peraturan tersebut tertulis bahwa PTNBH dapat mengelola secara otonom sumber-sumber pendanaan untuk pengembangan pendidikan tinggi. Hal ini disebut sebagai wujud dari komersialisasi pendidikan yang berujung pada melonjaknya biaya pendidikan dan berimbas pada lebarnya kesenjangan pendidikan antara masyarakat kelas atas dan menengah ke bawah.

Selain itu, regulasi PTNBH telah membuat kampus berada dalam logika pasar yang membuatnya berubah fungsi mengikuti keperluan industri. Hal ini diperkuat dengan kebijakan Merdeka Belajar–Kampus Merdeka (MBKM). Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Nadiem Makarim menyampaikan bahwa MBKM merupakan salah satu unggulan pemerintah dalam mengatasi permasalahan penyerapan tenaga kerja dan relevansi lulusan dengan dunia industri. Namun, dalam kenyataannya program MBKM menuai berbagai permasalahan, seperti program magang yang eksploitatif, kurikulum yang mereduksi nalar kritis, dan mahasiswa program studi sosial-humaniora non-populer yang termarginalisasi.

Proses penggarapan majalah edisi ke-57 ini, mulai dari pemilihan tema hingga pendistribusian, merupakan kerja sama antara empat divisi: Redaksi, Penelitian dan Pengembangan (Litbang), Perusahaan, dan Produksi dan Artistik (PdA). Majalah ini diisi dengan enam rubrik tematik: dua Laporan Utama, Sisi Lain, dan Kajian. Dua artikel Laporan Utama mengupas problematika kampus merdeka dan eksploitasi dalam kurikulum pendidikan tinggi. Sisi Lain mengevaluasi dampak neoliberalisasi terhadap mahasiswa program studi sosial non-populer. Wawasan menjabarkan dampak neoliberalisme pada perguruan tinggi yang berpengaruh terhadap peran intelektual dan biaya perkuliahan. Sementara, kajian menganalisis perbandingan sistem pendidikan antara negara maju dan negara berkembang. Selain keenam artikel tersebut, artikel-artikel non-tematik lainnya juga mengusung topik-topik yang dekat dengan mahasiswa.

Melalui Majalah Edisi 57/TH. XXXXI/2021 ini, Balairung berupaya menggugah pembaca untuk menentukan sikap terkait permasalahan yang terjadi di sekitarnya, khususnya dalam bidang pendidikan. Segala saran dan kritik yang membangun kami terima demi kemajuan majalah edisi berikutnya.

Selamat membaca dan mengkritisi, mahasiswa!

Semoga selalu diberi kepedulian dan keberanian untuk memperjuangkan kebenaran.

Pembina Dr. Muhammad Najib Azca, M.A., Ph.D **Pemimpin Umum** Muhammad Rizqi Akbar **Koordinator Majalah** Dimas Aditya Wicaksono **Tim Kreatif** Anindya Puteri Eka, Inas Alimaturrahmah, Jovita Agnes Glorya, Ratu Mutiara Kalbu **Pemimpin Redaksi** Muhammad Fadhilah Pradana **Penyunting** Alfredo Putrawidjojo, Ardhias Nauvaly Azzuhry, Bangkit Adhi Wiguna, Dina Octaferia, Isabella, Muhammad Affan Asyraf, Naufal Ridhwan, Salsabella Adista Trisnu Pramesti, Tariq Fitria Aziz **Penulis** Abiyyu Genta Rijadianto, Achmad Hanif Imanuddin, Albertus Arioseto Bagus, Aldyth Nelwan Airlangga, Amanda Diva Nareswari, Amarapallevi, Atsil Tsabita, Avicenna Shahnaz Nuraini, Fahmi Aryo Majid, Farah Ramadanti, Fauzi Ramadhan, Florencia Azella, Jacinda Nuurun Addunya, Kartika Putri Situmorang, Lokahita Pradipta, Muhammad Alfimansyah, Nabila Hendra Nue Afifah, Renova Zidane, Ridha Fatmasari, RR Natasya, Siti Nurjannah, Valentino Yovenky, Viola Nada Hafilda, Widiatri Kharisma, Yeni Yuliati, Zahra Salsabilla, Zhafira Putri Salsabilla **Kepala Penelitian dan Pengembangan** Safira Rizky Mayla Aziz **Penyunting** Jessica Syafaq Muthmaina, Medisita Febrina, Megantara Agustina Pertiwi Massie, Veronica Ayu Pangestika **Penulis** Afifah Putri, Alfi Sakti Alamsyah, Diana Mayasari, Eiben Heizier, Elsya Dewi Arifah, Ericka Mega, Hasna Aliya Ady, M. Ihsan Nurhidayah, Rachel Farahdiba R, Rania Salsabila, Refina Anjani Puspita **Pemimpin Perusahaan** Anis Nurul Ngadzimah **Staf Perusahaan** Adinda Safiratul, Anindya Puteri Eka, Danika Fahma Aji, Hanna Tita Kusuma, Imanuel Radhitya Pratama, Nuki Maharani Cahya Ratri **Kepala Produksi dan Artistik** Dzikrika Rahmatu Hayati **Kurator** Aris Munandar, Erika Kartika Madiaferry, Haifa Sausan, Ingga Amalia Dewi, Inggrid D Wijaya, Samuel Johanes **Fotografer** Winda Hapsari Indrawati **Ilustrator** David Regiasmara Putrawan, Dwi Nanda Renaldy Syah, Inas Alimaturrahmah, Ingga Amalia Dewi, Muhammad Zia Ulil Albab, Rona Iffah, Sidik Legowo **Penata Letak** Alifia Citarahma, Annida Yuliza Akmal, Dwika Wahyudinata, Erlanggasakti Ubaszti Putra, Maximillian Caesaro Parama Bisatya **Ilustrasi dan Konsep Kulit Muka** Rona Iffah

Alamat Redaksi, Sirkulasi, Iklan dan Promosi
Kompleks Perumahan Dosen UGM, Bulaksumur B-21, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55281

@bppmbalairung /bppmbalairungugm @bppmbalairung @GSJ9240C /balairungpress.com /jurnal.ugm.ac.id/balairung

DAFTAR ISI

Kebekuan Lembaga Pendidikan

© Sidik/BAL

Zaman selalu mengalami kebekuan. Lembaga pendidikan yang seharusnya memecah kebekuan, malah turut membekukan.

Ada dua kondisi di dunia, yaitu imanensi dan transendensi.[1] Imanensi adalah ketika keadaan mengepung manusia. Transendensi adalah ketika manusia menerobos keadaan. Pada zaman berburu dan meramu, keadaan yang mengepung manusia adalah alam. Alam yang terdiri dari hewan, tumbuhan, gunung, merupakan hal yang mengepung manusia. Manusia kemudian berupaya untuk sebisa mungkin tidak terlalu terkepung. Sedikitnya, manusia mempelajari hal-hal yang diperlukan untuk melepas laparnya. Ia belajar berburu, menguliti tangkapan, mengingat kecenderungan-kecenderungan geografi, sampai dengan mengembangkan peralatan.

Manusia kemudian tidak hanya mencegah kepungan alam. Mereka mulai mengenal alam dan hidup berdampingan dengannya. Hanya saja, fase imanen kembali terjadi. Sebab, manusia mulai merasakan nikmat dari kenyang. Mereka kemudian berupaya untuk melawan alam. Dalam rangka melakukan hal itu, manusia membuat perangkat-perangkat, mencetak alat-alat, hingga memanipulasi banyak hal. Alhasil, mereka bukan hanya melawan alam, namun juga menaklukkannya.

Pada titik ini, manusia mulai terbagi menjadi beberapa kelas sosial. Kelas sosial penguasa, hadir sebab kekalahannya dengan kondisi imanen dalam dirinya sendiri. Kelas sosial budak, hadir sebab kekalahannya secara material. Kelas-kelas sosial ini kemudian berdinamika. Pada waktu-waktu tertentu, budak bukan hanya mampu menang secara material, tapi juga mampu mentransendensi dirinya sendiri. Seperti kisah Bilal bin Rabah. Ia bukan hanya berupaya menerobos perbudakan yang terjadi pada zamannya. Ia juga berupaya mencabut budak yang ada dalam dirinya sendiri.

Namun, Islam tidak lahir dalam wujud kekuasaan. Islam mulai menjadi imanen ketika ia digunakan untuk mengeksploitasi pihak yang tertindas. Formalisasi Islam dibuat hanya untuk dipatuhi tanpa menilik makna dan kemanusiaan. Baju-baju Arab diidentikkan dengan Islam itu sendiri. Hal ini bukan hanya membuat pihak yang tertindas disibukkan dengan kegiatan-kegiatan yang penguasa sebut Islam, tetapi juga semakin membuat mereka buta dengan ketertindasannya. Dengan kata lain, fase-fase imanen terjadi lagi.

Seiring berkembangnya zaman, pihak tertindas bukan hanya semakin kalah, namun semakin banyak pula cara-cara pihak penguasa mempertahankan imanensi. Salah satunya adalah melalui ekonomi. Kekalahan pihak tertindas secara ekonomi dimulai ketika revolusi industri. Pemodal dapat menghasilkan banyak barang dalam waktu sekejap. Banyaknya barang membuat harga barang itu semakin murah. Sebab pemodal kecil hanya mampu menghasilkan sedikit barang, mereka pun kalah. Mereka turut masuk dalam lintasan perbudakan.

Kelas tertindas juga dikalahkan dalam pengaturan birokrasi. Kerajaan atau negara yang awalnya bertugas melawan penindasan, beralih menjadi ikut menindas. Mereka mengikuti tuntunan-tuntunan yang diinginkan pihak penindas. Saat pihak tertindas marah, birokrat memerintahkan aparat untuk meredamnya. Saat pihak tertindas melakukan gugatan ke pengadilan, pemodal hanya tinggal memberikan sepeser di bawah meja untuk para hakim.

Pemodal tidak hanya menguasai negara dan ekonomi, mereka juga menguasai perangkat-perangkat yang meliputinya, termasuk dalam hal ini adalah lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan kemudian diselipi agenda untuk membentuk tenaga kerja. Negara, mungkin awalnya bisa sedikit-sedikit menahan agenda itu. Mereka membuat pemakluman-pemakluman pada beberapa hal, seperti kurikulum yang longgar. Namun lama kelamaan, negara turut dipaksa oleh keadaan. Alhasil, seluruh lembaga pendidikan beragenda untuk membentuk tenaga kerja. Pokoknya, *kerja, kerja, kerja.*

Peter Gray menyebut bahwa daya imajinasi, daya perlawanan, hingga daya transenden manusia dikebiri oleh lembaga pendidikan.[2] Sebab lembaga pendidikan, disebutnya alih-alih memanusiakan manusia, malah mereduksi keutuhan manusia. Lembaga pendidikan merupakan komponen yang paling halus untuk mengilusi manusia. Mereka melakukan itu melalui mata kuliah yang diajarkan. Misal, jurusan-jurusan ekonomi di banyak universitas tidak memberi tahu pendekatan ekonomi politik. Mereka hanya mengajarkan bahwa manusia adalah makhluk rasional hedonistik yang mampu melepaskan diri sendiri dari kemiskinan. Alhasil, analisis-analisis di jurusan itu tidak berangkat dari kenyataan, tetapi berangkat dari asumsi manusia rasional yang kemudian diangkakan.

Sisi lain, kita hendaknya sudi untuk mengatakan bahwa lembaga pendidikan apa pun mempunyai fungsinya masing-masing. Dalam artian, lembaga pendidikan yang menyediakan metode perlawanan, alat-alat melawan, hingga pengetahuan melawan, pun tak menjamin lahirnya transendensi. Sebab, dengan demikian, manusia bukan lagi dipandang sebagai manusia, melainkan sebagai fungsi-fungsi. Hal itu berpeluang untuk membutakannya dari kondisi imanen dalam dirinya sendiri. Bukankah kita hendak mentransendensi keadaan dan diri sendiri?

Maksudnya, selalu ada yang tidak lengkap dalam pengetahuan manusia. Dan ini adalah salah satu dampak dari pengebirian keutuhan manusia. Misalnya, kita memandang bahwa hukum, senjata, pikiran di negara tertentu adalah canggih. Sebab, mampu menyediakan kesejahteraan yang selalu didambakan. Kemudian, kelompok lain mengadopsinya. Hasilnya, beda. Banyak *mletonya*. Ternyata, kita luput untuk paham bahwa 'senjata' tadi berhasil karena digunakan oleh buaya, *lha*, kita kan, kancil.

Dan ketidakpahaman manusia terhadap dirinya sendiri pun merupakan akibat dari lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan mungkin dapat membuatku berfungsi secara spesifik di masyarakat. Aku menjadi ahli tarian-tarian. Namun, semakin aku ahli, semakin besar pula peluangku untuk semakin tidak mengenal diri. Bahkan orang di sekitar mengenalku tidak sebagai manusia, tapi sebagai ahli tari yang didamba-dambakan begitu rupa. Kala menunjukkan manusiaku, mereka berpaling. "Namun terima kasih sebab telah mendukungku melalui McDonald's," gumamku. Sungguh, aku hanya berharap bahwa kau melakukan itu dengan sadar.

Yang diam di dasar jiwaku,
Terlempar jauh ke sudut kota,
Kenangkanlah jua yang celaka,
Orang usiran kota raya.

Cuplikan puisi Umbu Landu Paranggi itu barangkali merupakan sedikit gambaran dari keadaan imanen kiwari. Kekuasaan bukan hanya mampu mengusir manusia dari lahannya, tetapi juga mengusir manusia dari dirinya sendiri. Jiwa manusia meringkuk di kedalaman. Orang-orang tertindas meringkuk di pinggiran kota. Dan lembaga pendidikan, tidak lagi berfungsi untuk membangunkan mereka. Lembaga pendidikan menjadi imanen itu sendiri.

Dengan demikian, lembaga pendidikan dan kekuasaan tampaknya selalu beriringan. Kekuasaan butuh lembaga pendidikan untuk membutakan yang dikuasai. Sebaliknya, yang menguasai pun terjebak dalam imanensi juga. Lembaga pendidikan barangkali sungkan untuk merangkul penguasa. Maka dari itu, ketika manusia dipaksa untuk terus menerus imanen, kekosongan di dalam manusia akan terus menerus berlanjut. Kekosongan itu meminta untuk terus menerus diisi, dan yang ternyata terjadi adalah imanensi.

Namun, seperti kata Haji Misbach, "Jangan takut, jangan khawatir." Sebab dalam tidur pun, manusia mendengkur![3] **[Pemimpin Redaksi]**

---

[1] Peursen, C. (2000). *Strategi kebudayaan.* (D, Hartoko, Trans.). Kanisius. (Karya asli dipublikasi 1974)
[2] Gray, P. (2021). *A Brief History of Education.* Psychology Today. Diakses 13 Juli 2021, dari https://www.psychologytoday.com/us/blog/free-dom-learn/200808/brief-history-education.
[3] Nadjib, E. (2019). *Dari Pojok Sejarah* (p. 441). Penerbit Mizan. *"Seorang manusia, menjadi utuh kepribadiannya, tatkala ia tidur mendengkur. Suara ngoroknya yang nyaring adalah nyanyian kemerdekaan, kejujuran dan kemandiriannya-yang tak terpenuhi pada saat bangunnya."*
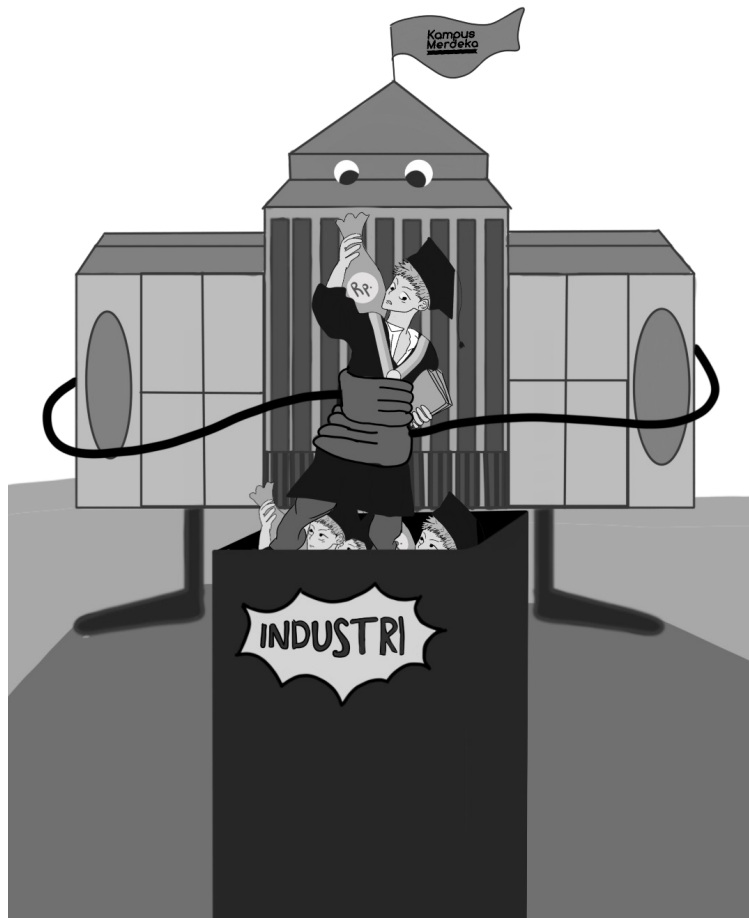
©Inas/Bal

Kampus Merdeka di Antara Ilusi dan Neoliberalisasi

Pendidikan telah menjadi tumbal dari persekongkolan pemerintah dengan pemodal. Demi kemenangan pasar bebas, pendidikan diarahkan untuk memuaskan industri semata. Inilah yang dikenal sebagai neoliberalisasi pendidikan. Kampus Merdeka ditengarai sebagai perwujudannya.

Kaum pemodal tahu bahwa mereka butuh negara untuk menggapai impian pasar bebasnya. Lewat kuasa modal, mufakat pun tercapai: negara membuat paket kebijakan yang membebaskan dirinya dari mekanisme pasar. Setidaknya itulah yang dibayangkan Joko tentang neoliberalisme. Joko Susilo merupakan Alumnus Fakultas Ilmu Sosial dan Politik UGM yang menulis skripsi berjudul "Neoliberalisasi Pendidikan Tinggi, Re-strukturalisasi Institusi dan Gerakan Perlawanan Mahasiswa Kini, Studi Pasca PTN-BH UGM 2012-2020."

Pada konteks Indonesia, Joko menerangkan bahwa neoliberalisme masuk karena eksperimen Bank Dunia dan International Monetary Fund terhadap negara berkembang. Eksperimen ini berbentuk intervensi regulasi sebagai imbalan dari pinjaman yang diberikan kepada negara yang sedang krisis. "Salah satu intervensi regulasinya adalah pemangkasan pembiayaan yang tidak pro pertumbuhan," jelas Joko.

Joko melanjutkan, kesepakatan tersebut menyebabkan pengelolaan sektor publik diubah seperti mengelola perusahaan swasta demi mengejar pertumbuhan ekonomi, salah satunya pendidikan. Perubahan pengelolaan ini salah satunya berbentuk pemangkasan subsidi pendidikan yang berdampak pada lonjakan beban biaya kampus. "Solusi tercepatnya adalah menaikkan dan membebankan biaya pendidikan kepada mahasiswa," ujarnya.

Joko menjelaskan, akibat meminjam dari Bank Dunia, Indonesia harus melaksanakan Indonesia Managing Higher Education for Relevance and Efficiency. Implikasinya, Indonesia menerapkan Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTN-BH) dan merevisi Undang-Undang Badan Hukum Pendidikan. Ia juga menguraikan, keputusan itu membuat perguruan tinggi berstatus PTN-BH harus mencari uang sendiri. "Secara global, konsep PTN-BH disebut universitas korporasi sebagai wujud neoliberalisasi pendidikan," ujarnya.

Ben Laksana, Dosen Hubungan Internasional dari International University Liaison Indonesia, menyebutkan bahwa neoliberalisasi pendidikan membuat peserta didik menjadi cenderung mementingkan diri sendiri. "Kompetisi dalam pendidikan diarahkan kepada kesuksesan pribadi alih-alih demi pengembangan pengetahuan," ujarnya. Dia menyebut bahwa neoliberalisasi turut memunculkan hierarki pendidikan berdasarkan kesempatan mendapat kerja. Ben juga menyampaikan bahwa neoliberalisasi pendidikan di Indonesia terwujud dalam program Kampus Merdeka.

Dilansir dari situs kampusmerdeka.kemdikbud.go.id[1], Kampus Merdeka merupakan bagian dari kebijakan Merdeka Belajar dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kampus Merdeka, tercantum dalam situs tersebut, memberikan kesempatan mahasiswa untuk terjun langsung ke dunia industri. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Anwar Makarim menegaskan bahwa Kampus Merdeka merupakan tahap awal untuk melepaskan belenggu agar mahasiswa memiliki ruang yang lebih leluasa untuk belajar. Tujuannya, lanjut Nadiem, adalah untuk membekali mahasiswa agar siap menghadapi dunia industri dengan kemajuan teknologinya yang pesat.

Senada dengan Nadiem, Jarwo Susetyo, Dosen Arkeologi UGM, menyampaikan bahwa Kampus Merdeka dapat membuat dosen dan mahasiswa bergerak lebih leluasa. "Kita tidak bisa lagi bergerak di satu bidang ilmu saja, melainkan mesti membuka diri kepada ilmu yang lain," tegasnya. Jarwo juga mendukung intensifikasi magang di Kampus Merdeka. Menurutnya, program tersebut dapat menciptakan dunia kerja baru yang belum pernah ada sebelumnya.

Perihal intensifikasi magang pun dijelaskan dalam Buku Panduan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka[2]. Buku tersebut menjelaskan bahwa kompetensi mahasiswa mesti disesuaikan dengan kebutuhan industri lewat program magang selama 1-2 semester. Selain itu, menurut buku tersebut, Kampus Merdeka memberikan kesempatan mahasiswa untuk belajar langsung di tempat kerja.

Menanggapi Kampus Merdeka, Joko tidak menampik bahwa mahasiswa diberi kesempatan untuk mempelajari hal di luar jurusannya. Namun, yang menjadi masalah menurutnya adalah intensifikasi magang. Ia merasa bahwa magang merupakan bentuk eksploitasi karena perusahaan tidak memberi upah penuh, bahkan ada yang tidak memberi upah sepeser pun. Joko menambahkan, peserta magang tidak memiliki serikat pekerja sehingga mereka tidak memiliki ruang untuk mengadvokasi diri apabila merasa ada yang salah dengan kultur perusahaan.

Bila Joko menyoroti pemagangan, Ben lebih mengkritik perihal program interdisipliner dalam Kampus Merdeka. Ben merasa hal tersebut tetap bertujuan untuk memenuhi pasar tenaga kerja. "Doktrin tentang kesuksesan individu mendorong mahasiswa cenderung mengambil pengetahuan-pengetahuan yang dibutuhkan oleh dunia industri," terangnya.

Bayu Dardias, Dosen Fisipol UGM, membenarkan bahwa Kampus Merdeka memang upaya untuk menjawab persoalan-persoalan industri yang muncul di era Revolusi 4.0. Bagi Bayu, program magang yang difokuskan Kampus Merdeka berfungsi untuk mendekatkan pasar dan mahasiswa sebagai calon tenaga kerja. Bayu menambahkan, tujuannya adalah untuk memunculkan bakat baru demi pengembangan industri di Indonesia. "Kampus Merdeka adalah wujud akselerasi kampus dalam menyediakan kebutuhan industri di era Revolusi 4.0," ujarnya.

Alih-alih mendikte mahasiswa, menurut Bayu, Kampus Merdeka justru memberikan otonomi sepenuhnya kepada mahasiswa untuk memilih program-program yang akan diikuti. Bayu menegaskan bahwa tidak ada pemaksaan kepada mahasiswa untuk mengikuti program-program tertentu. "Tidak ada jaminan sukses di Kampus Merdeka, tetapi setidaknya program ini memberi ruang kepada mahasiswa untuk memilih arah belajarnya," pungkasnya.

Bertolak belakang dengan Bayu, Ben menganggap bahwa Kampus Merdeka adalah cara pemerintah untuk lari dari tanggung jawabnya mengatasi kemiskinan. Sebab, Kampus Merdeka seperti memasrahkan permasalahan ekonomi hanya kepada individu masing-masing. "Pemerintah tidak cukup hanya memasrahkan semuanya kepada kerja keras individu untuk mengatasi kemiskinan," tegasnya. Ben juga melihat bahwa akar permasalahannya bukan pada kurangnya bakat individu, melainkan struktur sosial-ekonomi yang dido minasi segelintir orang kaya.

Begitu pun dengan Joko yang menganggap bahwa Kampus Merdeka telah membiaskan masalah struktural. Baginya, kemiskinan jelas tanggung jawab pemerintah. Program semacam Kampus Merdeka dapat menjadi alternatif, tetapi tidak akan menuntaskan masalah. "Kemiskinan terjadi secara struktural sehingga perlu diselesaikan secara struktural pula," ujar Joko. Begitu pula dengan neoliberalisme yang dia percayai sebagai biang kemiskinan struktural sehingga perlu dilawan secara struktural pula.

Soal relasi mahasiswa dan industri, Ben tidak menampik bahwa manusia butuh uang. Ben meneruskan, akan tetapi mencari uang bukan satu-satunya tujuan pendidikan. Menurutnya, Kampus Merdeka telah mengerdilkan makna merdeka, seakan-akan kemerdekaan hanya dimaknai dari sisi ekonomi. Kasus-kasus penangkapan mahasiswa yang mengkritik pemerintah juga dipertanyakan oleh Ben. Baginya, itulah bukti nyata bahwa institusi pendidikan tidak benar-benar merdeka. "Kampus merdeka tidak berarti institusi pendidikan menjadi sepenuhnya merdeka, melainkan hanya dimerdekakan sesuai kepentingan pasar," tegas Ben. **[Viola, Zahra, Amanda]**

---

[1]Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2020, Apa itu Kampus Merdeka?, https://kampusmerdeka.kemdikbud.go.id/ diakses Senin, 5 Juli 19.54

[2]Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2020, Buku Panduan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka, Jakarta:Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.

© Winda/BAL

Matinya Nalar Kritis dan Jerat Eksploitasi dalam Kurikulum Pendidikan Tinggi

Dalam sistem neoliberal, pendidikan tinggi yang seharusnya mencetak insan intelektual justru mencetak insan industrial. Kebijakan baru bertajuk "Kampus Merdeka" yang dicanangkan oleh Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Anwar Makarim disinyalir oleh beberapa pihak berpotensi mengeksploitasi dan membunuh nalar kritis mahasiswa.

"Manusia memiliki semangat untuk mencari kebenaran, jati diri, dan nilai. Hal-hal tersebut tidak dapat dicari dengan cara pikir yang instrumental," ucap Agung Wardana, Dosen Fakultas Hukum UGM. Argumen tersebut adalah tanggapannya mengenai kurikulum pendidikan tinggi yang semakin berorientasi ke pasar kerja. Menurutnya, orientasi tersebut kemudian membentuk cara berpikir instrumental, yang lebih mengedepankan nalar praktis daripada kritis, di kalangan mahasiswa.

Menurut Agung, pendidikan yang menghasilkan cara berpikir instrumental melenceng dari tujuan pendidikan nasional sebagaimana tercantum dalam UU Nomor 20 Tahun 2003. Sebab, tujuan pendidikan bukan lagi urusan membentuk karakter dan menciptakan warga negara yang kritis, melainkan bentuk investasi individu semata. "Nalar kritis bukan lagi menjadi tujuan dari pendidikan, melainkan sekadar mencari keterampilan yang kemudian bisa dijual di pasar kerja," jelas Agung.

Upaya untuk menyingkirkan nalar kritis sebagai tujuan utama pendidikan termanifestasi dalam manufakturisasi kurikulum. Menurut Agung, manufakturisasi kurikulum adalah kurikulum yang disusun untuk mempersiapkan mahasiswa masuk ke dunia kerja. Wujud konkretnya adalah hilangnya mata kuliah yang memupuk nalar kritis, seperti Filsafat. Mata kuliah tersebut digantikan dengan mata kuliah yang lebih praktikal. "Akibatnya, kurikulum pendidikan tinggi tidak lagi melahirkan manusia yang mampu berpikir kritis, tetapi hanya tukang-tukang yang nantinya hanya bekerja untuk melayani klien mereka," ujar Agung.

Bentuk dari manufakturisasi kurikulum tersebut termanifestasi lewat paket kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM). Menurut Agung, bentuk manufakturisasi dalam program MBKM tersebut terletak pada kurikulumnya yang lebih berorientasi terhadap pasar kerja. "Ada ide untuk menjembatani kampus dengan dunia kerja melalui program merdeka belajar sehingga harapannya mahasiswa menjadi siap masuk dunia kerja," tutur Agung.

Hal tersebut diperkuat oleh Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nadiem Anwar Makarim dalam acara peluncuran program Kampus Merdeka pada 24 Januari 2020. Dalam peluncurannya, Nadiem menyatakan bahwa Kampus Merdeka akan meningkatkan keterampilan sarjana menjadi lebih adaptif dalam merespons kebutuhan dunia kerja. "Pendidikan tinggi harus bergerak paling cepat, ia paling dekat dengan dunia pekerjaan," tutur Nadiem.

Melalui Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, Nadiem berupaya menggerakkan perguruan tinggi untuk lebih dekat dengan ranah industri. Dalam peraturannya, perguruan tinggi wajib memberikan hak bagi mahasiswa untuk mengambil sejumlah Satuan Kredit Semester (SKS) di luar perguruan tinggi sebanyak dua semester. Dua semester tersebut akan disetarakan dengan 40 SKS. Adapun program yang dapat diambil mahasiswa di luar perguruan tinggi yaitu, magang, kampus mengajar, pertukaran mahasiswa merdeka, studi independen, Indonesian International Student Mobility Awards (IISMA), membangun desa, proyek kemanusiaan, riset atau penelitian, dan wirausaha.

Dalam merespons kurikulum MBKM, Agung menekankan pentingnya mengembangkan nalar kritis mahasiswa. Kurikulum MBKM yang berfokus pada penciptaan sumber daya manusia berdaya saing tinggi di

pasar kerja berpotensi mereduksi nalar kritis. “Padahal, kebutuhan manusia tidak berhenti pada kesejahteraan ekonomi saja, tetapi juga kebutuhan akan aktualisasi diri dan pengetahuan,” tambah Agung.

Di sisi lain, program yang digadang-gadang mampu menjawab tantangan industri tersebut nyatanya masih memiliki banyak PR yang belum tuntas. Beberapa kampus merasakan kebingungan dalam merespons kebijakan ini. Hal ini karena kebijakan tersebut hanya memberikan pedoman umum tanpa disertai petunjuk teknis yang jelas. Bhimo Rizky Samudro, Ketua Program Studi Ekonomi Pembangunan UNS, mengaku bahwa pihak universitas harus menerjemahkan sendiri-sendiri sistem yang dimaksudkan Menteri. “Ada kekagetan dalam merespons kemauan menteri, dosen-dosen pun juga sama bingungnya,” ungkap Bhimo.

Salah satu program yang menimbulkan banyak kontroversi adalah program Magang Bersertifikat Kampus Merdeka. Dalam program magang ini, mahasiswa akan bekerja di instansi atau mitra kampus selama satu semester yang disetarakan dengan 20 SKS. “Pembatasan sejumlah 20 SKS tersebut tentu saja merugikan mahasiswa yang berhak menempuh lebih dari 20 SKS,” jelas Bhimo.

Yhuliana Purnamasari, mahasiswa UNS selaku peserta program magang MBKM di Bank Indonesia Surakarta, mengatakan bahwa dirinya tidak dapat mengambil jam belajar maksimal karena mengikuti MBKM. Yhuliana mengungkapkan bahwa seharusnya dalam semester ini bisa mengambil lebih dari 20 SKS. “Jadi seharusnya di semester enam ini bisa 24 SKS, tapi gara-gara magang jadi terbatas 20 SKS saja,” terangnya.

Terkait hal tersebut, Joko Susilo atau yang kerap dipanggil Josu, Pegiat Magister Administrasi Publik Corner UGM, berpendapat bahwa program magang memiliki kecenderungan merampas jam belajar mahasiswa. “Program magang dapat dikatakan merebut jam belajar jika sifatnya diwajibkan,” jelas Josu. Namun, MBKM tidak mewajibkan program magang dalam peraturannya.

Meskipun demikian, sebagaimana yang diungkapkan oleh Muhtar Habibi, Dosen Fisipol UGM, magang dapat bersifat wajib karena ada peran struktur. Struktur yang dimaksud adalah struktur yang menuntut mahasiswa untuk memiliki daya saing tinggi untuk dapat memperoleh pekerjaan. “Pengalaman kerja itu sekarang diminta oleh pemberi kerja yang kemudian menyebabkan banyak orang untuk mengikuti magang,” jelas Muhtar.

Bentuk program MBKM lain yang bermasalah adalah Program Bangkit. Dilansir dari laman resmi Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, program ini merupakan salah satu model pembelajaran Kampus Merdeka yang dirancang melalui kolaborasi Google sebagai pelaku teknologi global. Tidak jauh berbeda dari program magang, program ini juga bermasalah pada sistem SKS. Salah satu peserta Program Bangkit dari Fakultas Teknik UGM, Firhan Mahdi, mengungkapkan bahwa terdapat ketidaksesuaian aturan jumlah SKS yang seharusnya disetarakan 20 SKS tetapi pada implementasinya hanya diperkenankan 11 SKS saja. “Program bangkit ini awalnya dijanjikan setara dengan 20 SKS, tetapi pada akhirnya hanya bisa ambil 11 SKS,” ungkap Firhan.

Selain memiliki permasalah terkait dengan SKS, dua program MBKM tersebut juga cenderung eksploitatif. Dalam mengikuti program magang, peserta merasa kesulitan dengan beban kerja yang masih ditambah dengan adanya asesmen dan kelas materi dari mitra magang. “Sedikit kesulitan karena selain mengerjakan tugas di satuan kerja, kita juga harus menyelesaikan proyek riset yang diberikan instansi,” ungkap Yhuliana.

Keluhan yang sama juga diungkapkan oleh Hanifatun Nida, peserta Program Bangkit dari Sekolah Vokasi UGM. Ia mengeluhkan manajemen waktu Program Bangkit yang menurutnya harus lebih mempertimbangkan kondisi fisik dan mental pesertanya. Selain itu, ia juga sering mendengar informasi peserta Program Bangkit yang mengundurkan diri dengan alasan tidak kuat. “Awalnya ada sekitar 3000 peserta dan sekarang tinggal 2700-an,” jelas Nida.

Meskipun mengeluhkan kondisi kerja yang eksploitatif, mereka enggan mengaku tereksploitasi. Mereka cenderung menormalisasi dengan dalih mendapatkan insentif, sertifikat, dan pengalaman kerja. “Memang ada sisi merugikannya, tapi dari program magang ini kami juga mendapatkan banyak poin plus,” ungkap Yhuliana.

Hal serupa juga diungkapkan oleh Nida. Ia mengaku tidak merasa tereksploitasi karena pada akhirnya semua tugas akan memberikan manfaat bagi para peserta. “Meskipun konsekuensinya lelah fisik dan mental, banyak hal baru yang kami pelajari,” jelas Nida.

Menurut Muhtar, kondisi seseorang tidak merasa dieksploitasi dapat dijelaskan melalui aspek struktural dan kultural. Aspek struktural yang dimaksud oleh Muhtar adalah sedikitnya jumlah lapangan pekerjaan. Kondisi tersebut membuat pengalaman kerja yang diperoleh melalui magang menjadi penting untuk didapatkan. Akibatnya, mereka dipaksa untuk magang supaya berhasil dalam memperebutkan lapangan pekerjaan yang sedikit. Sementara itu, secara kultural, banyaknya gambaran tentang hidup yang ideal membuat mahasiswa tidak sadar akan terjadinya eksploitasi. Magang menjadi salah satu rangkaian hal yang harus dilakukan oleh mahasiswa untuk mendapatkan hidup yang ideal. Kondisi struktural dan kultural ini membuat segala konsekuensi dari proses pencarian pengalaman kerja menjadi mudah diterima, termasuk eksploitasi.

Sementara itu, Bayu Dardias, Dosen Fisipol UGM, berpendapat bahwa program MBKM tidak mengambil seluruh ruang akademik. Menurutnya, program ini justru memberikan otonomi bagi mahasiswa untuk dapat mengambil mata kuliah dari program studi lain yang mereka minati. Bayu juga menekankan bahwa MBKM merupakan respons terhadap pendidikan tinggi di Indonesia yang tidak berhasil menyediakan tenaga kerja dengan daya saing tinggi. “Contohnya Gojek saat ini menggunakan tenaga kerja dari India untuk mengolah data,” tegas Bayu.

Berbenturan dengan argumen Bayu, Josu menekankan permasalahan sebenarnya bukan terletak pada pemenuhan tenaga kerja dan daya saing, melainkan ketidakjelasan model pendidikan tinggi yang diadopsi oleh Indonesia. Josu menjelaskan bahwa model pendidikan tinggi terdiri dari tiga model dengan fokus yang berbeda-beda, yaitu *public university*, *for-profit university*, dan *non-profit university*. Misalnya, di Jerman, riset dan pengembangan *public university* terintegrasi dengan industrialisasi negara. “Karena tidak ada model pendidikan tinggi yang jelas, dampaknya tidak ada industrialisasi yang disusun oleh negara,” jelas Josu. **[Aldyth, Renova, Yeni]**

© Ulil/BAL

Tercampak, Termarginalisasi, dan Tertendang: Nasib Program Studi Sosial-Humaniora Nonpopuler pada Era Industri

Dilansir dari laman Lembaga Tes Masuk Perguruan Tinggi (LTMPT), pada tahun 2018 hingga tahun 2020 popularitas program studi UGM didominasi oleh Psikologi dalam rumpun sosial-humaniora dan Kedokteran dalam rumpun saintek. Dalam rumpun sosial-humaniora sendiri, Psikologi, Hukum, dan Manajemen menduduki peringkat tiga besar dalam hal popularitasnya selama tiga tahun terakhir, yang dapat dilihat dari jumlah peminatnya. Akibatnya, muncul masalah di rumpun ilmu sosial-humaniora yang kurang populer. Hal ini dapat dilihat melalui sejarah marginalisasi rumpun sosial-humaniora yang kemudian membentuk stigma pada program studi yang kurang populer.

Dalam wawancara daring bersama Balairung, Dendy Raditya peneliti dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UGM, menjelaskan bahwa permasalahan yang dialami oleh rumpun sosial-humaniora ini sudah terjadi sejak lama. Dalam lingkup dunia, Dendy berpendapat bahwa marginalisasi rumpun sosial-humaniora terjadi saat ilmu sosial ditemukan, yakni pada abad ke-19 ketika revolusi industri pertama. Menurut Dendy, ilmu sosial-humaniora pada waktu itu hanya dipakai untuk membuat masyarakat siap terhadap dunia industri sehingga ilmu sosial-humaniora dianggap kelas dua dibandingkan dengan ilmu-ilmu lainnya yang berpotensi untuk memacu revolusi industri.

Dendy menerangkan bahwa marginalisasi rumpun sosial-humaniora juga turut terjadi di Indonesia. Dendy menjelaskan bahwa hal ini sudah terjadi sejak pemerintahan Belanda memberlakukan Politik Etis. Menurutnya, saat Politik Etis ini berlangsung, pemerintah membangun sekolah yang dinamakan *Algemeene Middelbare School* (AMS), yang pada perkembangannya dibagi menjadi AMS A dan AMS B. AMS A berfokus pada studi sastra timur dan barat. Sedangkan, AMS B berfokus pada studi saintek. Dendy menjelaskan bahwa hanya orang-orang yang bersekolah di AMS B yang dapat melanjutkan studi di beberapa perguruan tinggi ternama kala itu. "Seperti STOVIA (kedokteran), RHS (hukum), dan THS (teknik), orang-orang AMS B bisa masuk ketiganya, sedangkan yang AMS A hanya bisa masuk ke RHS (hukum)," ujarnya. Dari sini, Dendy melihat bahwa sejak saat itu superioritas bidang kajian ilmu alam sudah mulai terlihat dalam masyarakat Nusantara.

Ben Laksana, dosen Ilmu Hubungan Internasional di International University Liaison Indonesia, menambahkan bahwa marginalisasi ini berlanjut pada masa Orde Baru, dan dilanggengkan pada masa pascareformasi. Ben berargumen bahwa pada masa Orde Baru, pemerintah membentuk ulang ilmu sosial-humaniora agar bisa mendukung kepentingan negara. "Pada Orde Baru rumpun sosial-humaniora tidak disingkirkan, dia dipakai untuk kepentingan tertentu, baru pada masa pascareformasi, rumpun sosial-humaniora mulai tersingkir," tegas Ben. Ben berpendapat bahwa penyingkiran ini terjadi akibat narasi dari World Bank dan Organization for Economic Cooperation and Development yang membuat pemerintah memfokuskan institusi pendidikan ke arah ekonomi.

Di lain pihak, Dendy berpendapat, bahwa aspek yang melestarikan marginalisasi ini adalah dialog keilmuan antar kluster yang hanya terjadi saat mahasiswa sudah menjalani KKN atau penelitian bersama seperti PKM saja. Dendy menyebutkan bahwa masalah tersebut dapat langgeng karena masyarakat yang melihat suatu manfaat praktis dari bidang keilmuan. Masyarakat Indonesia, menurut Dendy, mayoritas mengukur manfaat dari

pembangunan secara fisik. "Sosial-humaniora ini kan manfaatnya tidak fisik, sehingga sering dianggap tidak bermanfaat," ujarnya.

Dendy juga mengatakan bahwa program magang MBKM (Merdeka Belajar Kampus Merdeka) semakin meminggirkan rumpun sosial-humaniora apabila melihat program magang yang ditawarkan. Selaras dengan Dendy, Ben menjelaskan bahwa hal itu semakin berpotensi memarginalkan ilmu sosial-humaniora mengingat tujuannya untuk kepentingan pasar dan industri.

Herdito Sandi Pratama, dosen Filsafat Ekonomi UI, mengatakan bahwa marginalisasi sosial-humaniora tersebut secara primer diakibatkan oleh lahirnya *market system*. Sandi memaparkan bahwa setelah adanya *market system*, semua kegiatan produksi harus ada monetisasi dan ekuivalensinya terhadap uang. "Sebelum itu belum ada pemarginalan. Setelah *market system* muncul, semua menjadi kalkulasi ekonomi," tambahnya. Sandi menegaskan bahwa *market system* juga mendorong terciptanya dua faktor sekunder penyebab marginalisasi rumpun sosial-humaniora dalam konteks pendidikan tinggi. Kedua faktor tersebut adalah faktor kebijakan dan faktor tidak disengaja.

Sandi menjelaskan bahwa faktor kebijakan disebabkan oleh salah satu tujuan dari aktivitas perguruan tinggi adalah harus memiliki suatu kontribusi bagi pertumbuhan ekonomi negara. Faktor ini membuat ilmu sosial-humaniora hanya dianggap sebagai beban pengeluaran, alih-alih pendapatan, karena kajiannya yang tidak bisa langsung membuka lapangan pekerjaan dan minim mendorong otomatisasi teknologi. Sedangkan faktor tidak disengaja memungkinkan fenomena marginalisasi tersebut terjadi dengan sendirinya tanpa disadari. Misalnya, dalam konteks Indonesia, hal itu terwujud dalam semangat pertumbuhan ekonomi dan pengejaran pembangunan infrastruktur fisik.

Sandi mengungkapkan bahwa marginalisasi yang dilanggengkan ini memiliki dua dampak besar bagi masyarakat Indonesia pada masa depan. Dampak pertama, di masa depan pembangunan nasional dianggap hanya dapat melalui ilmu alam, teknologi, dan semacamnya. Dampak yang kedua, tidak banyak anak-anak muda yang memahami esensi demokrasi, signifikansi etika, dan pengetahuan tentang ruang publik.

Di sisi lain, muncul dampak-dampak yang dirasakan oleh alumni program studi sosial-humaniora. Sandi menyatakan bahwa terjadi disparitas pendapatan antara lulusan sosial-humaniora dengan lulusan non-sosial-humaniora. Akan tetapi, menurut Sandi, dalam tren sepuluh tahun terakhir, terdapat suatu fenomena bahwa disparitas pendapatan antara kedua lulusan ini dapat semakin mengecil setelah sekian lama bekerja. "Namun, data ini harus bisa dibaca secara hati-hati karena banyak aspek yang menjadi pertimbangan," jelas Sandi.

Menurut Sandi, pertimbangan data tren mengecilnya disparitas pendapatan lulusan sosial-humaniora tersebut didasarkan pada realitas bahwa banyak lulusan sosial-humaniora yang adaptif dengan lingkungan pekerjaan yang tidak linier dengan dengan jurusan yang dahulu mereka tekuni.

Muhammad Gemilang, mahasiswa Antropologi Budaya UGM yang baru wisuda pada tahun ini, merasakan dampak dari fenomena marginalisasi ini sehingga sulit mendapatkan pekerjaan yang linier dengan jurusannya. Gemilang juga beranggapan bahwa untuk mencari pekerjaan dari rumpun ilmu sosial, peluang-peluang yang hadir hanyalah datang dari jaringan dan orang dalam.

Gemilang menerangkan bahwa hanya sedikit temannya yang mudah mendapatkan pekerjaan secara linier. Jika tidak mendapatkan pekerjaan yang sejalur dengan Antropologi, mereka akan keluar jalur dan bekerja di bidang lain. "Bahkan, teman saya ada yang menjadi operator di situs belanja daring, kerja di perbankan, dan semacamnya," terang Gemilang. Gemilang sendiri sedang bekerja menjadi pekerja lepas

> *Setelah adanya market system, semua kegiatan produksi harus ada monetisasi dan ekuivalensinya terhadap uang.*

dalam suatu proyek di Riau. "Pertimbanganku saat itu bukan hanya permasalahan uang semata, melainkan juga keselamatanku di tengah pandemi," ujar Gemilang.

Meski demikian, masih ada orang-orang yang berusaha untuk bekerja sesuai bidang studi yang ditekuni. Rangga Mahaswa, lulusan Filsafat UGM tahun 2014, mengatakan bahwa untuk tetap bekerja secara linier, ada lulusan Filsafat yang berusaha saling membantu secara kolektif untuk menghidupi kehidupan personal atau keluarga.

Rangga memberi saran jika seorang dari lulusan sosial-humaniora ingin memperbaiki kondisi ekonomi, maka mendaftarlah sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), magang, atau bekerja di suatu perusahaan. "Lupakan jurusan yang pernah Anda pilih," ujar Rangga. Rangga bercerita bahwa ketika ia bertanya kepada teman-teman jurusannya di suatu kementerian tentang relevansi jurusan yang pernah mereka tekuni dengan pekerjaan mereka sekaran, mereka menjawab tidak ada. Justru, di tempat kerjanya mereka dipekerjakan untuk membuat surat, laporan, dan olah data yang baik—jauh dari jurusan yang dulu mereka tekuni. Akan tetapi, sebagai lulusan filsafat, teman-teman Rangga memandang rekan kerja mereka sebagai manusia satu dimensi.

Sandi memberikan kesimpulan terhadap fenomena pekerjaan linier dan nonlinier ini. Menurutnya, kita harus kembali pada esensi perguruan tinggi yang seharusnya sadar bahwa indikator keberhasilan akademiknya adalah mencetak lulusan yang menjadi ilmuwan. "Yang terpenting, kesuksesan perguruan tinggi dalam meluluskan mahasiswanya adalah ketika mahasiswa itu bekerja di mana saja, tetapi tetap membawa watak keilmuan yang ditekuni," jelas Sandi.
[Albertus, Fauzi, Valentino]

© Leo/BAL

Pendidikan Tinggi untuk Memutar Roda Perekonomian si "Goliath"

Pendidikan tinggi yang menghamba pada Goliath atau institusi korporat—alih-alih David yaitu kaum marjinal—digadang-gadang akan memberikan angin pembaharuan. Program MBKM memang membawa label merdeka, tetapi logika yang dipakai merupakan konsepsi lama yang mengerucutkan esensi pendidikan sebagai pemutar roda perekonomian.

Salah satu program utama yang ditawarkan oleh Menteri Pendidikan Nadiem Makarim adalah program "Kampus Merdeka". Seakan membawa angin pembaharuan, Nadiem membawa ide baru dalam napas pendidikan tinggi Indonesia, yaitu "Merdeka Belajar". Namun, jika ditelusuri lebih lanjut, definisi merdeka yang diusung Nadiem hanya mendaur ulang logika lama pendidikan yang harus mendekatkan diri pada logika pasar, bahwa tujuan utama pendidikan tak lain adalah untuk mencetak tenaga kerja.[1] Hal ini ada hubungannya dengan proyek besar neoliberalisasi pendidikan tinggi. MBKM sendiri terdiri dari 4 poin utama.[2] *Pertama*, otonomi pembukaan program studi baru bagi perguruan tinggi berakreditasi A dan B. *Kedua*, reakreditasi otomatis bagi perguruan tinggi, di mana pengajuan kenaikan akreditasi bersifat sukarela. *Ketiga*, kemudahan syarat perguruan tinggi negeri menjadi PTN berbadan hukum (PTN-BH). *Keempat*, hak belajar tiga semester di luar program studi dengan pilihan kegiatan berupa magang, sukarelawan, pertukaran pelajar, penelitian, dan sebagainya.

Kebijakan MBKM tampak memerdekakan mahasiswa, tetapi jika ditelisik lebih dalam, kebijakan ini hanya melanggengkan praktik neoliberalisme pendidikan tinggi sebab kedua agenda kapitalis ada dalam kebijakan tersebut. Dalam kebijakan re-akreditasi misalnya, penurunan drastis jumlah pendaftar dan lulusan menjadi salah satu indikator penurunan mutu sehingga perguruan tinggi atau prodi wajib ditinjau ulang akreditasinya oleh BAN-PT.[3] Sementara itu, pembukaan program studi baru banyak bekerja sama dengan industri dan organisasi. Agenda kapitalis dapat dilihat dalam logika berikut: dengan iming-iming memperoleh "pekerjaan aman dan berkualitas", banyak mahasiswa mendaftar ke program studi dengan permintaan tenaga kerja yang tinggi. Di lain sisi, program studi yang kurang dibutuhkan industri mengalami penurunan pendaftar. Jika terus berlanjut, program studi yang tidak dianggap penting dalam sistem kapitalisme akan hilang diganti dengan program studi baru yang dibangun dengan perusahaan. Dengan dua kebijakan ini, pasar dan industri dipermudah untuk mengintervensi konten pendidikan tinggi dan program studi yang layak eksis.

Karakteristik neoliberal dalam pendidikan tinggi Indonesia tercermin melalui berbagai sikap dan kebijakan pemerintah. Neoliberalisme sendiri memiliki pengertian yang cukup luas, tetapi Harvey (2005) merumuskan prinsipnya dalam empat (4) poin.[4] *Pertama*, privatisasi layanan publik dari pemerintah untuk dialihkan pada kepemilikan swasta. Kedua, komodifikasi layanan dan tenaga kerja sehingga keduanya menjadi komoditas yang diperdagangkan dalam pasar. Ketiga, finansialisasi dengan penekanan pada kebijakan moneter di atas kebijakan fiskal serta keempat, kewaspadaan terhadap potensi krisis keuangan dan ekonomi. Secara lebih ringkas, manifestasi neoliberalisme diekspresikan dalam formula D-L-P, deregulasi, liberalisasi, dan privatisasi.[5] Berpijak dari prinsip ini, neoliberalisme mendorong kehidupan sosial ke dalam matriks pasar dan ekonomi sehingga layanan publik dikaitkan dengan aktivitas akumulasi kapital dan keuntungan.

Mekanisme seperti ini malah tidak memerdekakan mahasiswa justru mereka makin terkungkung pikirannya, berputar pada ruang konsepsi bahwa memang ada hierarki dalam pendidikan tinggi. Ilmu yang patut untuk dipelajari adalah ilmu yang bermanfaat terhadap roda perekonomian. Konsepsi seperti ini berpotensi membuka pasar untuk proyek yang memerlukan rasionalisasi ilmiah, sebut saja Badan Riset dan Inovasi Nasional yang rawan dipolitisasi dengan adanya dewan pengarah dari negara.[6]

Mekanisme ini berpotensi untuk memperbesar jurang ketidaksetaraan ekonomi, di mana kaum terpelajar tercerabut dari fungsi-fungsi kritis dan emansipatorisnya untuk berpihak pada kelompok yang paling lemah. Padahal, kebermanfaatan terhadap masyarakat secara luas serta partisipasi mahasiswa dan kelompok akar rumput dalam pembuatan kebijakan menjadi parameter penting dalam menilai keadilan suatu sistem pendidikan tinggi.

Jika diamati, peran universitas telah berkembang selama dua dekade terakhir. Universitas dahulu digambarkan sebagai lembaga "menara gading" yang hanya berfokus pada praktik akademik tradisional yaitu pengajaran dan penelitian.[7] Peran universitas menjadi lebih signifikan dengan munculnya ekonomi berbasis pengetahuan. Universitas dipandang sebagai penggerak inovasi dan perubahan yang kuat dalam sains dan teknologi. Institusi tersebut bertanggung jawab untuk membekali lulusan dengan pengetahuan dan keterampilan dan juga telah menyemai "benih-benih" inovasi untuk industri, produk dan jasa baru; dari sinilah jaringan bisnis dalam ekonomi pengetahuan muncul. Keterlindanan ini kemudian dikenal sebagai triple helix model of innovation.

Fenomena *triple helix model of innovation* yang dikenal luas oleh negara maju—seperti Jerman—awalnya muncul dari kebutuhan universitas akan kerja sama dengan industri (yaitu Double Helix) untuk meningkatkan limpahan pengetahuan dan mempertahankan pembangunan berkelanjutan dari integrasi industri-universitas.[8] Negara kemudian masuk dalam rangka pengembangan wilayah lokal yang dibantu dengan adanya hubungan *double helix* ini, membuat fenomenanya bergeser menjadi *triple helix model of innovation.*

Hal yang sama tidak terjadi di negara berkembang seperti Chile dan Indonesia. Perkembangan hubungan negara, universitas, dan industri dibawah mekanisme *triple helix* cukup lambat jika dibandingkan dengan Eropa dan Amerika Serikat.[9] Oleh karena itu, untuk memahami paradigma *triple helix* dari sudut pandang negara berkembang, perlu dipahami konteks risiko yang telah dan akan terjadi selama tahap implementasi. Hal ini dapat dicapai dengan mengkomparasikan kasus yang sama dengan negara yang lebih mapan triple helix model-nya, seperti Jerman. Analisis kebermanfaatan dari kasus pada dua area tersebut dapat dilihat sebagai tolok ukur keefektivitasan hubungan *triple helix model of innovation.* Analisis nilai-nilai neoliberalisme dalam sistem pendidikan tinggi di suatu negara dapat dilihat dari misi pendidikan tinggi secara umum yang mencakup 3 hal, yaitu *teaching* (pengajaran), *research* (penelitian), dan *service* (pelayanan).[10,11] Hal ini selaras dengan UU No. 12 Tahun 2012 Pasal 1 Ayat 9 tentang Tridharma Perguruan Tinggi yang menyebut bahwa Tridharma Perguruan Tinggi adalah kewajiban Perguruan Tinggi untuk menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Pengajaran

Pengajaran dalam pendidikan tinggi dapat didefinisikan sebagai interaksi antara mahasiswa, dosen, dan sumber belajar di dalam suatu lingkungan belajar.[12] Kehadiran nilai neoliberalisme di suatu sistem pendidikan tinggi dapat diteliti menggunakan dua poin. *Pertama*, peran negara dalam pengeluaran dana ke pendidikan tinggi. Di saat negara memiliki campur tangan yang minim terhadap pengucuran dana ke pendidikan tinggi, terpiculah privatisasi pendidikan tinggi—salah satu poin dari Harvey mengenai prinsip neoliberalisme. Privatisasi pendidikan tinggi memberikan dampak negatif, seperti biaya pendidikan yang tinggi, transformasi pendidikan menjadi bisnis, eksploitasi tenaga pengajar, kurangnya transparansi, dst.[13] Kontribusi dana dari negara dapat dilihat dari data pengeluaran Negara di pendidikan tinggi sebagai persentase dari Pendapatan Domestik Bruto (PDB).

Berdasarkan data dari UNESCO Institute for Statistics (UIS), pengeluaran Indonesia di pendidikan tinggi sebagai persentase dari PDB pada tahun 2010 dan 2015 merupakan yang terendah dibandingkan Chile dan Jerman. Bahkan, peran Negara di Indonesia dapat dikatakan terlalu kecil karena masih cukup jauh dari angka 1 persen.

Tabel 1. Pengeluaran Negara di pendidikan tinggi sebagai persentase dari PDB (%).

		Pengeluaran Negara di pendidikan tinggi sebagai persentase dari PDB (%)
Chile	2010	0.93
	2015	1.25
Indonesia	2010	0.45
	2015	0.57
Jerman	2010	1.34
	2015	1.25

Kedua, orientasi dari pendidikan tinggi. Sistem pendidikan tinggi yang neoliberal memiliki tujuan semata untuk memproduksi tenaga kerja guna memenuhi kebutuhan pasar. Maka dari itu, disiplin-disiplin ilmu yang lebih "berguna" akan dianggap lebih penting. Dikotomi antara ilmu pengetahuan terapan dan ilmu pengetahuan murni akan menjadi sesuatu yang semakin kental. Hal ini dapat menghasilkan adanya hierarki dalam ilmu pengetahuan. Ben Laksana, dalam salah satu tulisannya mengungkapkan "adalah suatu hal yang menyedihkan ketika pengetahuan yang diajarkan dalam ruang-ruang kelas harus tunduk mutlak pada tujuan mencetak manusia-manusia pemutar roda ekonomi."[14] Dalam meninjau orientasi dari pendidikan tinggi, dapat digunakan data persebaran mahasiswa berdasarkan disiplin studi.

Berdasarkan data persebaran komposisi prodi mahasiswa pendidikan tinggi dari tahun 2015 hingga tahun 2018 oleh UIS database, perubahan komposisi prodi dari tahun ke tahun Chile dan Jerman cenderung stabil dengan fluktuasi 0—2%. Tetapi, Indonesia memiliki perubahan yang cukup signifikan, seperti prodi pendidikan yang turun jumlah kursinya sebesar 6,28%. Prodi ini dulunya populer karena dianggap dapat memberikan jaring pengaman bagi para lulusannya, tetapi dalam jangka waktu tiga tahun dinilai kurang relevan lagi. Sementara itu, porsi persebaran mahasiswa pada sektor lain meningkat seperti pada prodi bisnis, administrasi, hukum (perubahan 2,9%) dan teknik, manufaktur, dan konstruksi (perubahan 2,05%). Kursi yang disediakan oleh universitas serta pergeseran minat mahasiswa ke sektor tersebut dikarenakan tuntutan zaman digitalisasi dan neoliberalisme yang semakin besar, sehingga prodi praktis—yang dapat diserap dalam pasar kerja korporat—meningkat jumlah mahasiswanya.

Penelitian

Penelitian pada pendidikan tinggi dapat dilihat sebagai jembatan penghubung antara industri dan masyarakat secara keseluruhan.[15] Sementara itu, penelitian di perguruan tinggi dipengaruhi oleh dana yang dapat diperoleh melalui berbagai sumber, baik pemerintah/negara, perusahaan, swasta non-profit, luar negeri dan dari perguruan tinggi itu sendiri. Pertanyaan yang harus dijawab adalah tentang seberapa besar intervensi negara terhadap pendanaan penelitian di pendidikan tinggi.

Tabel 2. GERD di pendidikan tinggi sebagai persentase dari PDB—2013 dan 2017.[16]

	GERD sebagai % dari PDB	
	2013	2017
Chile	0.15	0.16
Indonesia	0.03	0.05
Jerman	0.51	0.53

Indonesia memiliki angka Gross Expenditure on Research and Development (GERD) di pendidikan tinggi sebagai persentase dari PDB yang paling rendah dibandingkan dengan Chile dan Jerman. Walaupun demikian, angka tersebut mengalami kenaikan yang signifikan dari tahun 2013 ke 2017. Di lain sisi, Jerman memiliki persentase yang paling tinggi dan bahkan sampai menyentuh angka 0,5 persen di tahun 2017.

Tabel 3. Distribusi GERD berdasarkan sumber dana (%)

	Sumber dana					
	Bisnis	Negara	Pendidikan tinggi	Swasta non-profit	Luar negeri	Lainnya
Chile 2017	2.6	56	33.4	0.4	7.6	-
Indonesia 2018	2.9	78.1	14.1	0.3	0.1	4.5
Jerman 2017	13.4	82.4	-	-	4.2	-

Sumber : UIS database

Porsi pendanaan paling besar di Chile, Indonesia, maupun Jerman masih dipegang oleh negara (lihat Tabel 3). Indonesia dan Chile pun memiliki sumber dana yang lebih bervariasi dibandingkan Jerman yang hanya memiliki tiga kanal dana yaitu bisnis, negara, dan luar negeri. Porsi pendanaan bisnis di Chile dan Indonesia terbilang kecil, berada di kisaran 2,6%—2,9%, sedangkan Jerman memiliki porsi sumber pendanaan dari bisnis sebesar 13,4%. Jerman telah mengadopsi kebijakan dimana biaya kuliah di semua negara bagiannya gratis terhitung sejak tahun 2014 setelah terjadinya berbagai gelombang protes sehingga tidak ada kanal pendanaan swasta non-profit.[17]

Di Chile, terjadi pergerakan sosial massal yang merupakan reaksi dari efek sistem ekonomi dan pendidikan neoliberal yang telah diterapkan selama tiga dekade sebelumnya.[18] Di bawah kepemimpinan militer tahun 1980-an, Chile mengadopsi nilai-nilai neoliberalisme dalam pelaksanaan pendidikan tingginya. Periode yang berorientasi pada pasar dan efisiensi ini ditandai dengan tiga karakteristik utama, yaitu diferensiasi, deregulasi, dan perubahan mekanisme finansial. Diferensiasi institusi pendidikan tinggi Chile dalam tiga kategori yang berbeda adalah universitas, institusi untuk pendidikan profesional, dan sekolah teknikal. Deregulasi—pemangkasan peran badan-badan usaha milik negara dalam perekonomian—dinilai dapat mempercepat pertumbuhan dan persebaran institusi swasta yang diharapkan mampu bertindak lebih produktif dalam tekanan pasar. Sementara itu, perluasan mekanisme finansial disediakan mulai dari pendanaan dengan dana publik, pendanaan spesial, pendanaan mandiri, hingga pinjaman pendidikan.

Ketiga karakteristik ini mengarahkan institusi pendidikan tinggi Chile kepada kondisi pasar yang kompetitif, dimana setiap institusi saling bersaing menarik konsumen dan staf pengajar terbaik dengan memanfaatkan reputasi yang mereka miliki.[19] Pendidikan tinggi mengejar kepentingannya sendiri dan bertindak berdasarkan keputusan "pesaing" di pasar institusi. Kemudian, diasumsikan bahwa setiap institusi harus menikmati fleksibilitas tinggi—yang diperoleh sebagai implikasi proses deregulasi—untuk mengatur kurikulum dan tugas manajerial lainnya agar dapat mencapai kualitas maksimal.[20] Pada akhirnya, mahasiswa sebagai konsumen berusaha bersikap rasional untuk memilih mekanisme finansial pendidikan tinggi (*educational vouchers*) yang tersedia. Institusi neoliberal yang mengakar di Chile tidak mengubah komposisi kucuran pendanaan dari negara, tetapi dari pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa penggunaan dana dari negara harus ditelisik pula. Chile menggunakan dana negara untuk menjawab kepentingan pasar serta mendasarkan keberlangsungan pendidikan tingginya dengan prinsip efektivitas.

Teropong yang sama juga dapat digunakan untuk menganalisis hasil dari kucuran dana dari negara ke institusi pendidikan tinggi di Indonesia. Dana negara digunakan untuk meluncurkan program-program Direktorat Pendidikan Tinggi (DIKTI) seperti MBKM. Berdasarkan buku panduan MBKM, program ini bertujuan untuk mendorong mahasiswa agar menguasai berbagai keilmuan yang berguna demi memasuki dunia kerja.[22] Prodi punya kewajiban untuk menyiapkan daftar mata kuliah yang dapat diambil mahasiswa lintas prodi. Sementara mahasiswa mengikuti pedoman akademik dan mengikuti alurnya saja, asalkan terdaftar di DIKTI. Jika dibedah lebih lanjut, ada satu asumsi tebal, yaitu mahasiswa disarankan untuk mengikuti mekanisme yang telah dirancang untuk berorientasi pada kepentingan akumulasi kapital.

Pelayanan

Pelayanan, misi ketiga dari pendidikan tinggi, dipotret sebagai "kontribusi untuk masyarakat". Terdapat dua konsepsi paradigmatik berbeda dalam mengartikan objektif dari misi ketiga pendidikan tinggi ini. *Pertama*, meningkatkan daya saing di pasar ekonomi dan melahirkan tenaga kerja serta yang kedua adalah meningkatkan kualitas kehidupan dan pengembangan masyarakat dengan implikasi jangka panjangnya.[23] Dalam konsepsi pertama, institusi pendidikan tinggi yang berisikan orang-orang berpendidikan dan tenaga kerja terspesialisasi ditujukan untuk memberi kontribusi dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi. Kapabilitas intelektual yang ada di pendidikan tinggi menjadi sesuatu yang dikomersialisasi guna meraih profit.

Konsepsi *kedua* yang memiliki pandangan lebih kompleks menegaskan bahwa misi ketiga ini tidak seharusnya berfokus pada keuntungan ekonomi sesaat.[23] Dengan mengesampingkan aktivitas komersialisasi, pendidikan tinggi dilihat sebagai material untuk menyokong pengembangan masyarakat dan bersifat pro bono (*for the public good*).[24] Perguruan tinggi diharapkan dapat menjadi motor yang berkontribusi dalam perkembangan sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat di daerah masing-masing perguruan tinggi beroperasi.[25] Tuntutan akan pemenuhan misi ketiga dari pendidikan tinggi merupakan fenomena yang terjadi secara global, namun diselesaikan secara regional berdasarkan kondisi sosio-ekonomi dan budaya tiap negara.

Pemerintahan federal Jerman menjawab tantangan dari misi ketiga pendidikan tinggi dengan memperkenalkan beberapa program. Dua program yang paling penting untuk disorot adalah laboratorium dunia nyata (*Reallabore*) dan universitas inovatif (*Innovative Hochschule*). Diinisiasi di Negara bagian Baden-Württemberg pada tahun 2013, "Laboratorium dunia nyata" telah mengeluarkan dana sebesar 18 juta Euro dan membiayai 14 proyek. Hal yang ingin dicapai dari program ini adalah: a) menjembatani orang-orang dari dalam dan luar dunia akademik, b) mentransfer rancangan eksperimental ke kondisi dunia nyata yang lebih luas, dan c) mempererat koneksi antara dunia politik dan iptek.

Pelaksanaan program "Laboratorium dunia nyata" diperkuat dengan struktur jaringan Real-World Laboratories for Sustainability Network yang dibuat oleh beberapa institusi pendidikan tinggi Jerman. Jaringan tersebut melakukan beberapa proyek yang mengalihkan konsep laboratorium dari ilmu alam ke analisis proses sosial dan politik yang lebih nyata dan kontributif. Salah satu proyek bertajuk ESQUIRE atau Energiespeicher Dienste für smarte Quartiere yang selesai pada tahun 2020, berhasil menyelidiki bagaimana sistem penyimpanan baterai dapat diadopsi di kota dan bagaimana jaringan listrik dapat distabilkan untuk transisi energi terdesentralisasi.[26] Sistem penyimpanan percontohan dipasang di area perumahan Kota Groß-Umstadt dan Mannheim. Proyek-proyek lain dari jaringan program ini masih dilakukan, bahkan untuk target yang dipasang hingga tahun 2024.

Sementara itu, program "Universitas Inovatif" di Jerman dimulai pada tahun 2017 yang kerap juga dilabeli dengan nama *small excellence initiative*. Tujuan dari program ini adalah agar universitas dapat memperbesar perannya di tingkat lokal serta dapat menjalin kerjasama dengan berbagai mitra sosial, seperti aktor korporat.[27] University of Stuttgart, dengan dana dari program ini, telah melakukan proyek riset untuk mempelajari ilmu konstruksi yang adaptif dengan perkembangan ilmu data dan sistem intelijen digital untuk kebermanfaatan area sekitarnya.[28]

Senada dengan Jerman, misi ketiga perguruan tinggi di Chile terealisasi melalui proses transfer teknologi untuk meningkatkan pengembangan sumber daya manusia dan promosi komersialisasi teknologi ("*go to market*"). Proses ini digiatkan pada tahun 2011 dan dikonsolidasi melalui pembentukan kebijakan publik dikomersialisasi guna meraih profit. Technology Transfer Hubs pada tahun 2015.[29] Melalui kebijakan ini, transfer teknologi di Chile dilakukan dengan model "on campus-off campus". Salah satu dampak nyata kebijakan ini adalah peluncuran inisiatif OpenBridge Covid-19 yang membantu rumah sakit umum Chile menghadapi pandemi. Program ini mengadakan mitra kerja sama dengan Open Beauchef (University of Chile) dan Santander X.

Sementara di Indonesia, dicetuskan program bernama Kuliah Kerja Nyata (KKN) pada tahun akademik 1973/1974. KKN merupakan program pengabdian mahasiswa kepada masyarakat di desa.[30] Melalui program ini, mahasiswa Indonesia diharapkan dapat menyebarkan pengetahuannya dan membantu pengembangan kehidupan masyarakat desa.[31]

Gerakan Resistansi dari Aktor Akar Rumput di Jerman dan Chile

Salah satu perubahan paling penting dalam sistem politik Chile dalam beberapa dekade terakhir adalah perluasan tingkat demokratisasi di sektor-sektor institusi publik strategis, seperti pendidikan tinggi dan aktivisme kepemudaan. Sejak diadakannya pemilu yang transparan pada tahun 2012, trajektori gerakan pendidikan tinggi pun meluas. Tujuan politik dari proyek demokratisasi pada kelompok masyarakat muda ini adalah untuk meningkatkan partisipasi mereka dalam pemilu yang tercatat melemah sejak dekade 1990-an. Memang, kurangnya partisipasi politik di kalangan tersebut dapat dijelaskan sebagai ekspresi dari sentimen apatisme terhadap politik negara yang menghamba pada sistem kapital. Terlepas dari jarak dari politik elektoral dan partisan ini, ada bukti bahwa pemuda Chile memiliki opini yang kuat tentang problematika di sekitarnya dan minat yang tinggi terhadap masalah publik dan sosial, terutama yang terkait dengan masalah ketidakadilan dan perilaku sewenang-wenang oleh aparatur negara.[32,33] Sejak gelombang demonstrasi pemuda pada 2006, Chile mengimplementasikan sistem baru mengenai pendanaan pendidikan publik, contohnya dengan meningkatkan proporsi mahasiswa penerima beasiswa dan menurunkan suku bunga dari pinjaman mahasiswa. Selain itu, parlemen Chile juga membentuk komisi khusus untuk menginvestigasi universitas yang diduga melakukan aktivitas ilegal dalam mencari keuntungan.[34]

Pendidikan tinggi di Jerman pun mengalami banyak perubahan selama 50 tahun terakhir, terutama dalam hal biaya perkuliahan. Penghapusan biaya perkuliahan pertama kali diperkenalkan pada tahun 1971. Namun, negara bagian Baden-Württemberg kembali memperkenalkan biaya perkuliahan sebesar 511 euro pada tahun 1997. Pada tahun 2003 dan 2004, biaya perkuliahan dengan jumlah yang hampir serupa juga diperkenalkan di Negara bagian Bavaria, Hessen, Lower Saxony, Saarland, Saxony-Anhalt, dan Thuringia. Hal ini akhirnya menyebabkan turunnya angka pendaftaran mahasiswa di universitas dan memicu perdebatan mengenai keadilan dalam memperoleh pendidikan.[35]

Gerakan melawan kebijakan mengenai biaya perkuliahan muncul Di Negara bagian Hessen. Gerakan ini melakukan berbagai bentuk aksi seperti demonstrasi, diskusi kelompok, dan pemboikotan biaya perkuliahan. Selain itu, dibuat juga petisi yang meminta gugatan hukum terkait biaya perkuliahan. Petisi tersebut ditandatangani oleh 78.721 orang dan akhirnya gugatan hukum yang diminta dibawa ke pengadilan pada September 2007. Pada Juni 2008, biaya perkuliahan di Hessen berhasil dihapuskan dengan bantuan dari Partai Sosial Demokrat.[36] Gerakan masyarakat juga terjadi di negara bagian lainnya dan memperoleh hasil yang serupa dengan Negara bagian Hessen. Bersumber dari pajak progresif, Pemerintah Jerman akhirnya menghapus biaya perkuliahan di

seluruh negara bagian pada 2014. Tidak sampai di sana, pemerintah juga mencukupi sekitar 80 persen kebutuhan anggaran institusi pendidikan tinggi.[37,38] Besarnya intervensi Negara dalam pendanaan pendidikan tinggi memperlihatkan penolakan Jerman terhadap neoliberalisme pendidikan tinggi.

Kesimpulan

Korporasi dengan kepentingan pemenuhan keuntungan maksimal, tentu saja bukan sang David, tetapi malah berperan sebagai si Goliath. Pendidikan tinggi yang berpihak pada Goliath tentu saja mempunyai implikasi jangka panjang yang tidak indah. Hal ini dapat dilihat dari gelombang kekecewaan publik di Jerman maupun Chile yang muncul dalam 20 tahun terakhir sebagai akibat dari pengimplementasian kebijakan neoliberal di institusi pendidikan tinggi pada dekade-dekade sebelumnya. Kedua negara tersebut akhirnya dapat menggeser status quo melalui gerakan massa yang diaktivasi oleh sentimen kekecewaan tersebut. Chile mempunyai sistem pendanaan publik baru serta parlemen yang lebih aktif dalam isu universitas yang bertindak sewenang-wenang. Sedangkan, Jerman menghapuskan biaya perkuliahan di semua negara bagian pada tahun 2014.

Dinamika implementasi kebijakan pendidikan tinggi Jerman dan Chile dapat dialami oleh Indonesia pula karena Kemristekdikti baru saja meluncurkan program MBKM yang sarat dengan nilai-nilai neoliberalisme. Pendidikan tinggi di bawah mekanisme tersebut mempunyai potensi untuk tidak lagi berkarakter emansipatoris karena sibuk menggiring mahasiswanya menjadi manusia yang berorientasi pada kepentingan ekonomi. Namun, akankah Indonesia memiliki momentum gerakan resistansi seperti Jerman dan Chile yang dapat menggeser status quo kebijakan pendidikan tinggi ini? Pertanyaan ini patut untuk tetap dibahas oleh publik untuk mengawal berbagai agenda pendidikan tinggi di Indonesia. **[Ericka, Ihsan, Refina]**

---

[1] Laksana, Ben, "Merdeka Belajar Gaya Menteri Nadiem: Apanya yang Merdeka?", Indoprogress, September 15, 2020. https://indoprogress.com/2020/09/merdeka-belajar-gaya-menteri-nadiem-apanya-yang-merdeka/
[2] Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. "Episode 2 Merdeka Belajar Kampus Merdeka". PowerPoint slides, Jakarta, 2020.
[3] Ibid.
[4] Clark, Cal, and Evelyn A. Clark, E. Challenging Neoliberalism: Globalization and the Economic Miracles in Chile and Taiwan. New York: Edward Elgar Publishing, 2016.
[5] Steger, Manfred B., and Ravi K. Roy, R. Neoliberalism: A Very Short Introduction. Oxford: Oxford University Press, 2010.
[6] Dzulfikar, Luthfi T. "'Bunuh diri penelitian Indonesia': forum guru besar tolak Dewan Pengarah BRIN yang rawan dipolitisasi", The Conversation, June 24, 2021. https://theconversation.com/bunuh-diri-penelitian-indonesia-forum-guru-besar-tolak-dewan-pengarah-brin-yang-rawan-dipolitisasi-163044
[7] Gunasekara, Chrys. "The Third Role Of Australian Universities In Human Capital Formation". Journal Of Higher Education Policy And Management 26 no. 3 (2004): 329-343. doi:10.1080/1360080042000290186.
[8] Marshall, Alfred. Principles Of Economics. Amherst, NY: Palgrave Macmillan, 2012.
[9] Leydesdorff, Loet, and Peter Van den Besselaar. "Technological Developments And Factor Substitution In A Complex And Dynamic System". Journal Of Social And Evolutionary Systems 21 no. 2 (1998): 173-192. doi:10.1016/s1061-7361(00)80004-1.
[10] O'Banion, Terry. "Focus on Learning: The Core Mission of Higher Education". In Focus on Learning: A Learning College Reader. Arizona: League for Innovation in the Community College, 2011.
[11] Soska, Tracy M., Marilyn Sullivan-Cosetti, and Sudershan Pasupuleti. "Service Learning: Community Engagement and Partnership for Integrating Teaching, Research, and Service". Journal of Community Practice 18 no. 2-3 (2010): 139-147. doi:10.1080/10705422.2010.490176.
[12] Wibawa, Sutisna. Tridharma Perguruan Tinggi (Pendidikan Dan Pengabdian Kepada Masyarakat). Presentation, Jakarta, 2017.
[13] Alam, Khabirul, and Ujjwal Kumar Halder. "The Emergence and Impact of Privatization of Higher Education: Indian Overview". Journal of Education and Development 6 no. 12 (2016):146-157. https://www.researchgate.net/publication/327237616
[14] Laksana, Ben, "Merdeka Belajar Gaya Menteri."
[15] Brundenius, Claes, and Bo Göransson."The Three Missions of Universities: A Synthesis of UniDev Project Findings". In Universities in Transition: The Changing Role and Challenges for Academic Institutions. Ottawa: Springer, 2011.
[16] UNESCO Institute for Statistics. "Science,technology and innovation: 9.5.1 Research and development expenditure as a proportion of GDP [Data set]", 2021. http://data.uis.unesco.org/#.
[17] Barbara Kehm, "How Germany managed to abolish university tuition fees." The Conversation, October 13, 2014, https://theconversation.com/how-germany-managed-to-abolish-university-tuition-fees-32529#
[18] Cabalin, Cristian. "Neoliberal Education and Student Movements in Chile: inequalities and malaise". Policy Futures in Education 10 no. 2. (2012): 219-228. Doi:10.2304/pfie.2012.10.2.219.
[19] Brunner, José Joaquín. Educación Superior en Chile, Santiago de Chile: Universidad Diego Portales, 2008.
[20] Bellei, Cristián, and Cristian Cabalin. "Chilean Student Movements: Sustained Struggle to Transform a Market-oriented Educational System". Current Issues in Comparative Education 15 no.2 (2013):108-123. https://www.tc.columbia.edu/cice/pdf/28175_15_02_Bellei_Cabalin.pdf
[21] DIKTI. "Buku Panduan MBKM", Dikti.Kemdikbud.Go.Id, 2020, https://dikti.kemdikbud.go.id/wp-content/uploads/2020/05/Buku-Panduan-Merdeka-Belajar-Kampus-Merdeka-2020-1.pdf.
[22] Krčmářová, Jana. "The third mission of higher education institutions: conceptual framework and application in the Czech Republic". European Journal of Higher Education 1 no. 4 (2011):315-331. doi:10.1080/21568235.2012.662835.
[23] Krčmářová, Jana. "The third mission"
[24] Molas-Gallart, Jordi, and Elena Castro-Martínez. "Ambiguity and conflict in the development of 'Third Mission' indicators". Research Evaluation 16 no. 4 (2007): 321–330. doi:10.3152/095820207X263592.
[25] Compagnucci, Lorenzo, and Francesca Spigarelli. "The Third Mission of the university: A systematic literature review on potentials and constraints". Technological Forecasting and Social Change 161. (2020):1-30. doi:10.1016/j.techfore.2020.120284
[26] Energiespeicher Dienste für smarte Quartiere. "Projekt erfolgreich abgeschlossen", 2020. https://www.esquire-projekt.de/news-single/article/projekt-erfolgreich-abgeschlossen.
[27] Berghaeuser, Hendrik, and Michael Hoelscher. "Reinventing the third mission of higher education in Germany: political frameworks and universities reactions". Tertiary Education and Management 26, (2020): 57-76. https://doi.org/10.1007/s11233-019-09030-3.
[28] University of Stuttgart. "An Excellence Strategy For Top-Level Research | University Of Stuttgart". Uni-Stuttgart.De, 2021. https://www.uni-stuttgart.de/en/research/projects/excellence/.
[29] Dumont, Alonso, and Jovanka Zúñiga. "Science-Based Technological Transfer as a Key Tool in Public Health". IntechOpen, 2020. https://www.intechopen.com/online-first/77246.
[30] Hidayati, Emi. "Efektivitas KKN Tematik Posdaya Berbasis Masjid Bagi Pemberdayaan Masyarakat". Ar-Risalah 12 no. 2 (2013): 12-23.
[31] Hajramurni, Andi. "University students to join national community service", The Jakarta Post, October 26, 2013. https://www.thejakartapost.com/news/2013/10/26/university-students-join-national-community-service.html
[32] Kerr, David, John Ainley, Wolfram Schulz, Julian Fraillon, and Bruno Losito. ICCS 2009 International Report. 1st ed. Amsterdam: IEA, 2010. http://www.erc.ie/documents/iccs2009_international_report.pdf.
[33] Duarte Quapper, Klaudio. "¿Juventud o Juventudes?: Acerca De Cómo Mirar Y Remirar A Las Juventudes De Nuestro Continente". Última Década 8 no. 13 (2000): 59-77. doi:10.4067/s0718-22362000000200004.
[34] Bellei, Cristián, and Cristian Cabalin. "Chilean Student Movements,"
[35] Hüther, Otto, and Georg Krücken. "The Rise and Fall of Student Fees in a Federal Higher Education System: the case of Germany". Oxford Studies in Comparative Education 24 no.2 (2014): 85-110.
[36] Tausch, Nicole, and Julia C. Becker. "Emotional reactions to success and failure of collective action as predictors of future action intentions: A longitudinal investigation in the context of student protests in Germany". British Journal of Social Psychology 52 (2013): 525-542.
[37] Kehm, Barbara. "How Germany managed."
[38] Susilo, Joko. "Yang Berat Bukan Rindu."
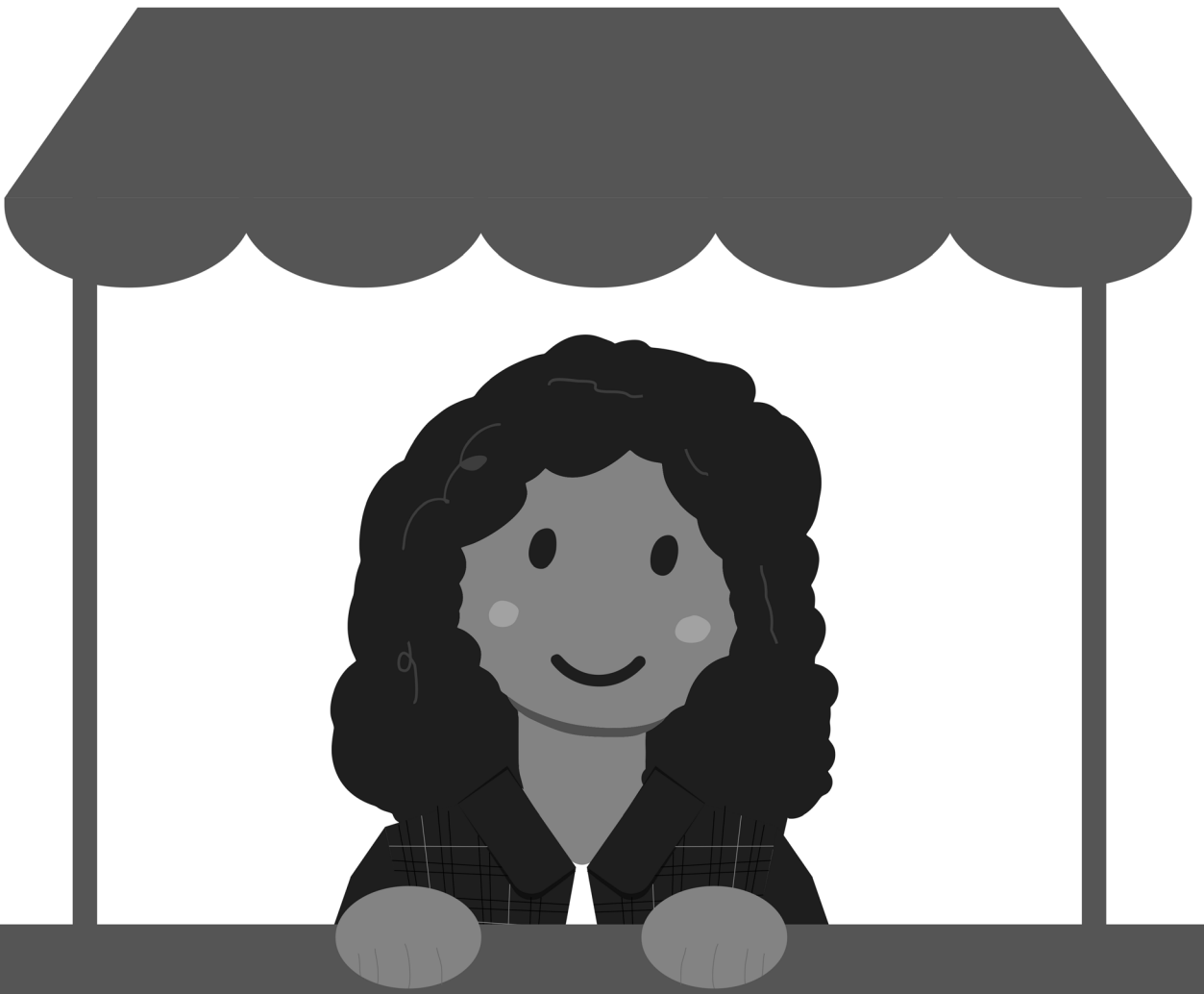
SEGERA HADIR!

Memprivatisasi dan Meliberalisasi Pendidikan

Oleh Ki Darmaningtyas

©Inas/Bal

Ada tiga tema besar yang saling berkaitan ketika berbicara mengenai neoliberalisasi pendidikan, yaitu komersialisasi, privatisasi, dan liberalisasi. Jika kita membuka Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), maka ketiganya itu dijelaskan sebagai berikut:

Komersialisasi diartikan perbuatan menjadikan sesuatu sebagai barang dagang. Privatisasi diartikan sebagai proses, cara, atau perbuatan menjadikan sesuatu dari milik negara ke milik perseorangan (swasta) atau dengan kata lain swastanisasi. Adapun liberalisasi adalah proses (usaha) untuk menerapkan paham liberal dalam kehidupan (tata negara dan ekonomi). Meliberalisasi berarti menerapkan paham liberal dalam kehidupan. Liberalisme sendiri merupakan suatu paham yang memberikan kebebasan kepada individu atau kelompok untuk mendapatkan hak-hak mereka. Sedangkan neoliberalisasi adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan proses kebangkitan abad ke-20 dari ide-ide abad ke-19 yang terkait dengan liberalisme ekonomi dan kapitalisme pasar bebas[1]. Umumnya dikaitkan dengan kebijakan, liberalisasi ekonomi, termasuk privatisasi, deregulasi, globalisasi, perdagangan bebas, penghematan dan pengurangan pengeluaran pemerintah untuk meningkatkan peran sektor swasta dalam ekonomi dan masyarakat[2].

Dua tokoh neoliberalisme yang cukup dikenal adalah Friedrich August von Hayek seorang ekonom Austria yang kemudian hijrah ke AS dan Milton Friedman. Prinsip utama ajaran neoliberalisme adalah kehidupan ekonomi masyarakat paling baik berlangsung tanpa campur tangan apa pun dari pemerintah. Jantung gagasan ekonomi politik neoliberalisme adalah argumen bahwa pertumbuhan ekonomi akan optimal jika, dan hanya jika, lalu lintas barang/jasa/modal tidak dikontrol oleh regulasi apa pun (B. Herry Priyono dalam I.Wibowo dan Francis Wahono: 59)

Sejak berdirinya World Trade Organization (WTO) tahun 1995 (sebelumnya dikenal dengan Putaran Uruguay), pendidikan masuk ke dalam sektor jasa yang diperdagangkan. Indonesia berperan dalam pendirian WTO dengan mengeluarkan UU No. 7 Tahun 1994 Tentang Pengesahan Agreement Establishing The World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia). Dengan demikian, Indonesia mengakui pendidikan itu sebagai sektor jasa yang diperdagangkan, tidak lagi sebagai hak dasar yang dimiliki oleh setiap warga.

Pengurangan Subsidi

Awal permulaan proses komersialisasi, privatisasi, dan liberalisasi di Indonesia terjadi setelah reformasi politik 1998. Ditandai dengan runtuhnya rezim Orde Baru yang korup dan otoriter. Dimulai dengan keluarnya Peraturan Pemerintah (PP) No. 61 Tahun 1999 tentang Penetapan Perguruan Tinggi Negeri sebagai Badan Hukum (PTN BH), yang dalam dasar pertimbangan (konsideran) butir (d) menyatakan "bahwa sebagian Perguruan Tinggi Negeri telah memiliki kemampuan pengelolaan yang mencukupi untuk dapat memperoleh kemandirian, otonomi, dan tanggung jawab yang lebih besar". PP ini kemudian diikuti dengan penerbitan PP No. 152 tentang Penetapan UI sebagai Badan Hukum Milik Negara. PP No. 153, No. 154, No. 155 semua bertahun pada 1999, dan masing-masing tentang UGM, IPB, dan ITB sebagai Badan Hukum Milik Negara (BHMN). Penetapan keempat PTN terkemuka sebagai PT BHMN menjadikan proses komersialisasi, privatisasi, dan liberalisasi pendidikan tinggi, terutama di PTN-PTN menjadi sah secara legal.

Mengapa keempat PTN terkemuka tersebut yang diubah statusnya menjadi PT BHMN? *Pertama*, seperti bunyi konsideran PP No. 61/1999 butir (d) tersebut, bahwa keempat PTN tersebut telah memiliki kemampuan pengelolaan yang mencukupi untuk dapat memperoleh kemandirian, otonomi, dan tanggung jawab yang lebih besar. *Kedua*, dengan nama besarnya, mereka tetap akan diburu oleh orang-orang yang memiliki uang untuk memasukkan anaknya ke sana. Mereka yang selama ini secara ekonomi mampu, tetapi karena intelektual anaknya tidak mencukupi sehingga tidak bisa masuk ke UI, UGM, ITB, atau IPB, sekarang mereka akan bisa masuk ke sana dengan membayar harga yang mahal. Karena dijual dengan harga berapa pun, keempat PTN tersebut akan tetap laku. *Ketiga*, secara objektif, seperti disebutkan sebelumnya, keempat PTN tersebut menyedot subsidi terbesar untuk anggaran pendidikan tinggi di Indonesia. Sehingga jika diswastanisasi, maka akan mengurangi subsidi untuk sektor pendidikan (tinggi) seperti yang diamanatkan oleh IMF. Pada kenyataannya, keempat PTN tersebut diperlakukan sebagai barang dagang yang ternyata sangat laris, menjadi rebutan orang-orang kaya. Banyak orang berduit rela membayar 500 juta rupiah hingga satu miliar rupiah untuk bisa masuk ke FK UI, FK UGM atau ke ITB. Barangkali hanya IPB saja yang tidak sempat mengalami euforia penarikan uang masuk tinggi karena yang masuk ke IPB memang *segmented.*

UGM di bawah kepemimpinan (rektor) Prof. Dr. Sofian Effendi merupakan PT BHMN yang pertama kali memanfaatkan peluang komersialisasi pendidikan itu dengan menerapkan sistem penerimaan mahasiswa baru selain seleksi ujian masuk bersama, yaitu seleksi mandiri yang disebut Ujian Masuk (UM). Calon mahasiswa yang mengikuti UM ini pada saat mengisi formulir pendaftaran, selain menuliskan fakultas yang akan dimasuki, juga diminta menuliskan besaran sumbangan yang akan dibayarkan. Pola yang dilakukan oleh UGM kemudian ditiru oleh PT BHMN lainnya, baik UI melalui sistem SIMAK, IPB ada MUD (Mahasiswa Utusan Daerah) dan MUA (Mahasiswa Utusan Alumni), sedangkan di ITB ada PMBP (Penelusuran Minat, Bakat, dan Potensi).

Status PT BHMN tersebut semula akan diperkuat dengan adanya UU No. 9 Tahun 2009 tentang BHP (Badan Hukum Pendidikan). Namun, karena UU tersebut dilakukan uji materi di MK (Mahkamah Konstitusi) dan dikabulkan, maka sejak tanggal 31 Maret 2010 UU BHP tamat. Sempat muncul kegalauan di pemerintahan, dan menyatakan bahwa PT BHMN ini kembali menjadi PTN publik (reguler). Pemerintah pun kemudian merevisi PP No. 17 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan yang merupakan turunan dari UU BHP menjadi PP No. 66 Tahun 2010. Salah satu substansi revisi yang cukup penting adalah mekanisme penerimaan mahasiswa baru di PTN/PT BHMN yang diamanatkan 60% calon mahasiswa baru diterima melalui jalur seleksi bersama secara nasional. Ini artinya, kuota jumlah mahasiswa yang diterima melalui jalur mandiri oleh masing-masing PTN/PT BHMN semakin kecil. Pemerintah pun mengendalikan besaran pungutan bagi calon mahasiswa baru dan memperkenalkan program beasiswa bidikmisi yang diperuntukkan bagi anak-anak yang pintar, tetapi tidak mampu secara ekonomi agar mereka tetap dapat kuliah. Keduanya itu dapat meredakan keriuhan di masyarakat mengenai keluhan terhadap mahalnya biaya kuliah di PTN/PT BHMN.

Namun, koreksi tersebut belum berjalan tuntas, tetapi pemerintah sudah mengeluarkan UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (UU Dikti), yang secara substantif tidak jauh berbeda dengan isi UU BHP dan mengeluarkan PP No. 58 Tahun 2013 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum. Keberadaan PP No. 58 Tahun 2013 ini seakan merupakan isyarat bahwa model pengembangan PTN dalam bentuk PT BHMN masih tetap dilanjutkan hanya bajunya saja yang ganti, yaitu dari PT BHMN menjadi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN BH). Dengan kata lain, hilangnya UU BHP digantikan oleh UU Dikti, sedangkan hilangnya PT BHMN digantikan oleh PT BH. Semacam lelucon saja, *sih* karena sistem penerimaan mahasiswa baru di PTN melalui jalur mandiri justru semakin kuat karena dipayungi oleh UU Dikti.

Suara Kritis

Sikap kritis dan terbuka terhadap proses komersialisasi, privatisasi, dan liberalisasi pendidikan tinggi tetap muncul sejak awal, termasuk dari kalangan mahasiswa. Akan tetapi, mahasiswa yang menolak secara tegas kenaikan biaya pendidikan sebagai bagian dari privatisasi PTN selalu dilakukan oleh hanya sedikit mahasiswa saja, dan tidak memiliki daya dobrak untuk membatalkannya. Sedangkan penolakan secara terbuka dari kalangan dosen, dilakukan oleh sejumlah dosen di UGM melalui polemik di media lokal (Kedaulatan Rakyat) yang kemudian dibukukan dengan judul Mcdonaldisasi Pendidikan Tinggi dan diterbitkan oleh Center for Critical Social Studies dan Penerbit Kanisius (2002). Polemik tersebut dipicu oleh tulisan Prof. Dr. Heru Nugroho (Dosen Sosiologi UGM) yang kemudian disambut dengan tanggapan dari para dosen lainnya. Meski demikian, kebijakan tidak berhenti dan tetap berjalan sebagaimana yang diatur.

Kekuatan kapital memang jauh lebih kuat mencengkeram daripada suara kritis dari para akademisi maupun kalangan mahasiswa. Meski demikian, suara kritis tersebut tidak boleh berhenti, karena pada suatu ketika akan sampai pada titik kesadaran bahwa komersialisasi, privatisasi, dan liberalisasi pendidikan tinggi (negeri) adalah jalan sesat bagi suatu negara. Hal ini akan memperteguh stratifikasi sosial berdasarkan pendidikan, juga akan menjadikan pendidikan bukan sebagai daya dobrak terhadap segala bentuk kemapanan, tetapi sekadar alat produksi untuk memproduksi kapital yang lebih banyak lagi. Mahasiswa yang kritis tidak akan pernah mendiamkan tatanan yang dapat merugikan bangsa dan negara, tetapi dengan segala gelisahnya mencari jalan keluar atas dominasi kapital dalam seluruh tatanan kehidupan, termasuk telah mengambil bidang pendidikan yang semula menjadi hak setiap warga, sekarang justru menjadi komoditas yang diperdagangkan.

Profil Penulis

Ki Darmaningtyas, aktivis pendidikan Tamansiswa, alumni Fakultas Filsafat UGM, menulis sejumlah buku tentang bunuh diri, pendidikan, dan transportasi, diantaranya adalah *Tirani Kapital dalam Pendidikan* dan *Melawan Kapitalisasi Pendidikan.*

---

[1] Haymes, Stephen. Vidal de Haymes, Maria. Miller, Reuben, et al. (2015). The Routledge Handbook of Poverty in the United States. London: Routledge

[2] Goldstein, Natalie (2011). Globalization and Free Trade. Infobase Publishing. p. 30.
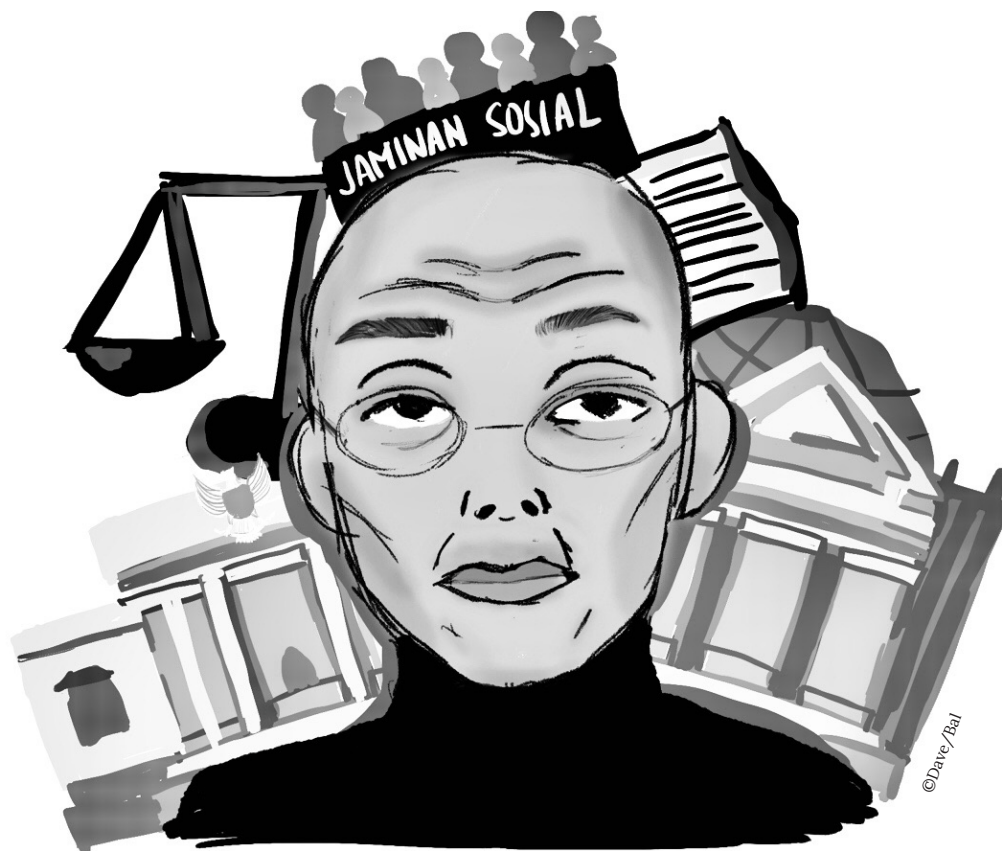
Menilik Administrasi Pemerintah dan Negara Antara Indonesia dengan Jerman

Pemerintah yang sering kali berlaku seperti negara menyebabkan banyak persoalan publik, seperti pergantian pejabat pemerintah. Berdasarkan hal yang sering terjadi, setiap pergantian jabatan politik akan mengubah kebijakan yang telah ada. Akibatnya, hal tersebut akan berdampak langsung pada kebutuhan, pelayanan, dan kenyamanan publik yang tidak terpenuhi. Berbeda dengan Jerman, siapa pun kanselir yang menjabat, negara pasti akan tetap hadir dan kebijakan yang sudah ada akan terus dilaksanakan sampai kebijakan tersebut selesai. Perbedaan peran negara dan pemerintah yang jelas sangat dibutuhkan Indonesia untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat.

Berangkat dari pernyataan tersebut, Balairung berkesempatan untuk mewawancarai Pipit Rochijat Kartawidjaja. Pipit merupakan penulis buku "Pemerintah Bukanlah Negara" dan pensiunan pegawai publik di administrasi negara bagian Brandenburg, Jerman. Ia juga merupakan ketua Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Eropa. Kini, ia pun masih aktif dalam memberikan ceramah ataupun berdiskusi mengenai kebijakan dan administrasi negara baik di Indonesia maupun Jerman. Dia juga masih berkontribusi di Sindikasi Pemilu dan Demokrasi (SPD), sebuah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang mengkaji pemilihan umum (Pemilu) secara kontemporer. Dalam wawancara kali ini, ia menyampaikan pandangannya mengenai komparasi administrasi negara di Indonesia dan Jerman. Berikut wawancara Balairung dengan Pipit Rochijat Kartawidjaja yang kini berdomisili di Jerman.

Apa yang mendasari bahwa administrasi Indonesia dan Jerman dapat dibandingkan?

Pertama, sejak dulu Indonesia sudah sering menjadikan Jerman sebagai studi komparasi, baik saat kehadiran para pejabat Jerman di tanah air, maupun lawatan delegasi Indonesia ke Jerman. Ketika tuan rumah (Jerman) berbicara mengenai *state*, delegasi kita memahaminya sebagai pemerintah. Pihak Jerman sempat bingung ketika delegasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PANRB) menanyakan mengenai rumah sakit pemerintah atau pegawai pemerintah. Hal ini karena di Jerman tidak dikenal rumah sakit atau pegawai pemerintah.

Kedua, pada September 2008, Menpan Taufik Effendi beserta delegasinya berkunjung ke kantor dinas saya, Landesagentur für Struktur und Arbeit (LASA),

di Negara Bagian Brandenburg. LASA alias Agensi Daerah Urusan Struktur dan Kerja adalah badan negara bagian (setara provinsi). Dengan mengikuti referensi, tugasnya adalah mengeksekusi program pemerintah daerah dan Uni Eropa guna menciptakan pasar kerja dengan sistem ekonomi Jerman Barat. Tugas dari LASA ini seperti tugas pembangunan daerah tertinggal di Indonesia. Kunjungan tersebut dalam rangka kerja sama Kemenpan RB dengan Jerman untuk reformasi birokrasi Indonesia. Kerja sama tersebut berkaitan dengan upaya pengadopsian Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG) atau Undang-Undang (UU) Prosedur Administrasi Negara. Mulai tahun 2005, saya dilibatkan dalam pembuatan Rancangan Undang-Undang (RUU) tersebut.

Mengenai Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG) atau UU Prosedur Administrasi Negara, apa sebenarnya kegunaan dari UU tersebut di Jerman?

UU tersebut mengatur kegiatan keluar administrasi negara berjenis *behörde* (otoritas) yang administrasi publiknya berbentuk langsung dan tidak langsung. Selain itu, UU tersebut digunakan untuk menyeragamkan aturan terkait tahapan aktivitas hukum yang harus dieksekusi otoritas terhadap warga masyarakat atau pengusaha. Maka dari itu, UU ini disebut sebagai Undang-Undang Dasar (UUD)-nya Administrasi Negara Jerman. Sementara itu, jika kita membicarakan sistem jaminan sosial, berlakulah UU Sozialverwaltungsverfahrens und Sozialdatenschutz (Social and Administrative Procedures and Protection of Social Data) yang isinya hampir serupa dengan UU Prosedur Administrasi Negara. Perbedaannya hanya terletak pada nomor pasal. Jika kita ambil contoh terkait dengan UU ini, tidak akan terjadi kasus Wali kota Jakarta Timur yang dipensiunkan lewat Whatsapp. Hal yang serupa berlaku untuk kasus rotasi massal 1.100 pejabat eselon II, III, dan IV (termasuk lurah) di Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta. Sangat mustahil hal tersebut terjadi di Jerman.

Menurut pandangan Anda bagaimana peran negara di Indonesia, kaitannya dengan administrasi negara ataupun kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah?

Di Indonesia, Mahfud MD dan Moeldoko mengatakan bahwa negara hadir karena pemerintah hadir. Itu membingungkan sebab di Belanda, Belgia atau Jerman, meskipun tidak ada pemerintah, negara tetap hadir. Bahkan, ketiga negara tersebut pernah tidak memiliki pemerintah dalam waktu tertentu yang kemudian membuat keributan. Meskipun begitu, warga sipil yang berhak memperoleh jaminan sosial, uang pensiunan, dan fasilitas kesehatan tetap menerima hak tersebut. Hal tersebut karena jaminan sosial, uang pensiunan, dan fasilitas kesehatan dibayarkan oleh administrasi negara. Hak-hak warga negara juga tetap hadir tiap bulan di Belgia ketika 1,5 tahun tidak ada pemerintah. Contoh lainnya adalah mengenai aparatur negara. Di Jerman, aparatur negara itu bukan pegawai pemerintah, lain dari Indonesia. Aparatur negara atau pegawai publik di Jerman itu membuat kontrak kerja dengan lembaga negara. Kontrak kerja tersebut memuat hak dan kewajiban serta sumpah setia terhadap UUD dan UU. Oleh karena itu, Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Indonesia sering ketar-ketir ketika pemilu karena khawatir dengan pergantian pejabat politik. Contoh lainnya adalah di Jerman tidak terdapat rumah sakit pemerintah dan sekolah pemerintah. Di sini, hanya ada rumah sakit negara atau publik.

Apa yang menyebabkan pemerintah di Indonesia seringkali berlaku sebagai negara?

Ini merupakan pertanyaan yang sulit dan membingungkan, karena sekelas Mahfud MD pun berbicara seperti itu pada berita yang dilansir Kompas, berjudul "Mahfud: Negara Hadir di Natuna, Lindungi Warga dari Penularan Virus Corona". Jadi, saya tidak tahu pasti mengapa hal tersebut bisa terjadi. Terdapat permasalahan di Indonesia, seperti untuk mendapat izin mendirikan bangunan membutuhkan tanda tangan yang banyak hingga tingkat gubernur. Hal tersebut akan menimbulkan ketergantungan masyarakat terhadap pemerintah. Karena di Jerman perbedaan peran pemerintah dan negara jelas, hal tersebut tidak terjadi. Contohnya lainnya, BPJS di Indonesia, orang-orang yang terkena COVID-19 boleh mengajukan klaim kepada BPJS. Kemudian, BPJS akan mengontrol klaim tersebut dan akan dilanjutkan ke Kementerian Kesehatan (Kemenkes) agar dana yang diajukan cair. Sementara, di sini tidak seperti itu, semuanya merupakan urusan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dalam mencairkan dana bukan urusan kementerian.

Dari penjelasan Anda, apakah dapat dikatakan bahwa pemerintah di Indonesia ini tidak memiliki cetak biru birokrasi administrasi pemerintahan yang baik?

Iya, masih buruk. Karena buruknya itu, saya memprediksi Indonesia akan bernasib sama dengan negara di Amerika Latin. Jika tetap seperti ini, 100 tahun lagi akan menyebabkan negara menjadi tiarap. Indonesia memiliki keinginan untuk membuat negara yang sejahtera berdasarkan UUD 45 dan Pancasila. Jika caranya masih seperti ini, hal tersebut tidak akan mungkin terjadi. Kasus yang terdahulu, menjelang pemilu 2009, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono selalu melunasi bantuan sosial (bansos). Akan tetapi, setelah menjabat, hal tersebut berhenti. Penyediaan bansos untuk fakir miskin bergantung kepada pemerintah. Oleh karena itu, kita bergantung kepada seorang presiden yang "Superman". Dengan demikian, bukannya membangun sistem yang baik, kita malah mengandalkan seseorang.

Menurut Anda, apa solusi terbaik untuk menangani permasalahan ini?

Menurut pandangan pribadi, karena sejak 2002 telah mengikuti hal seperti ini, saya sering ceramah mengenai perbaikan dan segala macam halnya. Padahal sudah banyak delegasi yang dikirim bolak-balik ke Jerman untuk belajar dari sini, tetapi terasa tidak ada hasilnya. Sulit rasanya untuk menyelesaikan permasalahan yang sudah sangat kompleks. Pada akhirnya, jalan terbaiknya adalah revolusi. Meskipun demikian, saya tetap membantu teman-teman, seperti di SPD (Sindikasi Pemilu dan Demokrasi), yang masih memiliki semangat yang tinggi. Berharap perubahan dari pemerintah sulit untuk terjadi sehingga terkadang membuat saya bingung sendiri.
[Abiyyu, Fahmi, Lokahita]

© Nanda/BAL

BRIN Alami Pancasilaisasi, Penelitian Ilmiah Dipolitisasi, Kebebasan Akademik Tercederai

Pemisahan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) dari Kementerian Riset dan Teknologi pasca perubahan dalam UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menuai polemik. Berbagai akademisi menilai langkah ini sebagai babak baru dari politisasi penelitian. Terlebih, Dewan Pengawas BRIN dipimpin oleh Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, berambisi menginternalisasikan ideologi Pancasila dalam penelitian BRIN. Hal ini dianggap berpotensi melahirkan celah intervensi yang berpihak pada kepentingan politik dan ekonomi dibandingkan ilmiah.

Abdil Mughis Mudhoffir, Asisten Profesor di Departemen Sosiologi Universitas Negeri Jakarta dan peneliti ekonomi politik Indonesia, turut mengkritisi isu tersebut. Melalui wawancara ini, Balairung berkesempatan membahas lebih lanjut tentang implikasi dari intervensi politik melalui indoktrinasi Pancasila dalam penelitian ilmiah terhadap kebebasan akademik.

Bagaimana otonomisasi BRIN berpengaruh terhadap keleluasan intervensi politik?

BRIN merupakan bagian dari institusi negara yang dibentuk oleh negara dan memiliki dewan pengarah. Secara kelembagaan, BRIN bukan institusi yang sepenuhnya otonom dari kekuasaan negara maupun agenda-agenda penelitian yang ditentukan negara. Ruang intervensi politik penguasa sangat besar sehingga kontradiktif dengan tujuan pembentukannya. Tujuan tersebut seperti menjembatani penelitian dan industri, membangun dan memperkuat ekosistem penelitian yang berkualitas, mendorong kebijakan berbasis pada pengetahuan dan penelitian, dan mendorong industri berbasis penelitian dan teknologi. Dengan kata lain, BRIN rawan mengalami politisasi.

BRIN dikatakan sebagai upaya membumikan Pancasila, bagaimana implikasi dari indoktrinasi Pancasila dalam penelitian bagi kebebasan akademik?

Saya tidak mengerti tujuan membawa Pancasila dalam penelitian maupun pembentukan lembaga penelitian. Pancasila itu ideologi negara yang digunakan untuk mendisiplinkan warga negara agar tunduk terhadap kemauan penguasa. Pengarusutamaan Pancasila oleh pemerintah dimaksudkan untuk memperlemah institusi demokrasi.

Ketiadaan otonomi dalam penelitian akademik membuat Pancasila sebagai instrumen indoktrinasi semakin melemahkan posisi lembaga penelitian dan peneliti dalam memproduksi pengetahuan. Pelanggaran kebebasan akademik tidak hanya berbentuk represi atau intimidasi, namun juga intervensi politik. Selain itu, kebebasan akademik bisa dipahami sebagai dorongan untuk memproduksi pengetahuan berdasarkan kemerdekaan sebagai akademisi. Absennya otonomi menandai tercederainya kebebasan akademik.

Pada masa Orde Baru, Pancasila digunakan sebagai alat untuk melanggengkan otoritas penguasa. Apakah indoktrinasi Pancasila melalui BRIN memiliki kecenderungan yang sama?

Ketika digunakan dalam penelitian, saya kira sama. Pancasila digunakan sebagai alat untuk melegitimasi kekuasaan. Sebab, penguasa memiliki otoritas dalam

menginterpretasikan Pancasila. Saya pikir, proporsi Pancasila cukup dijadikan acuan dalam mendefinisikan bangsa Indonesia, alih-alih digunakan sebagai alat politisasi melalui BRIN.

BRIN dan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) itu lembaga penelitian yang dibentuk dan didanai oleh negara. Produk penelitian LIPI secara akademik masih lemah untuk bisa berkontribusi luas. Jika dikendalikan lewat ideologi Pancasila sebagai acuan penelitian, semakin sulit untuk membaik. Alih-alih memproduksi pengetahuan yang melayani kepentingan publik, justru menjadi alat bagi penguasa dan industri.

Dalam jurnal Inaya dan Fajri[1], disebutkan bahwa penelitian digunakan semata-mata untuk mendukung strategi pembangunan pemerintah, bagaimana hal tersebut dapat terjadi?

Penelitian di Indonesia pada umumnya dibiayai oleh pemerintah sehingga sering kali membahas topik yang mendukung agenda pembangunan pemerintah yang berkuasa. Selain itu, topik penelitian ilmiah juga berorientasi pada kebutuhan industri. Intervensi pemerintah menjadi dominan sebab agenda penelitian bergantung kepada kerangka berpikir pemberi dana. Alhasil, penelitian yang didanai oleh pemerintah cenderung bersifat teknokratis. Penelitian tersebut melayani pemerintah, mengadvokasikan agenda pembangunan, serta menjawab permasalahan industri. Dalam hal ini, BRIN merupakan respons yang mendorong hasil penelitian teknokratik yang tepat guna bagi kepentingan pemerintah maupun industri. BRIN dibentuk untuk memusatkan dan mengkoordinasikan berbagai penelitian dari lembaga penelitian negara untuk menjawab kebutuhan pemerintah dan industri.

Bagaimana implikasi dari pengendalian pemerintah terhadap kebebasan ilmiah?

Dana penelitian adalah dana rakyat, tidak bisa didefinisikan dari kepentingan pemerintah. Kepentingan pemerintah semestinya tunduk pada kepentingan rakyat. Namun, penelitian seringkali didasarkan pada penguasa sehingga tidak lagi menjawab kebutuhan rakyat. Penelitian cenderung diarahkan menjadi penelitian aplikatif yang memiliki kontribusi praktis. Alhasil, penelitian teoritis, penelitian reflektif, dan penelitian dasar yang mengkritisi pemerintah menjadi marginal.

Penelitian ilmiah sering kali digunakan untuk melegitimasi dan memberi justifikasi terhadap agenda pemilik modal. Implikasinya, topik dalam produk penelitian ilmiah disetir oleh para pendonor dana tersebut sesuai dengan kepentingannya. Kendali inilah yang membatasi ruang bagi penelitian ilmiah untuk mengembangkan pengetahuan yang kritis dan membangun kontribusi secara luas. Oleh karena itu, produksi pengetahuan di Indonesia juga sangat terbatas.

Bagaimana komunitas ilmiah berupaya meminimalisasi intervensi politik di tengah politisasi penelitian?

Minimalisasi intervensi politik lembaga penelitian dari stempel birokrasi yang melayani kepentingan penguasa dan industri harus diperjuangkan secara politis. Komunitas ilmiah perlu menggandeng aktor dan kekuatan sosial politik lainnya dalam menegakkan otonomi lembaga penelitian. Kekuatan politik ini juga akan menutup peluang pemanfaatan dana penelitian sebagai instrumen praktik renten.

Di sisi lain, peneliti bisa memanfaatkan agenda yang mendukung otonomi. Peneliti bisa bernegosiasi dengan pemberi dana dan memanfaatkan peluang untuk menentukan agenda penelitian yang lebih signifikan. Namun realitasnya, komunitas ilmiah berada dalam situasi yang serba terbatas, penuh intervensi, dan tidak ada otonomi. Terlebih, komunitas ilmiah sering kali berperan sebagai teknokrat. Saya rasa, komunitas ilmiah perlu mendorong perubahan. Sayangnya, hanya segelintir peneliti yang memiliki kesadaran kritis untuk mendapatkan independensi mereka. Sebagian besar komunitas ilmiah didominasi oleh mereka yang subsisten secara ekonomi. Oleh karena itu, perlu perubahan mendasar dari tata ekonomi dan politik yang mendorong agenda penelitian difasilitasi oleh negara.

Menurut Alan F Koropitan, sains di negara maju tidak terlepas dari keputusan politik[2]. BRIN dikatakan sebagai lembaga yang menjembatani penelitian dan industri serta mengembangkan inovasi, bagaimana pendapat Anda terkait hal ini?

Saya sendiri pesimis dengan itu. Terlebih, BRIN ditempeli dengan Pancasila dan ada kepentingan partai politik yang dominan. BRIN barangkali menjembatani penelitian dengan dunia industri. Sebab, hasil penelitiannya berorientasi terhadap industri. Namun, ekonomi Indonesia masih ditopang oleh ekonomi renten. Jika bertolak kepada renten, saya rasa akan sulit mendorong peran BRIN dalam memajukan dunia industri melalui penelitian. Desain kelembagaan BRIN membuka peluang sebagai kepanjangan tangan penguasa, bukan untuk menjembatani penelitian dan inovasi. Kepentingan penguasa inilah yang mempertahankan ekonomi renten dibandingkan memfasilitasi berkembangnya industri nasional. Pembentukan BRIN memang tidak terlepas dari keputusan politik, namun keputusan tersebut kontradiktif dengan tujuan untuk menjembatani penelitian dan industri.

Apakah anda setuju dengan klaim bahwa BRIN digunakan sebagai bentuk investasi pemerintah terhadap perkembangan ekosistem IPTEK untuk mendongkrak nilai ekonomi negara?

Agenda pembangunan ekosistem ilmu pengetahuan dan teknologi adalah produk dari advokasi yang sifatnya teknokratik. BRIN merupakan manifestasi atau representasi dari ide teknokratik yang didukung lembaga donor untuk membangun ekosistem penelitian inovasi. Namun, persoalan fundamental terkait kekuasaan politik sering kali diabaikan. Narasi teknokrasi tentang pembentukan ekosistem yang menjembatani penelitian dan inovasi berpotensi dibajak oleh kepentingan politik.

Selama otonomi nihil, tidak akan ada lembaga penelitian yang mendorong kebijakan berbasis penelitian maupun penguatan dunia industri. Dominasi ekonomi di Indonesia yang berbasis renten tidak mementingkan penelitian dan teknologi. Ketika kepentingan renten memberikan keuntungan, pembangunan ekonomi berbasis industri yang ditopang penelitian dan teknologi hanya sekadar pandangan normatif saja.

Upaya menciptakan ekosistem penelitian dan teknologi perlu disertai perubahan organisasi kekuasaan ekonomi politik di Indonesia. Pemerintah menggunakan narasi BRIN sebagai investasi pembangunan ekosistem IPTEK yang mendongkrak nilai ekonomi negara untuk tujuan lain. Hal ini bukan hanya menunjukkan pembajakan lembaga produksi ide teknokratik, tetapi juga kegagalan ide tersebut.
[Zhafira, Kartika, Avicenna]

---

[1] Inaya Rakhmani dan Fajri Siregar, "Mereformasi Penelitian di Indonesia: Kebijakan dan Praktik", GDN Working Paper Series, No. 92 (2016), https://www.ksi-indonesia.org/file_upload/GDN-Mereformasi-Penelitian-di-Indonesia-08Jun2017123027.pdf.

[2] Alan Frendy Koropitan, Ph.D. adalah Tenaga Ahli Utama Kedeputian I Kantor Staf Presiden (KSP) Indonesia. Dalam artikel CNN Indonesia yang berjudul "KSP: Di Negara Maju Mana Sains Tidak Didorong Politik?" pada (29/4/2021), ia menyatakan argumennya terkait dugaan kepentingan politik di balik pembentukan BRIN.

Reduksi Peran Intelektual sebagai Dampak Neoliberalisme pada Perguruan Tinggi

©Zufar/Bal

Disadari atau tidak, saat ini faktor ekonomi memberi dampak yang signifikan terhadap pendidikan, hal ini tentu kemudian membawa pengaruh terutama pada tereduksinya intelektualitas manusia karena terbunuhnya kemerdekaan berpikir kritis.

Pendidikan dan Struktur Ekonomi

Pengaruh logika pasar terhadap pendidikan dapat dipahami sebagaimana pandangan materialisme Marx.[1] Pandangannya berbasis pada struktur ekonomi yang menentukan struktur di atasnya. Dalam pendidikan, contoh konkretnya dapat dilihat sejak awal mula adanya sistem pendidikan publik sebagai bagian dari Revolusi Industri. Melalui serangkaian inovasi teknologi yang mengubah metode tradisional dalam pembuatan barang, Revolusi Industri mendorong berdirinya beragam kegiatan industrialisasi yang membutuhkan banyak tenaga manusia.

Kebutuhan akan sumber daya manusia yang berguna bagi kegiatan industri membuat sistem pendidikan perlu menyesuaikan dengan kebutuhan tersebut. Dalam buku *Creative Schools: The Grassroots Revolution That's Transforming Education*, Ken Robinson menguraikan bagaimana kemudian prinsip-prinsip dalam industri dan manufaktur ada dalam pendidikan. Sistem pendidikan yang ada dirancang untuk membentuk siswa dengan persyaratan tertentu sesuai dengan kebutuhan industri. Karena itu, tidak semua orang berhasil melewati sistem, dan ada pula yang ditolak olehnya.[2] Hal ini berarti sistem pendidikan yang ada mengandaikan sebuah standardisasi yang didasarkan pada kepatuhan dalam kurikulum, pengajaran, dan penilaian. Dengan demikian, bakat dan minat siswa lainnya hampir secara sistematis terpinggirkan dan tidak dihargai. Hal ini menunjukkan bagaimana struktur ekonomi berpengaruh terhadap sistem pendidikan. Berdasarkan teori tersebut, kita dapat menganalisis bagaimana kemudian mekanisme pendidikan yang layaknya pabrik bisa terjadi di Indonesia, bahkan masih dirasakan hingga sekarang.

Di Indonesia, hadirnya logika industri dalam pendidikan dapat kita lihat sejak awal kemerdekaan Indonesia. Meminjam perspektif sosiologis, perbaikan ekonomi merupakan prioritas utama dalam pembangunan nasional yang dicanangkan kala itu. Selaras dengan itu, diperlukan peningkatan produktivitas penduduk yang disertai dengan efisiensi pelaksanaan pembangunan, yaitu dengan menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas, salah satunya melalui proses pendidikan.[3] Melalui pernyataan Lubis Ibrahim, yang menyatakan bahwa penduduk adalah aspek potensial yang mampu didayagunakan dalam menopang pembangunan nasional, maka produktivitas mereka merupakan titik sentral dalam perbaikan ekonomi dan tenaga penggerak pembangunan kapitalis.[4] Meskipun terdengar masuk akal, adalah suatu hal yang miris ketika pada akhirnya pendidikan hanya sekadar dijalankan sebagai mekanisme untuk menstandardisasi masyarakat menjadi sumber tenaga kerja.

Mekanisme standardisasi masyarakat menjadi sumber tenaga kerja diwujudkan dalam kebijakan di bidang pendidikan, seperti UU Nomor 4/1950 tentang Dasar-Dasar Pendidikan dan Pengajaran. Di Sekolah yang memuat dikotomi pendidikan berupa menengah umum dan menengah kejuruan untuk menciptakan tenaga berketrampilan yang dibutuhkan dalam proses pembangunan.[5] Bahkan, mekanisme standardisasi tersebut semakin gencar dilakukan ketika Wardiman Djojonegoro menjabat sebagai menteri pendidikan di era Orde Baru.[6] Secara eksplisit, ia mengintroduksikan kebijakan *link and match* dalam penataan kurikulum karena lembaga pendidikan sejak kemerdekaan belum mampu memenuhi tuntutan persoalan tenaga kerja. Berangkat dari kondisi tersebut, ia kembali mengembangkan sekolah kejuruan dan menjalankan serangkaian kerja sama dengan korporasi, misalnya dalam hal penyediaan tempat magang bagi siswa. Pada tingkat perguruan tinggi, pemerintah menjalin kerja sama dengan industri untuk mendirikan institusi dan menciptakan pelatihan khusus sesuai jenis industri yang dikembangkan.[7] Meskipun kebijakan yang menyelaraskan dunia pendidikan dengan industri telah mengalami "penyempurnaan" seiring berjalannya proses politik, tingginya angka pengangguran dan rendahnya kualitas pekerja masih menjadi masalah serius di Indonesia, khususnya bagi tenaga kerja yang berpendidikan tinggi.[8]

Kondisi pendidikan yang diperparah oleh masifnya proyek pembangunan nasional di era Orde Baru semakin menjadi-jadi ketika proses neoliberalisasi mulai masuk dalam kebijakan saat itu, bahkan di era

sesudahnya. Industrialisasi yang menjadi orientasi utama atas pengentasan krisis ekonomi dan politik membuat logika tersebut turut dimasukkan ke dalam dunia akademis dengan meliberalisasi sektor pendidikan.[9] Kondisi ini terlihat ketika pemerintah mengurangi anggaran di bidang pendidikan karena pembiayaan terhadap bidang tersebut bukan lagi menjadi kewajiban negara ketika otonomi kampus dijalankan sejak tahun 1999. Sebagai gantinya, perguruan tinggi harus menggali sumber keuangan sendiri guna meningkatkan kualitas pendidikan dan kesejahteraan orang-orang yang bekerja di kampus serta memastikan operasionalisasi pendidikan akademik tetap berjalan. Keharusan ini membuat perguruan tinggi bertendensi untuk melakukan komodifikasi melalui langkah industrialisasi yang menerapkan mekanisme berproduksi guna memperoleh kelimpahan produk yang memudahkan masyarakat untuk mengonsumsi dan mendatangkan perbaikan ekonomi bagi komunitas industrial.[10] Pada titik ini, kondisi perguruan tinggi dinilai telah membuka prospek peningkatan komersialisasi pendidikan sehingga hak atas pendidikan tidak terpenuhi.

Dehumanisasi sebagai Dampak Neoliberalisme terhadap Sistem Pendidikan di Indonesia

Dari penjelasan sebelumnya, yang kemudian harus menjadi perhatian penting dari pengaruh struktur ekonomi terhadap pendidikan di Indonesia adalah sebagaimana proses produksi yang selalu menghasilkan limbah ataupun produk sampingan. Pendidikan, karena mekanismenya yang serupa, juga menghasilkan "limbah dan produk sampingan".

Pertama, pengaruh neoliberalisme yang mendorong perguruan tinggi menjadi otonom termasuk dari segi pembiayaan, mendorong pergeseran nilai pendidikan yang semula bersifat egaliter dan tidak mengenal status sosial tertentu, secara tidak langsung telah berubah wajah menjadi elitis.[11] *Kedua*, manufakturisasi pendidikan institusional memiliki kecenderungan untuk menilai siswa dengan satu standar kemampuan, dan memperlakukan mereka yang tidak memenuhinya sebagai "kurang mampu" dan merupakan bentuk penyimpangan dari norma.[12] Hal ini membuat keunikan setiap individu seperti kepribadian, minat, dan bakat–yang tidak memiliki kesesuaian dengan standar tertentu dikesampingkan.

Ini sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Max Weber, industrialisasi pendidikan menjadikan pendidikan sebagai komoditas industri. Industrialisasi telah menghasilkan *disenchantment of the world*, suatu proses memudarnya pesona dunia karena segala hal yang ada di bumi ini dapat dikalkulasi. Akibatnya, terjadi dehumanisasi karena segala hal yang sebelumnya bersifat subjektif dapat diubah menjadi objektif, yang kualitatif menjadi kuantitatif.[13] Pendidikan bertransformasi menjadi pabrik tenaga kerja seiring realitas yang telah terbentuk oleh neoliberalisme dan mereduksi peran-peran intelektual.

Reduksi terhadap peran intelektual merupakan hal yang mendesak. Intelektual memiliki posisi yang penting dalam arah kemajuan suatu bangsa. Hal ini terlihat sebelum adanya revolusi industri, yaitu ketika para filsuf sebagai golongan intelektual saat itu memiliki peran besar dalam merubah tatanan kehidupan tradisional yang semula membelenggu menjadi berfokus pada ilmu pengetahuan. Era ini juga menjadi kesempatan emas bagi berbagai disiplin ilmu untuk berkembang secara ilmiah dan objektif, serta menandai kebebasan individu dalam berpikir. Pengaruh dari para filsuf ini tak sebatas pada pemikiran pembaharuan saja, melainkan juga mengantarkan pemikiran mereka hingga ke ranah politik, ekonomi, dan kehidupan bermasyarakat.[14]

Penutup

Neoliberalisasi pendidikan yang berorientasi pada peningkatan ekonomi telah menjadikan institusi sebagai pabrik. Pendidikan menjadi mengacu pada sistem ekonomi kemudian "menyingkirkan" individu yang dianggap tak memenuhi standar industrialisasi. Otonomi dalam perguruan tinggi juga turut membentuk pola pikir dan perilaku manufaktur yang condong menyorot kuantitas setelah menciptakan adanya persaingan dalam pemenuhan standar pendidikan. Penyediaan pengetahuan yang membentuk kebutuhan pasar ini kemudian mereduksi lini intelektual dalam pendidikan. Pengupayaan lebih terhadap fasilitas untuk pendidikan yang sesuai dengan permintaan pabrik menjadi tindakan praktis direduksinya ilmu pengetahuan demi pemenuhan industrial. [**Maya, Alfi, Hasna]**

[1]Dalam pandangan materialis Marx kesadaran tidak menentukan realitas, melainkan sebaliknya, realitas material menentukan kesadaran. Realitas material itu adalah cara-cara produksi barang-barang material dalam kegiatan kerja/struktur ekonomi. Struktur ekonomi itu merupakan "basis" masyarakat (tercakup didalamnya kekuatan kekuatan produktif seperti alat-alat kerja, pekerja, pengalaman, atau teknologi dan hubungan-hubungan produksi misalnya antara pekerja dan pemilik modal). Basis itu kemudian menentukan struktur-struktur hukum politis, intelektual, dan bentuk-bentuk kesadaran sosial lain, seperti: filsafat, historiografi, seni, agama, dan seterusnya sebagai "superstruktur" masyarakat.
[2]Robinson, Ken, and Lou Aronica. 2016. Creative Schools : The Grassroots Revolution That's Transforming Education. 3rd ed. New York, New York: Penguin Books.
[3]Nasrullah Jamaludin, Adon. 2016. Sosiologi Pembangunan. Bandung: CV Pustaka Setia. 6-11.
[4]Ibid. hal 172
[5]Ageng Sulistyo, Regit. 2015. Kemerosotan Intelektual Mahasiswa, Praktek Pendisiplinan Manusia Dan Produksi Pengetahuan Secara Otonom. https://indoprogress.com/2015/01/kemerosotan-intelektual-mahasiswa-praktek-pendisiplinan-manusia-dan-produksi-pengetahuan-secara-otonom/.
[6]Prihatin Disas, Eka. 2018. Link and Match Sebagai Kebijakan Pendidikan Kejuruan. Jurnal Penelitian Pendidikan, 18 (2), 231–242.
[7]Ibid. hal 3
[8]Ibid. hal 5
[9]Rosser, Andrew. 2016. Neo-Liberalism and the Politics of Higher Education Policy in Indonesia. Comparative Education, 52 (2), 109–135.
[10]Ciba, Baharuddin and Abdul Rahmat. 2019. Reformasi Perguruan Tinggi Indonesia: Sebuah Otonomi Semu Yang Dijanjikan. 20-29.
[11]Zamroni, M. Imam. 2009. Industrialisasi Pendidikan Tinggi. Unisia Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial, 31 (67): 10. doi:10.20885/unisia.v31i67.171.
[12]Robinson, Ken, and Lou Aronica. 2016. Creative Schools : The Grassroots Revolution That's Transforming Education. 3rd ed. New York, New York: Penguin Books.
[13]Zamroni, M. Imam. 2009. Industrialisasi Pendidikan Tinggi. Unisia Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial, 31 (67): 10. doi:10.20885/unisia.v31i67.171.
[14]Nawawi, N. 2017. Tokoh Filsuf dan Era Keemasan Filsafat. Makassar: Pusaka Almaida.
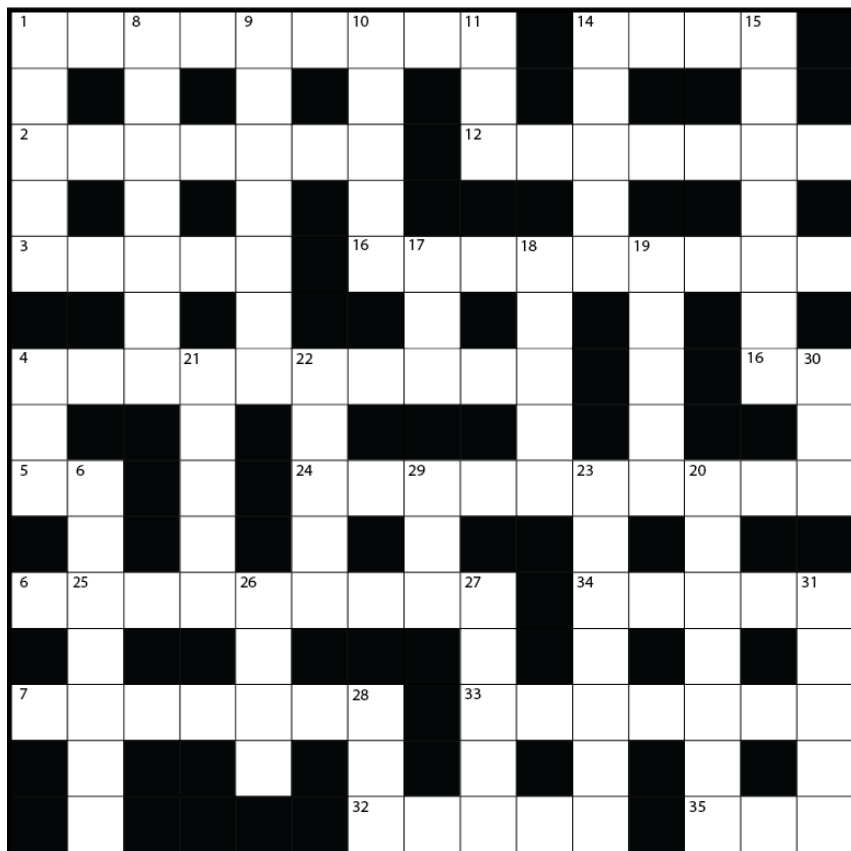
Kirimkan Jawabanmu ke balairungpress@gmail.com paling lambat 20 September 2021. Lima pemenang beruntung akan mendapat bingkisan menarik dari Balairung

Mendatar

1. Pembatasan diri dari lingkungan luar untuk mencegah penularan penyakit
2. Tinggi hati
3. Diinjak untuk membersihkan telapak kaki sebelum memasuki ruangan
4. Tidak cocok
5. Account Payable/hutang dagang
7. Tempat pemberhentian kereta
12. Sesuatu yang penting dan mendesak
13. Pesinden
14. Young (Indonesia)
16. dokumen yang menunjukkan identitas keluarga
24. Sinonim perumpamaan
25. Menarik perhatian orang lain
32. Bentuk tidak baku dari "haudah"
33. Pesta pernikahan
34. Sikap superior yang dapat menyebabkan diskriminasi terhadap kelompok ras yang berbeda
35. Indeks Harga Konsumen

Menurun

1. Pertunjukan dramatari khas Bali mengenai Ramayana
6. Mudah digunakan
8. Barang bekas
9. Salah satu zat beracun yang terdapat dalam tembakau/rokok
10. Bagian atas awan kumulonimbus yang melebar menyerupai landasan dengan serabut halus
11. Sisa hasil pembakaran bahan organik
14. Lelehan batuan panas yang tersimpan di bawah permukaan Bumi
15. Ahli dalam merancang dan menggambar bangunan, dsb.
17. Washington State University
18. Rintik-rintik gerimis
19. Pria bergender wanita
20. Tahap permulaan atau pembentukan
21. Penghargaan untuk karya di industri film
22. 500 (Bahasa Mandarin)
23. Kata dasar dari "menyerosoh"
26. Asam (Inggris)
27. Satuan Internasional untuk kapasitansi listrik
28. Nabi yang membangun bahtera berupa kapal besar
29. Rumah Keluarga Indonesia
30. Pengabdian masyarakat oleh mahasiswa
31. Tongkat (Inggris)

Museum Dewantara Kirti Griya: Saksi Jejak Perjuangan Bapak Pendidikan Nasional

Bangunan sederhana kuning gading itu bukan hanya sekadar museum peninggalan, namun juga rumah yang sempat menjadi saksi perjuangan Bapak Pendidikan Indonesia.

Patung Ki Hadjar Dewantara di depan sebuah pendopo besar bertuliskan Tamansiswa seakan menyambut pengunjung yang akan memasuki Kompleks Pendopo Agung Tamansiswa, Jalan Tamansiswa No. 25, Wirogunan, Mergangsan, Yogyakarta. Patung tersebut sering kali membuat orang berpikir bahwa di situlah keberadaan Tamansiswa, sekolah yang didirikan Ki Hadjar Dewantara. Jarang masyarakat ketahui bahwa tepat di utara patung tersebut tersimpan saksi perjuangan Bapak Pendidikan Nasional sebagai seorang aktivis nasionalis hingga pendidik. Rumah sederhana berwarna kuning gading yang dulu merupakan kediaman pribadinya kini difungsikan sebagai Museum Dewantara Kirti Griya.

Memasuki museum, pengunjung langsung disambut dengan kamar tidur pribadi Ki Hadjar Dewantara. Terlihat mesin ketik di samping pintu yang merupakan saksi perlawanannya sebagai seorang penulis antikolonialisme. Salah satu tulisannya berjudul Seandainya Aku Seorang Belanda sempat mengguncang pemerintahan Belanda hingga mengakibatkannya diasingkan ke Belanda.

Keluar dari kamar tidur, terdapat ruang utama yang kini menyimpan bukti adanya kegiatan belajar mengajar di Tamansiswa. Terlihat pula kotak kaca yang di dalamnya tergeletak sebuah kacamata dan majalah bersampulkan Nyi Hadjar Dewantara. Selain dikenal sebagai istri Ki Hadjar Dewantara, dia juga dikenal sebagai pendiri Sekolah Taman Kanak-Kanak dan Sekolah Dasar di Tamansiswa.

Melalui Tamansiswa lah, Ki Hadjar Dewantara mengenal Soekarno yang sempat menjadi guru di sekolah

Tamansiswa Bandung. Kedekatan mereka terlihat dalam foto hitam putih di atas kasur kamar tidurnya. Terlihat Ki Hadjar Dewantara terbaring di atas tempat tidur dengan Soekarno duduk di sampingnya.

Pemikiran dan ajaran Ki Hadjar Dewantara yang tersimpan rapi di museum berusia 51 tahun ini sampai sekarang masih relevan untuk diterapkan. Menurut Candra, salah satu edukator museum, konsep Merdeka Belajar yang kini diterapkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebenarnya sudah lama terpikirkan oleh Ki Hadjar Dewantara melalui Sistem Among. Dengan Sistem Among, Ki Hadjar Dewantara mempunyai gagasan untuk meninggalkan sistem pendidikan lama yang berfokus pada keaktifan guru dan menggantinya dengan pendidikan yang berfokus pada keaktifan siswa. “Dengan adanya museum ini, diharapkan masyarakat dapat mengetahui ajaran dan pandangan tokoh Ki Hadjar Dewantara sehingga dapat menginspirasi dan diaplikasikan dalam kehidupan,” harap Candra. **[Winda]**

SENTRUM

CREATIVE EXPERIENCE SPACE

Working Space | Branded Store | Food Shops | Sentrum Bar & Kitchen

Our Partner, Office, Branded Store & Food Shops :

Instagram:
@sentrumspace

Telepon:
0895 0658 5758

Alamat :
Jl. S. Hartono (Jl. Kaliurang KM.10) Gondangan, Sardonoharjo, Ngaglik, Sleman, Yogyakarta 55581

Pernikahan di Musim Hujan

Oleh Bernard Batubara

© Zufar/BAL

Mereka menikah, pada akhirnya. Mereka sudah menunggu berbulan-bulan. Wabah tidak rampung juga, pikir sang suami. Tetapi mereka sudah merencanakan ini sejak lama, semenjak mereka berpacaran di SMA. Mereka tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Harus tahun ini, pikir sang istri. Tidak bisa besok-besok, harus tahun ini, katanya mengulang keinginannya ke suaminya. Kalau besok-besok, katanya lagi, aku akan nikah sama orang lain, kau mau itu? Suaminya, waktu itu belum jadi suaminya, menggeleng. Ya tidak maulah, katanya ke sang istri, yang waktu itu belum jadi istrinya. Di saat mereka membahas ini, mereka sedang makan di sebuah warung yang menyajikan masakan-masakan dari daerah Timur Indonesia, seperti papeda dan ikan kuah kuning. Hujan menjadi latar percakapan mereka. Hujan di penghujung tahun wabah. Hujan yang penuh kedukaan. Hujan yang gerimis, mengenai daun-daun di pohon-pohon mangga di halaman rumah pemilik warung yang menyajikan masakan-masakan dari daerah Timur Indonesia beserta tangkai dan tanah tempat pohon-pohon mangga itu tumbuh. Hujan yang mengganggu percakapan mereka sebab atap warung tersebut terbuat dari seng. Bunyi hujan di atap seng sangat keras. Mereka harus bicara dengan nada yang agak tinggi, bersaing dengan hujan dan kecemasan mereka tentang rencana menikah di tahun yang, tanpa diduga-duga, suram, gelap, dan mencekam. Tahun wabah. Hujan di tahun wabah.

Mereka duduk berjauhan. Terdapat tanda X di antara mereka, terbuat dari lakban merah. Mereka tidak mengenakan masker, hanya ketika makan. Masker mereka masing-masing tergeletak di dekat piring mereka. Masker medis, sesuai anjuran pemerintah. Mereka tadinya menggunakan masker berbahan kain. Setelah pemerintah memberi pengumuman jenis-jenis masker yang benar untuk digunakan di masa wabah, mereka buru-buru ke minimarket untuk membeli masker medis.

"Jadi gimana ini?" Kata istrinya, menagih diam sang suami, sedari tadi cuma mengunyah papeda, tampak sangat berpikir mengenai rencana pernikahan mereka yang sudah hampir tiba tanggalnya.

"Ya, tidak gimana-gimanalah". Suaminya selalu mengakhiri ucapannya dengan akhiran "lah".

"Apa, sih, maksud kamu, tidak gimana-gimana lah? Tanggal pernikahan kita sudah hampir tiba. Kita belum tahu gimana dengan sanak famili. Apa mereka tetap kita undang? Atau gimana? Jangan cuma jawab tidak gimana-gimanalah. Sial betul kamu ini ya. Kok sepertinya semua aku yang memikirkan. Kau cuma tidak gimana-gimana, tidak gimana-gimana, tidak gimana-gimana. Enak kali kau. Nanti setelah pernikahan kita beres, kau setubuhi aku. Enak kali kau."

Suaminya melotot untuk memberitahu istrinya, waktu percakapan ini terjadi, istrinya tersebut belum menjadi istrinya, bahwa nada bicaranya terlalu tinggi, artinya orang-orang lain yang juga makan di warung itu bisa mendengarkan omongannya.

"Biarlah!"

Mereka sudah merencanakan pernikahan tersebut sejak jauh-jauh hari, istrinya mengingatkan kembali suaminya, yang pada waktu itu belum menjadi suaminya, melalui telepon.

"Kau pikir aku tidak punya pilihan untuk membatalkan rencana pernikahan kita? Kau salah kalau di kepalamu ada pikiran seperti itu, Rano."

Nama istri Rano, yang pada waktu telepon itu terjadi, belum menjadi istrinya Rano, adalah Soraya.

"Soraya, aku tidak pernah memunculkan pikiran seperti itu di kepalaku. Kalau kamu tidak percaya, belah saja kepalaku ini, kamu pasti tidak akan menemukan pikiran seperti itu di kepalaku. *Please*, Sayang, jangan batalkan pernikahan kita. Aku sudah menyayangimu sejak aku melihatmu di SMA. Aku sudah sering mengatakan ini, aku sudah menyayangimu sejak aku melihatmu di SMA. Artinya, tidak ada..."

Soraya memotong ucapan Rano. Mereka pada waktu itu, sekali lagi, belum menikah. Ini adalah percakapan di telepon, dari Soraya ke Rano. Kali ini, Rano mengangkat telepon dari kos-kosannya. Kali ini, telepon tersebut juga diganggu oleh bunyi hujan, maksudnya adalah pendengaran Rano yang diganggu oleh hujan. Bunyi hujan di genteng kos-kosan Rano mengganggu ucapan Soraya, sehingga Rano tidak mendengar jelas apa-apa saja yang diucapkan oleh istrinya, yang pada waktu itu belum menjadi istrinya, baru menjadi mantan teman sekolahnya di SMA. Beberapa minggu setelah percakapan telepon ini usai, mereka pada akhirnya menikah. Pernikahan di musim hujan, hujan di tahun wabah.

Wabah baru berakhir empat tahun setelah pernikahan di musim hujan antara Soraya dan Rano selesai dilaksanakan. Mereka dikaruniai lima orang anak, satu di antaranya meninggal di dalam kandungan. Anak pertama. Soraya, seperti seorang Soraya yang dikenal Rano sejak SMA, Soraya yang sudah membuat Rano naksir kepadanya adalah seorang Soraya yang sangat tegar, tidak malu pada ucapan orang tuanya maupun tetangga-tetangga di perumahan rumah Soraya dan Rano yang dibeli menggunakan uang patungan mereka berdua. Di saat Soraya dan Rano mengadopsi anak pertama mereka setelah kandungan pertama Soraya keguguran, tidak juga Soraya malu terhadap ucapan orang-orang di kantornya. Soraya dan Rano tidak pernah memikirkannya, tetapi ternyata mengadopsi anak melahirkan buah bibir yang kurang sedap di mulut orang tua Soraya, orang tua Rano, tetangga-tetangga di perumahan rumah Soraya dan Rano, dan juga rekan-rekan kantor Soraya.

Meskipun tidak ada selentingan ina dan inu di kantor Rano, kantor Rano lebih bersahabat terhadap hal-hal yang baru diketahui Soraya dan Rano setelah mereka mengadopsi anak pertama mereka usai Soraya keguguran kandungan pertamanya. Budaya mengadopsi anak merupakan bawaan dari Barat. Setidaknya itu yang dikatakan sahabat Soraya, Winda. Winda mengatakan kepada Soraya bahwa mengadopsi anak itu kurang biasa di Indonesia, meskipun sudah cukup sering Winda melihat itu dilakukan oleh artis-artis Hollywood. Tetapi kalau di Indonesia, ada saja selentingan pembicaraan yang tidak sedap didengar oleh telinga ibunda yang memutuskan untuk memperoleh status ibu melalui cara mengadopsi anak. Meski demikian, Soraya dan Rano tidak terguncang sama sekali, telinga mereka tidak terpengaruh oleh selentingan-selentingan tidak sedap yang memang cukup santer tersebar di sekitar lingkup sehari-hari Soraya dan Rano, yaitu orang tua Soraya, orang tua Rano, tetangga-tetangga di perumahan rumah Soraya dan Rano, juga orang-orang di kantor Soraya. Meski demikian, syukurlah, tidak terjadi selentingan-selentingan omongan tidak sedap mengenai adopsi anak yang dilakukan seorang ibunda untuk memiliki status ibu itu, di kantornya Rano. Kantor Rano sangat aman untuk hal-hal yang menurut Winda kalau orang-orang di kantor Rano itu sangat mengikuti perkembangan kesadaran dunia Barat yang agak terlalu ganjil bagi ibu-ibu lain di Indonesia.

"Buatku, sih, jadi ibunda itu ya terserah-terserah saja, sih, caranya gimana." kata Winda ke Soraya, melalui aplikasi pengirim pesan di ponsel Winda. "Aku, toh, tidak pernah mau jadi seorang ibunda, aku mau jadi Soraya saja seterusnya. Ya, seperti nama kamu itu lho. Aku maunya tidak melahirkan anak, nanti aku jadi tidak Soraya lagi."

Soraya tertawa. Lebih tepatnya, Soraya mengirim emoji wajah tertawa.

Di balik ponselnya, Soraya merengut.

"Apa, sih, maksudnya Winda ngomong seperti ini?"

Soraya memperlihatkan ponselnya ke Rano. Mereka sedang makan di warung bernuansa Jawa Tengah. Soraya dan Rano memang hobinya menyantap masakan yang berasal dari nusantara, bukannya Barat atau tempat-tempat lain di luar Indonesia. Soraya dan Rano sudah sering berdiskusi tentang indahnya Indonesia, sesuai seperti indahnya sajian-sajian Nusantara, dari Aceh hingga Papua, mereka sudah makan semua sajian kuliner dari provinsi Nanggroe Aceh Darussalam sampai Irian Jaya, meskipun mereka belum sempat berpelesir ke semua kota di Indonesia, seperti yang sudah mereka sering obrolkan di waktu mereka masih berteman di sekolah. Di waktu-waktu mengobrol tentang Indonesia inilah, Rano menjatuhkan perasaan cintanya ke Soraya, tetapi pada waktu itu Soraya belum menerima cinta pria yang sangat berwawasan itu. Rano sering merekomendasikan judul-judul karya sastra dari luar negeri ke Soraya, Soraya kadang

membacanya, kadang tidak, karena Soraya juga punya selera bacaannya sendiri, yaitu *chicklit*, berbeda kategori dengan selera bacaan Rano, yaitu karya-karya sastra yang serius. Mereka pernah berdebat sangat keras, sangat panjang, hingga berjam-jam di sebuah warung makan yang menyajikan masakan khas Dayak di Kalimantan Barat. Mereka berdebat tentang memang bedanya apa antara sastra serius dengan sastra *chicklit*, kok sepertinya menurut Rano keduanya terlalu berbeda, sementara menurut Soraya, semua buku ya sama saja, cuma sangat kebetulan saja jika Soraya menyukai buku-buku yang diberitahu Rano. Buku-buku yang disukai Soraya itu berada di dalam kategori yang dinamai *chicklit* dan *chicklit* tidak termasuk kategori buku-buku sastra serius. Soraya pada waktu itu, tentu saja ini bertahun-tahun sebelum mereka berbincang kemungkinan menjajaki hubungan ke jenjang yang lebih serius lagi yaitu pernikahan, dan besok-besok kita akan tahu bahwa pernikahan mereka terjadi di musim hujan, hujan di tahun wabah, tidak begitu memikirkan buku-buku yang dia sukai sesungguhnya masuk ke kategori buku yang mana, apakah sastra serius seperti buku-buku yang direkomendasikan Rano ke Soraya, atau sastra *chicklit*. Baru setelah Rano sering memberi rekomendasi buku-buku sastra serius itulah, Soraya diberitahu Rano.

"Buku-buku yang kamu baca itu karya sastra *chicklit*, itu bukan karya sastra serius." Begini Rano berkata ke Soraya, tentu saja, seperti sudah kita ketahui sebelumnya, di paragraf sebelumnya, di pembukaan cerita, dan akan terus kita ketahui di paragraf-paragraf setelah paragraf yang ini, bahwa perkataan Rano itu disampaikan ke Soraya jauh sebelum mereka melaksanakan pernikahan yang terjadi di musim hujan, hujan di tahun wabah. Hujan yang ternyata, seperti pastinya kita bersama telah mengetahuinya, merupakan hujan yang sama saja dengan hujan di mana-mana, tidak harus turun di waktu tahun wabah. Jadi, pernikahan di musim hujan yang menjadi judul cerita

ini, dibuat demikian bukan untuk menandai sesuatu yang unik dari pernikahan tokoh-tokoh di dalam cerita ini, melainkan untuk berbagi pengalaman dua orang tokoh fiksi bernama Soraya dan Rano, yang diharapkan menghibur para pembaca cerita ini di kala kita semua mengalami tahun yang mencekam, penuh duka, luka, dan kesedihan. Tahun wabah. Tahun yang akan menjadi latar kejadian hidup nyata Soraya dan Rano, dua tokoh utama di dalam cerita ini.

Soraya dan Rano saat ini sudah menikah, seperti yang telah digambarkan di beberapa paragraf sebelumnya, tetapi dengan beberapa selentingan kurang sedap mengenai bagaimana mereka memutuskan untuk mengadopsi anak, ternyata hal ini memang merupakan pelajaran baru bagi Soraya dan Rano, sebagai orang Indonesia, mereka tidak lepas dari pembicaraan miring di belakang gara-gara mereka melakukan apa yang disebut Winda, sang penggemar kehidupan artis-artis selebritas dunia Amerika Serikat, Hollywood, hal-hal yang terlalu modern atau terlalu kebarat-baratan. Meskipun pastinya Winda akan menambahkan ucapannya menggunakan informasi yang berimbang, yaitu tidak semua membicarakan Soraya dengan miring di belakang Soraya. Banyak juga yang mendukung pilihan Soraya untuk mengadopsi   anak dan banyak juga yang sudah memahami bahwa mengadopsi anak di era modern ini sangat baik. Sebab keadaan dunia sering menjadikan anak-anak di mana pun mereka berada, tidak terlepas di Indonesia, sering mengalami nasib apes, yaitu kehilangan kedua orangtua yang sudah membuat mereka dengan sangat bersenang hati, bergembira ria, terkadang menggunakan rencana dan terkadang tanpa rencana.

Soraya dan Rano adalah kedua orangtua yang baik, terbukti setelah bertahun-tahun mereka menikah, mereka tetap mendukung kehidupan semua anaknya dengan sangat berkecukupan, tidak pernah berkekurangan. Meskipun ada saja terjal menghadang di kehidupan hubungan percintaan Soraya dan Rano, jauh sebelum mereka melaksanakan pernikahan di musim hujan, hujan di tahun wabah, hujan yang tidak berbeda di waktu mereka membicarakan karya sastra *chicklit* dan perbedaan-perbedaannya yang menurut Rano sangatlah kentara dengan karya sastra serius. Meskipun setelah mendengar pendapat Soraya tentang karya sastra *chicklit*, Rano tidak lagi begitu memikirkan tentang apa itu karya sastra serius dan perbedaan-perbedaannya dengan karya sastra *chicklit* karena Rano sudah terlanjur menjatuhkan perasaaan cinta dan sayangnya ke Soraya. Seiring berjalannya waktu, Soraya menyampaikan pendapatnya dengan wajah yang sangat serius dan penuh atensi ke pendapat-pendapat Rano mengenai apa-apa saja buku yang dibaca oleh Soraya, disertai rekomendasi buku dari selera Rano, yaitu buku-buku di dalam kategori sastra serius. Soraya dan Rano merupakan dua manusia yang sangat sempurna untuk menjadi orang tua, sebab mereka tidak saling memaksakan pendapat mereka mengenai apa pun. Soraya sudah melihat tanda-tanda Rano tidak pernah memaksakan pendapatnya mengenai apapun ke Soraya, semenjak mereka berdiskusi akhirnya, meskipun sedikit berdebat, sangat sedikit saja berdebat, pada mulanya. Akan tetapi, pada akhirnya perdebatan itu sudah menjadi perdiskusian belaka, tidak pakai adu jotos tentu saja, tidak lagi pakai tarik urat, dan hal-hal lain yang berarti berdebat kusir terlalu keras, hanya perdiskusian yang saling penuh niatan untuk memahami satu sama lain, dan ini membuat sifat Rano yang tidak memaksakan itu menjadi ketertarikan Soraya terhadap pria yang sudah jatuh hati kepada seseorang yang bernama Soraya tersebut. Seorang Soraya yang dapat membuatnya tidak memikirkan bedanya sastra serius dengan *chicklit*.

Pernikahan di musim hujan, itu yang ditulis Soraya di Instagram Story. Bertahun-tahun setelah dia menjadi seorang ibunda bagi empat orang anak, satu di antaranya merupakan anak adopsi, dan ketiga yang berikutnya lahir dari proses kelahiran dengan bedah sesar. Soraya menceritakan bagaimana tahun wabah, hujan di tahun wabah, membuat mereka kelimpungan mengurus pernikahan mereka. Meskipun pada akhirnya mereka berhasil mendamaikan hubungan mereka yang pada mulanya penuh cekcok mengenai kepastian pelaksanaan pernikahan mereka karena Rano kurang mendukung proses pengambilan keputusan mereka. Meskipun setelah itu Rano mulai menjadi laki-laki yang mengambil sikap tegas untuk meneruskan rencana pernikahan mereka. Akhirnya mereka menikah di musim hujan, hujan di tahun wabah, hujan yang sama dengan hujan yang menabrak daun-daun di pohon-pohon mangga di halaman warung makan bernuansa bagian Timur Indonesia, warung yang menjadi saksi perdebatan alot Soraya dan Rano tentang apakah mereka tetap melaksanakan rencana pernikahan mereka sesuai tanggal yang telah ditentukan, mengingat wabah tidak mengizinkan mereka untuk melakukan banyak hal, misalnya melaksanakan pernikahan tanpa protokol kesehatan. Mereka tetap harus melaksanakan protokol kesehatan dan itulah yang memang mereka lakukan, hingga akhirnya mereka berhasil melaksanakan pernikahan mereka. Pernikahan di musim hujan, hujan di tahun wabah.

Soraya sudah selesai mengetik cerita pernikahan mereka. Soraya sedang menengok ke anaknya yang paling bungsu. Ia sedang bermain-main dengan lego. Soraya menggumam, syukurlah, wabah sudah berakhir.

Di luar, daun-daun kembali terkena hujan. Hujan di tahun yang tidak memiliki wabah. Hujan yang sama dengan hujan di tahun wabah. Hujan yang menjadi saksi pernikahan Soraya dan Rano. Hujan yang juga menjadi teman bagi daun-daun di pohon-pohon mangga di rumah orang tua Soraya, tempat mereka melaksanakan pernikahan mereka. ***

Profil Penulis:

Bernard Batubara adalah penulis dwibahasa (Indonesia dan Inggris) yang sudah menerbitkan lebih dari 19 buku, seorang editor, dan penerjemah.

Akan Segera Terbit!

“Kematian”

Jurnal Multidisipliner Mahasiswa Indonesia

Vol. 3 No. 1 (2022)

UKT Mahal dan Kelas Menengah yang Tertatal

© Inas/BAL

Mahal dan tingginya biaya pendidikan tinggi di Indonesia sudah menjadi sebuah 'penyakit' menahun dan belum menemukan sebuah solusi yang tepat untuk mengatasi permasalahan ini. Sejatinya, sudah banyak cara yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi permasalahan mengenai tingginya biaya pendidikan ini, salah satunya adalah dengan menerapkan sistem uang kuliah tunggal (UKT). Pada awalnya, penerapan sistem UKT ini diharapkan mampu menjawab permasalahan mengenai tingginya biaya menempuh pendidikan tinggi.[1] Namun, realitas yang terjadi saat ini penerapan sistem UKT ini justru lebih memberatkan daripada skema pembayaran sebelum sistem UKT berlaku.[2]

Pada awalnya sistem UKT bertujuan untuk menggabungkan biaya menempuh pendidikan tinggi menjadi satu, seperti biaya semester, biaya uang pangkal, biaya KKN, biaya wisuda, dan pembiayaan lain yang terkait dengan aktivitas perkuliahan seperti yang tercantum pada Permendikbud No.55 Tahun 2013. Namun, setelah berlakunya Permenristekdikti No.39 Tahun 2017, suatu perguruan tinggi negeri (PTN) dapat menarik iuran di luar biaya UKT, seperti biaya KKN, biaya wisuda, dan biaya tes kemampuan Bahasa Inggris.[3] Berlakunya Permenristekdikti tersebutlah yang mengakibatkan pembayaran UKT saat ini justru lebih memberatkan bagi para mahasiswa. Selain itu, pembayaran biaya pendidikan yang pada awalnya hanya tunggal, seperti namanya—uang kuliah tunggal, kini menjadi jamak dengan berbagai iuran dan pungutan-pungutan lainnya.

Sesuai dengan yang sudah tertera dalam Rancangan Undang-Undang Badan Hukum Pendidikan (RUU BHP), pemerintah melakukan privatisasi pendidikan.[4] Hal ini berakibat pada semua satuan pendidikan nantinya akan menjadi badan hukum pendidikan yang berkewajiban mencari dana sendiri. Adanya perubahan status tersebut membuat pemerintah melemparkan tanggung jawab pendidikan warganya kepada sebuah badan hukum. Pelemparan tanggung jawab pendidikan ini akan berdampak pada meningkatnya biaya pendidikan di beberapa perguruan tinggi favorit.

Dilansir dari laman resmi Kemenkeu (2013) beberapa PTN merubah statusnya menjadi Badan Hukum Milik Negara, yaitu IPB, UGM, ITB, UI, UNPAD, UNDIP, dan ITS. Hal ini terjadi untuk membantah stigma masyarakat tentang pendidikan bermutu itu harus mahal.[5] Hal ini disebabkan karena dalam memperoleh pendidikan berkualitas memang tidak mungkin murah, tetapi permasalahannya siapa yang seharusnya membayar pembiayaan pendidikan ini? Pemerintahlah yang memiliki kewajiban untuk menjamin setiap warganya mengenyam pendidikan dan menjamin akses masyarakat bawah ataupun kelas menengah untuk mendapatkan pendidikan bermutu.

Dampak dari tingginya biaya pendidikan ini tidak hanya menjerat masyarakat kelas bawah. Namun juga, banyak dirasakan oleh kelas menengah. Posisi kelas menengah berada di antara kelas atas dan kelas bawah, dan definisi dari kelas menengah itu sendiri menurut Survei Kelas Menengah 2014, yaitu individu yang memiliki pendapatan rumah tangga rata-rata sebesar Rp4,27 juta per bulan. Pemerintah selama ini fokus untuk memberikan banyak bantuan dan perlindungan bagi kelompok miskin, tetapi masih luput dalam memerhatikan kondisi kelas menengah.[6] Di lingkungan perguruan tinggi, sulit bagi mahasiswa kelas menengah untuk bisa mendapatkan bantuan-bantuan atau beasiswa untuk meringankan biaya pendidikannya, karena mereka sering kali dianggap "mampu" untuk membayar UKT yang ditentukan oleh pihak kampus.[7] Padahal, tidak semua dari mereka memiliki orang tua dengan gaji yang tinggi.[8]

Kesempatan bagi masyarakat untuk memperoleh pendidikan tinggi menjadi semakin sempit dan bersifat diskriminatif. Masyarakat kelas atas dapat mengakses pendidikan dengan kualitas yang lebih baik dan bisa fokus dengan studinya tanpa harus memikirkan mengenai pendanaan selama mereka studi, sedangkan untuk masyarakat kelas menengah ke bawah, terkadang mereka harus mencari cara untuk bisa tetap mencukupi kebutuhan studinya. Hal ini mengakibatkan mereka tidak dapat mengerahkan seluruh tenaga dan waktu yang mereka miliki untuk fokus menjalankan studi.

Pendidikan tinggi bukanlah sebuah komoditas, dan seharusnya pemerintah memastikan bahwa seluruh masyarakat memiliki akses yang mudah ke perguruan tinggi. Apabila pendidikan tinggi semakin mahal, maka akses masyarakat ke perguruan tinggi akan semakin sulit, dan kemungkinan terburuknya yaitu masyarakat akan enggan untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Dampak yang akan dirasakan oleh negara apabila tingkat partisipasi masyarakat terhadap perguruan tinggi rendah yaitu masyarakat Indonesia akan kesulitan untuk bersaing di pasar tenaga kerja, baik di kancah nasional maupun global.[9] Adanya prediksi bahwa Indonesia akan memperoleh bonus demografi juga merupakan salah satu alasan mengapa negara tidak boleh membiarkan tingkat partisipasi masyarakat terhadap perguruan tinggi menurun, karena kualitas manusia di Indonesia harus disiapkan dengan baik agar dapat mendorong pertumbuhan dan pembangunan ekonomi di Indonesia.[10] Dengan demikian, pemerintah harus melakukan intervensi agar pendidikan tinggi tidak semakin mahal dan angka partisipasi masyarakat terhadap perguruan tinggi tidak menurun.[11]

Pendidikan adalah salah satu tolok ukur terbesar yang dapat mengukur apakah negara tersebut dapat mensejahterakan rakyatnya, serta apakah negara tersebut dapat memenuhi segala kebutuhan warganya baik kebutuhan primer, sekunder, atau tersier. Lalu, bagaimanakah sebenarnya pendidikan yang ideal? Pendidikan tinggi harus bisa dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat, sesuai dengan amanat UUD 1945 Pasal 31 ayat (1) yang menyatakan bahwa "Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan".[12]

Sesungguhnya pendidikan bukanlah sesuatu yang mahal. Namun, pada kenyataannya, kondisi yang ada sekarang membuat pendidikan seolah menjadi sebuah barang mahal yang hanya bisa diraih oleh orang-orang dengan sumber daya yang melimpah. Skema pendanaan yang ada sekarang memperlihatkan bahwa pemerintah mendanai perguruan tingginya, bukannya mendanai warga negaranya secara langsung. Akan lebih baik apabila pemerintah dapat memberi subsidi pendidikan dengan mendanai warga negaranya secara langsung agar pemenuhan hak atas pendidikan tinggi untuk seluruh masyarakat dapat tercapai.[13]

Dibutuhkan evaluasi lebih lanjut dalam penentuan UKT maupun sistem pendidikan secara keseluruhan agar tidak membebani mahasiswa. Untuk mengatasi praktik komersialisasi pendidikan dan mewujudkan pendidikan ideal yang dapat dijangkau oleh seluruh masyarakat, beberapa hal yang dapat dilakukan yaitu pemerintah harus melakukan evaluasi setiap tahunnya dengan mendengarkan opini masyarakat, serta melakukan penilaian terhadap biaya pendidikan yang ditetapkan oleh setiap perguruan tinggi.
Sistem UKT merupakan sistem yang akan sangat membantu mahasiswa apabila diterapkan secara tepat sasaran. Namun, kenyataan yang menunjukkan bahwa penerapan sistem UKT sering kali terlalu timpang dan memberatkan. Oleh karena itu, diperlukan suatu formulasi ulang dari sistem ini supaya penyebaran dalam masing-masing golongan bisa lebih adil, merata, serta tepat sasaran. Selain itu, diperlukan standardisasi biaya pendidikan pada tingkat perguruan tinggi yang mencakup biaya masuk perguruan tinggi, biaya per semester, serta biaya lain terkait proses pembelajaran dalam perkuliahan, sehingga mampu mengurangi praktik komersialisasi pendidikan.[14]

[Eiben, Afifah, Rachel]

---

[1]Mulkillah, Panji. 2019. KULIAH KOK MAHAL? Pengantar Kritis Memahami Privatisasi, Komersialisasi, dan Liberalisasi Pendidikan Tinggi. Yogyakarta: Best Line Press.
[2] Op.Cit.
[3] Op.Cit.
[4] Al-Jawi, M. S. (2006). PENDIDIKAN DI INDONESIA : MASALAH DAN SOLUSINYA.
[5] Op.Cit, hal 1
[6] Basri, M.C. (2020). Kerentanan Kelas Ekonomi Menengah Indonesia. [online] Universitas Indonesia. Available at: https://www.ui.ac.id/kerentanan-kelas-ekonomi-menengah-indonesia/ [Accessed 19 Jun. 2021].
[7] Rosyidin, R.A. (2021). Sulitnya Mahasiswa Kelas Menengah yang Tak Pintar-pintar Amat Mendapatkan Beasiswa di Indonesia. [online] Terminal Mojok. Available at: https://mojok.co/terminal/sulitnya-mahasiswa-kelas-menengah-yang-tak-pintar-pintar-amat-mendapatkan-beasiswa-di-indonesia/ [Accessed 19 Jun. 2021].
[8] Yunianto, T.K. (2020). Gelombang PHK Sebabkan Daya Beli Kelas Menengah - Bawah Anjlok 30% - Nasional Katadata.co.id. [online] katadata.co.id. Available at: https://katadata.co.id/happyfajrian/berita/5eeb9711c91d2/gelombang-phk-sebabkan-daya-beli-kelas-menengah-bawah-anjlok-30 [Accessed 19 Jun. 2021].
[9] Op.Cit, hal 1
[10] Sari, R.K., Bangapadang, S. and Hidayat, C. (2019). ANALISIS PERAN PERGURUAN TINGGI TERHADAP BONUS DEMOGRAFI DI INDONESIA.
[11] Op.Cit, hal 1
[12]Sujatmoko, E. (2010). Hak Warga Negara Dalam Memperoleh Pendidikan. Jurnal Konstitusi, 7(1), pp.182–183.
[13] Op.Cit, hal 1
[14]Astri, H. (2011). DAMPAK SOSIAL KOMERSIALISASI PENDIDIKAN TINGGI DI INDONESIA. p.624.

© Winda/BAL

Gagasan Pelatihan Gratis sebagai Ekosistem Pendidikan Masa Depan

Saat memasuki area padepokan ASA, terdapat joglo limasan yang memberikan nuansa etnik disertai suasana persawahan yang hijau. Padepokan ASA, sekilas terdengar seperti tempat pelatihan pencak silat atau tempat pesantren. Namun, siapa sangka padepokan ASA merupakan tempat pelatihan *softskill* gratis dan perkumpulan komunitas di Yogyakarta. Selain itu, adanya mushola, toilet, dan lahan parkir menjadi fasilitas penunjang operasional Padepokan ASA. Padepokan ASA itu sendiri terletak di Padukuhan Gedongan Lor, Desa Wedomartani, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Sleman. Kawasan ini sekilas tampak kurang strategis di daerah utara Yogyakarta. Namun, terlepas dari lokasi kurang strategis, Padepokan dapat diakses dengan mudah karena berada di pinggir jalan.

Padepokan ASA dibangun oleh Atmaji Sapto Anggoro, yang merupakan seorang mantan jurnalis detik.com. Pria kelahiran Jombang tersebut menceritakan bahwa ia mendirikan Padepokan ASA karena ingin meningkatkan kualitas SDM dengan pembuatan ekosistem pendidikan yang baik. Beliau menyinggung mengenai ide pembangunan Padepokan ASA. "Semakin banyak orang yang berkualitas, maka insyaallah negeri ini menjadi tempat yang bagus," ujarnya.

Pemilihan nama Padepokan ASA, sebagaimana diceritakan Sapto, berasal dari namanya sendiri, yaitu Atmaji Sapto Anggara (ASA). Sedangkan, kata padepokan dipilih dalam penamaan, karena lokasinya berada di Yogyakarta. Sesuai dengan tujuannya, arti padepokan adalah tempat untuk melakukan pelatihan. Menurutnya, pelatihan dalam padepokan dikhususkan bagi pelatihan *softskill* bukan pelatihan secara tradisional maupun konvensional. "Nama Padepokan ASA akan lebih akrab oleh orang-orang sekitar sebagai tempat berlatih dan mengasah diri dibanding dengan saung yang lebih dikenal di Bandung," ujar Sapto.

Dalam kesehariannya, Padepokan ASA ini kerap melaksanakan kegiatan secara cuma-cuma. Menurut pemaparan Sapto, kegiatan Padepokan ASA secara realistis dapat dilaksanakan secara gratis. Hal itu dijelaskan Sapto karena adanya relasi antara dirinya, pembicara, dan sponsor. Berasal dari pemikiran yang kuat, Sapto berpendapat bahwa setiap orang memiliki pikiran dan keinginan beramal menggunakan intelektual. "*Networking* itu mahal harganya, saya mendapatkan banyak relasi dan pengalaman di detik.com," tuturnya.

Lebih lanjut, Sapto memaparkan bahwa salah satu peran penting dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh Padepokan ASA terletak pada adanya volunter. Dari Padepokan ASA, para volunter diberikan gaji atas kerjanya dalam pengelolaan kegiatan padepokan yang lebih teratur. Ditanya soal pendapatan, Sapta menjawab bahwa volunter diberikan gaji dari penghasilannya sendiri dan sponsor. "Padepokan tidak perlu memakai proposal untuk pengajuan dana, hanya menerangkan rincian acara dan biaya yang dibutuhkan," jelas Sapto.

Mengenai adanya volunter, Sapto menjelaskan bahwa keberadaan Ahmad Sofyan menjadi hal yang penting. Pasalnya, Ahmad Sofyan atau yang kerap dipanggil Uta, pada kesehariannya mengemban tugas sebagai Manajer Program dari Padepokan ASA. Sebelum menjadi manajer, Uta sudah bergabung dengan komunitas padepokan ini. Uta yang bergabung pada akhir tahun 2018 menyatakan bahwa bukan sukarela yang menjadi alasan untuk bekerja sebagai manajer. Pengalaman dan relasi sudah banyak didapatkan oleh Uta sejak ia mengelola program di Padepokan ASA. "Mengelola program non*profit* yang tidak berbayar dan relasi pembicara menjadi pengalaman tersendiri yang mengesankan," ungkap Uta.

Uta menceritakan bahwa kegiatan Padepokan ASA berlangsung *offline* sebelum adanya pandemi. Turut dijelaskan olehnya bahwa terdapat dua tipe kegiatan yang dilaksanakan oleh padepokan. *Pertama*, kegiatan yang diselenggarakan oleh padepokan ASA sendiri, contohnya padepokan mengundang CEO Bukalapak dan Tokopedia. *Kedua*, padepokan hanya menyediakan tempat dan fasilitas untuk acara. Kegiatan ini dilaksanakan di Joglo yang memuat 30 orang dan disediakan tenda untuk penambahan sampai 100-200 orang. "Acara tersebut berasal dari institusi lain, Padepokan ASA hanya menunjang kebutuhan teknis seperti *speaker*, mik, *lcd*, proyektor, *screen*, dan lainnya," tambahnya.

Di balik kesuksesan dinamika kegiatan selama ini, adanya pandemi membuat Sapto dilarang oleh Kepala Desa setempat untuk melakukan kegiatan perkumpulan di Padepokan ASA. Menurut pengamatannya, Sleman termasuk daerah merah dan ruang gerak penyebaran virus covid harus dipersempit dengan tidak membuka kelas *offline*. "Karena padepokan masuk daerah kampung, kita menghormati penduduk sekitar," ujar Uta.

Dari kondisi operasional yang dituntut dilakukan secara online, Sapta menekankan bahwa Padepokan ASA harus dapat beradaptasi. Sapta menjelaskan bahwa penyesuaian merupakan sebuah keharusan untuk mempertahankan eksistensi Padepokan Asa. Walaupun kegiatan *online* ini tidak optimal, Sapta berpikir lebih positif bahwa jangkauan peserta akan lebih luas. Contohnya saat bulan puasa lalu, Padepokan ASA mengadakan pelatihan *online* dengan mengundang perusahaan Praxis Academy tentang pengetahuan teknologi informasi. "Waktu itu ada 2500 orang yang ikut sebulan dan hasilnya beberapa peserta tersebut ada yang bekerja di Praxis," tambahnya.

Pencapaian Padepokan ASA yang cenderung masih bisa dihitung jari serta keadaan pandemi turut menghambat adanya pertemuan dinilai Sapto bukan sebagai masalah. Gagasan penting dari pencapaian berharga menurut Sapto adalah kemampuan Padepokan ASA untuk melahirkan komunitas yang sadar atas perkembangan IPTEK. Beberapa orang dalam komunitas Padepokan ASA sering menghubungi Padepokan dan berbagi pencapaian mereka. Menurut pemaparan Sapta, adapun orang yang bisa memberikan pelatihan lagi setelah ikut kegiatan Padepokan. "Bagi saya itu sudah puas, dia masih ingat pernah main di sini sekarang makin hebat merasa menjadi bagian dari sini, komunitas juga gitu," ujar Sapto.

Menurut Sapto, Padepokan ASA dapat tenilai sukses bila orang-orang yang pernah berlatih di sini bisa berbuat lebih atau sama kepada masyarakat. Dalam mencapai kesuksesan, Sapta menjelaskan bahwa dia ingin Padepokan ASA untuk tidak hanya menjadi tempat untuk pelatihan, tetapi juga sebagai tempat untuk menjalankan gerakan yang memberikan arti bagi kehidupan masyarakat. "Kalau dia bisa membuat sesuatu bagi masyarakat itu udah bagus," tambah Sapto.

Terakhir, Sapto berharap apabila Padepokan ASA telah mendapatkan perhatian dan memberikan makna bagi masyarakat, maka Sapto akan membangun konsep Padepokan ASA di tempat lainnya. Tentu saja prosesnya tidak hanya dilakukan Sapto sendiri. Sapto menjelaskan bahwa pergerakannya harus dikerjakan dengan orang-orang yang memiliki frekuensi yang sama untuk meningkatkan kualitas SDM. Sapta mengungkapkan bahwa mekanisme kegiatan ditentukan oleh pihak padepokan. Terkait pembicara dalam kegiatan tetap bergantung pada *network* dari Sapto, namun semua kegiatan tetap di koordinasi oleh manajer padepokan di masing-masing tempat. "Ya, prinsipnya kita tidak hanya memikirkan diri sendiri tetapi generasi ke depan," ujar Sapto. **[Alfimansyah, Ridha, Siti]**

Merajut Kegemaran Membaca dengan Becak Pustaka

© David/BAL

"Saya berharap masyarakat Indonesia dapat mengisi waktu luang dengan membaca buku karena buku itu penuh dengan hal yang bermanfaat"

Di tengah deru kendaraan yang melintas, terdapat sepasang bola mata yang bergerak teratur dari kiri ke kanan mengikuti lantunan kata di atas kertas. Seorang pria berkacamata duduk menikmati rutinitas membaca buku di atas sebuah becak. Sepintas, becak yang terparkir di pinggir ruas Jalan Tentara Pelajar, Bumijo, Yogyakarta ini terlihat sama seperti becak pada umumnya. Namun, jika diperhatikan dengan saksama, di bagian kanan, kiri, dan belakang tempat duduk penumpang terdapat rak berisi buku-buku. Pria penarik becak tersebut tersenyum ramah sembari menyapa tim Balairung pada Jumat (21-05) menggunakan bahasa Inggris yang nyentrik. Ia mengaku belajar bahasa Inggris secara autodidak melalui buku dan kamus yang dimilikinya, juga lagu yang didengarnya.

Penarik becak bernama Fransciscus Xaverius Sutopo ini mengawali kariernya sebagai pegawai negeri sipil di Kodim 0734/Kota Yogyakarta. Selama 26 tahun ia mengabdi di instansi militer sebagai tukang gambar. Setelah pensiun pada tahun 2003, pria berumur 74 tahun yang akrab disapa Sutopo ini beralih profesi menjadi seorang penarik becak. Alasannya sederhana, ia tak ingin pensiun dari bekerja.

Awal mula ia menjadi tukang becak, tak ada buku berjejer rapi di becaknya. Seorang pelanggan kemudian menyumbang beberapa eksemplar setelah melihatnya selalu membaca buku saat beristirahat. Akhirnya masyarakat lain pun mengikuti jejak pelanggan yang menyumbang buku ini. "Karena banyak yang menyumbang buku, akhirnya saya buat saja becak buku," ujar Sutopo yang hobi membaca buku sejak kecil dengan sukacita.

Awalnya, buku yang terdapat pada becaknya jumlahnya terbatas dan bergantung pada penyumbang buku dari masyarakat di sekitarnya. Perlahan tetapi pasti, lingkup penyumbang buku yang awalnya hanya sebatas masyarakat sekitar meluas hingga berbagai komunitas, percetakan, dan perpustakaan. “Jadi, para penyumbang buku ini sangat membantu saya dalam mewujudkan kegiatan yang sifatnya membagikan ilmu kepada masyarakat,” tuturnya mengapresiasi kebaikan orang-orang di sekitarnya. Saat ini, Sutopo memperkirakan ada kurang lebih dua ratus buku di rumahnya. Sementara itu, pada becaknya terdapat seratus buku dengan berbagai genre.

Dalam melakukan pekerjaannya, ia melayani dua fungsi. *Pertama*, sebagai becak biasa yang digunakan untuk mengantar penumpang ke tempat tujuan. *Kedua*, sebagai becak pustaka yang melayani peminjaman buku bacaan secara gratis. “Ayo membaca, ayo membaca. Gratis!” tutur Sutopo, serupa dengan jargon yang ada pada becaknya. Selama menjalankan pekerjaannya, ia mengaku pelanggan yang ia temui bermacam-macam. Ada pelanggan yang hanya tertarik dengan buku-buku di becaknya, ada yang ingin mencoba sensasi membaca buku sembari naik becak, dan ada pula yang hanya ingin diantar menuju tempat tujuan.

Riuh ramai anak-anak sekolah dasar Tarakanita Bumijo selepas bel pulang sekolah berdering menjadi hal yang ditunggu Sutopo setiap harinya. Beberapa murid berlari menuju becak miliknya yang terparkir di dekat sekolah. Mereka berebut ingin membaca buku. “Kegiatan ini lebih baik ketimbang *ngalor ngidul* membawa ponsel untuk menggunakan internet. Hal tersebut ‘kan sangat riskan, apalagi bagi anak-anak,” tambahnya.

Sutopo bercerita bahwa pada suatu hari ia diminta untuk mengantar seorang siswa pulang ke rumah. Namun, ketika sudah tiba di rumah, siswa tersebut tidak ingin turun dari becak dan justru meminta untuk mengantarnya kembali ke sekolah karena belum tamat membaca buku. Sejak kejadian tersebut, Sutopo memutuskan untuk membuat sebuah kebijakan mengenai peminjaman buku. Meskipun tidak menggunakan jasanya sebagai tukang becak, siapa pun dipersilakan meminjam buku-bukunya. Jumlah buku dan rentang peminjaman juga tidak ia batasi. Terkadang, ada yang tidak mengembalikan buku pinjamannya, tetapi bagi Sutopo hal tersebut tidak menjadi masalah. “Namanya manusia, berkata pinjam, berarti ‘kan seharusnya mengembalikan, tetapi ada juga yang tidak mengembalikan. Namun, buat saya hal tersebut *no problem*,” tutur tukang becak yang gemar membaca ini.

Awal menjalankan pekerjaannya sebagai tukang becak, Sutopo menggunakan becak kayuh tradisional seperti pada umumnya. Namun, pada Maret 2021, beliau menerima bantuan becak listrik dari PT Askrindo Yogyakarta. Sutopo bercerita bantuan tersebut bermula ketika PT Askrindo Yogyakarta membuat film mengenai kehidupannya dan pada akhir film tersebut mereka bertanya, “Apa keinginan Bapak ke depan?” Sutopo pun menjawab, “Karena saya semakin tua dan mengayuh semakin berat, saya punya keinginan untuk memiliki becak listrik.” Keinginan itu kemudian diwujudkan oleh PT Askrindo pada bulan Maret silam. Kini, ia mengendarai becak listrik dengan tiga buah rak buku yang dipasang di sekitar tempat duduk penumpang.

Sutopo melanjutkan becak pustakanya menggunakan becak listrik tersebut meskipun di era digitalisasi, posisi buku fisik semakin tersisihkan oleh buku digital. Menanggapi fenomena tersebut, Sutopo tetap tidak berencana untuk menerapkan teknologi digital pada becak pustakanya. Keputusan Sutopo dibuat bukan tanpa alasan. Bagi beliau, akses teknologi digital masih sangat terbatas bagi pedagang kecil, pemulung, pedagang kaki lima, dan teman-teman tukang becak.

Keberadaan Sutopo memberikan kesempatan bagi masyarakat yang belum memiliki pengetahuan dan biaya untuk mengakses teknologi digital. Ia menyediakan buku-buku fisik dengan sistem peminjaman tradisional. Selain itu, bagi Sutopo, memberikan akses bacaan ke masyarakat dapat mendorong peningkatan tingkat literasi masyarakat yang sebenarnya hanya dibatasi oleh rasa malas.

Sewaktu Sutopo membaca koran dan melihat di lini masa media sosial, ia menemukan bahwa tingkat literasi Indonesia berada pada tahap yang sangat memprihatinkan. “Saya berharap masyarakat Indonesia dapat mengisi waktu luang dengan membaca buku karena buku itu penuh dengan hal yang bermanfaat,” ujarnya. Selain itu, ia juga memiliki harapan terhadap pemerintah untuk selalu menggalakkan kebiasaan membaca. Penggalakan tersebut diharapkan dapat menjangkau hingga ke pelosok desa. Masyarakat yang sudah mahir dan rajin membaca dapat dilatih untuk tingkat selanjutnya, yakni penulisan. Ilmu yang didapat dari membaca dapat dituangkan ke dalam tulisan, sehingga wawasan tidak berhenti pada orang tersebut, tetapi berkelanjutan dibagikan kepada sesama.

“Pak Sutopo adalah orang yang periang dan rendah hati,” tutur Edi, salah seorang tetangga, ketika mendeskripsikan Sutopo. Ia kerap bertemu ketika Sutopo pergi maupun pulang dari bekerja. Meskipun di tengah kondisi sulit seperti pandemi yang sedang terjadi sekarang ini, Sutopo tetap giat bekerja. Hal ini tak terlepas dari dukungan sang istri, Suharinah, yang terus memberi dorongan kepada Sutopo untuk mencapai tujuannya, yakni terus bekerja dan berkarya bagi sesama hingga berusia 100 tahun. Sutopo ingin memberikan inspirasi kepada masyarakat sekitar sebagai menjadi penggiat literasi dengan menyediakan buku bacaan gratis pada becaknya.

[Amarapallevi, Atsil, Azella]

© Winda/BAL

Ketika Seni Bersanding dengan Tani

Dengan desain yang profesional, tetapi tetap melalui pendekatan yang sederhana inilah PARI berusaha untuk merebut hati masyarakat umum.

Langit terlihat berganti warna, menandakan waktu petang telah tiba. Tepat di ujung Joglo pada Warung Teh Umari, seorang lelaki sedang menikmati secangkir teh sembari melihat pemandangan langit petang menuju malam. Dalam suasana santai, sembari sesekali menyeruput teh, lelaki itu bercerita kepada tim Balairung mengenai nasib distribusi produk pertanian yang telah mengalami pembatasan pada masa pandemi COVID-19 ini. Mengingat awal pandemi, terdapat swadaya dari masyarakat untuk membatasi akses keluar masuk kampung. Lelaki tersebut ialah Anang Saptoto, seorang seniman serta penggagas berdirinya Panen Apa Hari Ini (PARI). Ia bercerita mengenai PARI, distributor bahan pangan dan hasil sumber daya lain yang diproduksi oleh Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dengan mengandalkan seni sebagai media pengiklanannya.

Cerita mengenai PARI berawal dari diselenggarakannya dapur umum yang bertujuan untuk membantu masyarakat terdampak pandemi dengan membagikan makanan. Untuk itu, Anang sebagai salah satu sukarelawan membutuhkan bahan baku makanan. Ia pun mengunjungi lahan milik Sofyan, seorang petani cabai di kawasan Kulon Progo. Sesampainya di sana, Anang menjumpai lahan yang luas dengan variasi tanaman seperti cabai, bawang, dan terong. Pemandangan itulah membuat Anang melihat adanya potensi pengembangan bisnis pertanian milik Sofyan. Namun, Anang merasa diperlukan peningkatan metode distribusi sehingga dapat memperluas jangkauan terhadap konsumen.

Berangkat dari pemikiran tersebut, Anang lantas mendirikan Panen Apa Hari Ini pada 11 Juni 2020 yang membawa dua tujuan besar, yaitu untuk mendistribusikan hasil panen dan menyiarkan informasi mengenai kelompok tani yang bekerja sama dengan PARI. Kedua tujuan tersebut dirasa penting oleh Anang sebab relasi antara pembeli dengan bahan pangan yang mereka konsumsi terputus selama ini. Sayuran yang dibeli di pasar, misalnya, tidak menyediakan informasi untuk konsumen mengenai daerah penghasilnya, apalagi kelompok tani yang telah menanamnya. “Pendirian PARI itu bukan untuk mencari keuntungan sebesar-besarnya, tetapi untuk membuka informasi pertanian seluas-luasnya agar produsen dan konsumen bisa saling terkait,” jelas Anang.

Anang mengeluarkan gawainya, lalu memperlihatkan akun Instagram PARI dengan nama pengguna @panenapahariini kepada kami. Terlihat foto antara manusia dan bahan makanan dipadukan dengan cantik dan detail. Serta, pada foto-foto selanjutnya terdapat katalog elektronik dan dokumentasi proses produksi. Dalam foto-foto tersebut terdapat keterangan mengenai UMKM atau kelompok tani yang bekerja sama dengan PARI dan jenis barang atau bahan makanan yang dijual beserta harga satuannya.

Dampak positif dari keberadaan PARI tidak hanya dirasakan oleh konsumen, tetapi juga oleh kelompok tani sebagai produsen. Kelompok-kelompok tani lokal dan UMKM selalu dilibatkan dalam berbagai program dan kegiatan PARI. Salah satunya adalah Kampung Markisa di Blunyahrejo yang telah bekerjasama dengan PARI sejak Oktober 2020. Melalui seni visual sebagai ciri khas PARI, kelompok tani seperti Kampung Markisa juga berkesempatan memperluas jaringannya. “PARI sangat membantu dalam kemajuan Kampung Markisa karena telah mempromosikan hasil panen kami lewat foto-fotonya,” ujar Anjar, pendiri Kampung Markisa.

Dalam konteks yang lebih luas, keberadaan Komunitas PARI juga diharapkan dapat berpengaruh terhadap kedaulatan pangan masyarakat sekitar. Anang menyebutkan, terdapat setidaknya satu kelompok tani pada setiap kampung. Sayangnya, tidak banyak yang mengetahui perihal kelompok-kelompok tani tersebut. Namun, semenjak didirikannya PARI, hasil panen sekaligus informasi terkait kelompok tani dapat disebarluaskan. Akibatnya, masyarakat mampu memenuhi kebutuhan pangannya secara mandiri. “Hasil yang ada dari kelompok tani itu sebagian besar dikonsumsi oleh warga sekitar mereka sendiri,” ujar Anang.

Berbicara mengenai gaya pendekatan visual komunitas PARI ini, Syafrizal, dosen Ilmu Komunikasi UGM, memberikan komentar bahwa sejatinya gaya pendekatan montase (penggabungan objek foto) sebenarnya sudah lumrah digunakan di mana pendekatan ini dilakukan dalam upaya untuk menghidupkan kembali sebuah pesan lewat gambar yang mengandung cerita. Cerita-cerita ini sendiri bukan hanya disuguhkan lewat gambar biasa oleh PARI, melalui teknik montase mereka mengubah dengan memadukan foto objek manusia dan memadukannya dengan bahan makanan hingga menjadi suatu seni visual. “Lewat visual-visual *masking* atau montase antara objek manusia dengan sayuran atau bahan makanan yang dibeli itu, diharapkan orang akan berhenti sejenak untuk melihat,” ujar Syafrizal.

Menurut Syafrizal, budaya visual dan media sosial merupakan hal yang tidak dapat terpisahkan dan visual adalah hal yang akan menjadi pusat perhatian utama pengguna ketika menggunakan media sosial. Oleh karena itu, untuk memanfaatkan hal ini, perlu dilakukan suatu adaptasi pendekatan sesuai dengan tren yang berlaku, yaitu ketidak laziman, dan lebih lanjut lagi, Syafrizal menambahkan, “Orang-orang suka dengan sesuatu yang unik. Karena saat ini sesuatu yang artistik kan orang-orang sudah biasa melihatnya, justru dengan cara-cara yang agak mengganggu ini, ya itu yang justru menarik,”. Terlebih lagi pendekatan seperti ini di dunia bisnis pertanian, dengan melihat kondisi Indonesia, menurut Rizal merupakan sebuah hal yang baru, sebab biasanya promosi produk pertanian lebih mengedepankan aspek kesegaran, pengemasan, dan artistik. Oleh karena itu, dapat dikatakan apa yang dilakukan PARI memberikan warna baru pada pendekatan dan pengomunikasian perihal dunia pertanian pada khalayak umum.

Akan *tetapi* meskipun desain visual yang digunakan tak lazim atau aneh, desain visual yang digunakan oleh PARI bukan juga desain sembarang tempel gambar saja. Syafrizal menilai bahwa desain yang dilakukan oleh PARI merupakan gambaran desain visual yang profesional. “Saya bisa mengatakan itu desain visual yang profesional karena kita bisa lihat dari *cropping* terhadap objek buah atau sayur itu sangat rapi, *clean*, pencahayaannya juga *balance*, antara objek orang dengan terong misalnya, cukup *balance*, bahkan masih diberi *shadow* di bagian bawah,” tutur Syafrizal mengomentari desain visual yang disuguhkan PARI.

Dengan desain yang profesional, tetapi tetap melalui pendekatan yang sederhana inilah PARI berusaha untuk merebut hati masyarakat umum. Gambar-gambar yang sengaja dibuat aneh dan disesuaikan dengan peran dari tokoh dalam karya montase tersebut, “Kalau yang di bagian bawah dikolase telur berarti dia petani yang budidaya telur ayam kampung, kalau di atas kolase telur brati dia yang beli telur ayam itu,” kata Anang. Menurut Rizal, justru hal yang tidak biasa ini dapat mengundang khalayak untuk membangkitkan kemampuan asosiasinya dan bertanya-tanya, “Gambar ini sebenarnya maksudnya apa sih? Nah, ya dengan pola yang dibuat, orang akan penasaran kalau ada gambar seseorang yang di bawahnya misalkan lobak gitu, orang jadi membayangkan lobak itu dari mana," ujarnya. Sesederhana dan seapik itulah cara PARI dalam mengajak para pemirsa untuk lebih peduli lagi tentang pangan dan pertanian sebagai isu utama yang diangkatnya. **[Jacinda, Natasya, Widiatri]**

Kaum Muda, Karier Subkultural, dan Resistansi

Oleh Oki Rahadianto Sutopo

© Ulil/BAL

Dalam kehidupan sehari-hari, kaum muda seringkali lekat dengan irisan antara dimensi transisi dan budaya. Di satu sisi, kaum muda seringkali secara normatif dikonstruksikan akan melewati domain keluarga, pendidikan, dan kerja. Di sisi lain, kaum muda juga menciptakan budayanya sendiri yang khas dengan dinamika mereka. Secara teoretis, dalam kajian kepemudaan, dimensi transisi sering kali dikonstruksikan berlangsung secara linier. Dengan kata lain: sekolah-kerja-menikah. Namun dalam perkembangannya, transisi yang bersifat linier sering kali hanya ada di atas kertas, justru yang terjadi adalah transisi bercorak *zig-zag*, *fragmented*, dan penuh dengan ketidakpastian. Dimensi budaya kaum muda lekat dengan potensi resistansi simbolik berbasis kelas maupun individual. Namun sebaliknya, budaya kaum muda juga sangat dekat dengan ingar bingar dan perayaan konsumerisme ala kapitalisme lanjut. Baik dimensi transisi maupun budaya tidak terlepas dari konteks sosial historis, perubahan, dan lanskap generasi sosial yang melingkupinya.

Dalam konteks neoliberal kontemporer, kaum muda dihadapkan pada kondisi dengan peluang kerja di sektor formal semakin menipis digantikan oleh kontrak, kasual, magang, dan ucapan terima kasih. Akibatnya, dimensi *progress* dan keberlanjutan dalam karier juga semakin hilang. Hal ini di satu sisi menimbulkan risiko-risiko

yang tidak dapat diprediksi bagi kehidupan kaum muda di masa sekarang dan masa depan. Namun di sisi lain, tekanan struktural tersebut dapat pula dimaknai oleh kaum muda sebagai tantangan untuk menciptakan dan merawat karier mereka sendiri sesuai dengan bakat dan *passion* yang dimiliki.

Berdasarkan riset mengenai karier subkultural yang telah saya lakukan selama kurang lebih 10 tahun terakhir, mendapati bahwa kaum muda justru secara refleksif mampu mengolah bakat dan *passion* yang mereka miliki menjadi karier yang tidak hanya menghidupi secara ekonomi, tetapi juga sekaligus mempertahankan nilai-nilai idealisme mereka. Menghidupi secara ekonomi dalam karier subkultural tidak perlu disandingkan dengan standar normatif kemapanan dalam masyarakat. Sebaliknya, kaum muda justru secara refleksif menciptakan kemapanannya sendiri berdasarkan persilangan temporal, spasial, dan daur hidup mereka. Sedangkan nilai-nilai idealisme dalam karier subkultural adalah terkait dengan melakukan, menekuni, mengembangkan, dan merawat karier yang mereka pilih sesuai dengan bakat dan *passion*. Sering kali pilihan ini tidak berbanding lurus dengan ekspektasi keluarga, masyarakat maupun negara.

Kapital budaya menjadi kapital yang perlu dimiliki, dikembangkan, dan dirawat oleh kaum muda. Kapital budaya dalam karier subkultural tidak selalu berhubungan dengan dunia akademis, tetapi justru banyak didapatkan dari partisipasi yang intens dengan beragam kelompok subkultur. Secara spesifik, *nongkrong* menjadi titik masuk maupun strategi yang dilakukan untuk mengakumulasi kapital budaya tersebut. Dalam kegiatan *nongkrong* ini berbagai macam ide, aksi maupun inovasi saling dibenturkan sehingga muncul pembaruan dan *upgrade* terhadap kapital budaya yang relevan dengan karier subkultural mereka. Dari *nongkrong*, kaum muda juga secara sadar maupun tidak sadar melakukan proses penubuhan terkait dengan dimensi *tacit* dari kapital budaya. Proses penubuhan ini tidak hanya menjadi unsur distingsi, tetapi juga di masa depan menjadi semacam jejak perjuangan komunal yang pada titik-titik tertentu dapat muncul kembali dan bermanfaat bagi keberlanjutan karier subkultural mereka.

Selain kapital budaya, kapital sosial juga krusial dimiliki, dikembangkan, dan dirawat oleh kaum muda. Dalam karier subkultural, *nongkrong* juga menjadi titik masuk dan strategi yang penting dalam membangun dan merajut kapital sosial. Perjumpaan, interaksi, dan komunikasi yang intens serta beriringan dengan pembentukan kapital budaya menjadi proses yang krusial dalam menentukan ketebalan serta keberlanjutan dari kapital sosial. Dengan kata lain, saya ingin menekankan bahwa bukan semata-mata logika konversi dalam memperlakukan kapital sosial, tetapi justru dimensi solidaritas menjadi lebih penting dalam menentukan *endurance* dari kapital tersebut. Pada titik-titik tertentu, dimensi solidaritas pada kapital sosial muncul dalam momentum kritis karier subkultural kaum muda, dan sering kali berlaku menjadi semacam jaring pengaman sosial.

Perkembangan teknologi digital pada titik tertentu terutama bagi kaum muda yang mampu mengaksesnya juga membantu dalam memfasilitasi proses akumulasi kapital budaya dan kapital sosial. Dalam hal ini, sumber informasi dan pengetahuan yang relevan dengan karier subkultural telah melimpah ruah ditawarkan dalam berbagai platform; tinggal bagaimana kaum muda secara refleksif memanfaatkannya. Tidak hanya itu, teknologi digital juga dalam taraf tertentu memfasilitasi kemungkinan-kemungkinan memperluas dan mengembangkan jaringan sosial yang bersifat lintas bangsa. Dalam karier subkultural, hal ini dapat menjadi salah satu pintu masuk untuk mencapai *progress* maupun merentangkan keberlanjutan dalam karier mereka. Sekali lagi dengan syarat bahwa kaum muda mampu secara refleksif mendayagunakan potensi kedua kapital tersebut.

Salah satu ruang dan opsi alternatif bagi kaum muda adalah dengan menciptakan, membangun, dan merawat karier subkultural mereka sendiri dengan mengandalkan potensi kapasitas kultural dan jaringan sosial dalam berbagai level.

Lalu, di mana dimensi resistansi dalam karier subkultural? Dalam riset yang saya lakukan terhadap musisi dan pekerja kreatif muda, dimensi resistansi dapat dijelaskan bahwa memilih karier yang berbeda dengan tuntutan masyarakat itu sendiri sudah terkandung unsur resistansi. Dalam hal ini, nilai resistansi termanifestasi dalam keteguhan menghadapi tekanan struktural dan kultural yang bertubi baik berupa ketidakpastian penghasilan, kerapuhan status sosial, hingga ketidakpastian masa depan demi mempertahankan minat dan *passion*. Dengan kata lain, tidak takluk pada tuntutan pihak di luar dirinya dalam menentukan nasib menjadi nilai resistansi dalam karier subkultural. Dalam kasus lain, misalnya pada kelompok subkultur metal, nilai resistansi termanifestasi dalam upaya mereka untuk merawat tiga nilai penting yaitu otentisitas, kemandirian, dan komunitas. Ketiganya lebih bermakna dibandingkan dengan berbagai macam tipu muslihat kemapanan yang ditawarkan oleh berbagai macam institusi di masyarakat.

Dalam era neoliberal kontemporer, masyarakat mengharapkan negara hadir dan memberikan jaminan kesejahteraan bagi kaum muda mungkin bukan menjadi mimpi yang realistis. Salah satu ruang dan opsi alternatif bagi kaum muda adalah dengan menciptakan, membangun, dan merawat karier subkultural mereka sendiri dengan mengandalkan potensi kapasitas kultural dan jaringan sosial dalam berbagai level. Jika sering kali muncul pernyataan bahwa yang tersisa dari kaum muda adalah idealisme, maka mengapa tidak idealisme tersebut dirawat dan dijadikan sebagai modal berharga dalam menciptakan karier yang sesuai dengan minat dan *passion* mereka sendiri. Di sinilah resistansi akan terus hidup dalam berbagai lintasan temporal, spasial, dan daur hidup karier subkultural kaum muda.

Profil Singkat
Oki Rahadianto Sutopo adalah dosen di Departemen Sosiologi dan Direktur eksekutif pada Youth Studies Centre (YouSure) Fisipol UGM. Minat risetnya berkaitan dengan studi kepemudaan, kajian budaya, dan sosiologi pengetahuan. Karya ilmiahnya telah diterbitkan di berbagai jurnal internasional.

© Elsya/BAL

Semua Adalah Pakar: Dalam "Matinya Kepakaran" Karya Tom Nichols

Saat sikap sinisme dan antiintelektual terhadap pakar memenuhi diskursus publik, di situlah pakar lenyap

Judul Buku
Matinya Kepakaran

Penulis
Tom Nichols

Penerbit
Kepustakaan Populer Gramedia

Tahun Terbit
Cetakan keempat, Februari 2020

Jumlah Halaman
xviii + 293 hlm

"Keadaan sekarang hampir seperti evolusi terbalik: kita menjauhi pengetahuan yang teruji dan mundur menuju legenda dan mitos yang disampaikan dari mulut ke mulut. Hanya sekarang semua itu dikirimkan melalui alat elektronik" –Tom Nichols

Perkembangan teknologi informasi dan keberadaan internet tidak lagi menjadi sarana demokrasi informasi, tetapi akan menjadi kemunduran dalam ilmu pengetahuan di mana masyarakat sudah tidak lagi meragukan segala informasi yang diterima. Kemajuan ilmu pengetahuan yang telah dikembangkan oleh banyak ahli menjadi terancam akibat kemunculan masyarakat yang menolak pengetahuan yang sudah mapan dalam ruang publik. Masyarakat menjadi kritis bukan atas dasar fakta, melainkan atas dasar keyakinan secara personal. Kemunculan fenomena masyarakat yang menolak sains dan rasionalitas menyadarkan Tom Nichols, seorang profesor keamanan nasional di US Naval War College, bahwa pada saat ini realitas tersebut telah menjadi dasar peradaban masyarakat saat ini.

Kemunculan Orang-Orang Awam Serba Tahu

Kematian pakar berakar dari masalah ketidakpedulian terhadap ilmu pengetahuan yang telah mapan. Dalam konteks ini, manusia memiliki kecenderungan alami untuk mencari bukti atas argumentasi yang dipercayai, tidak terkecuali para pakar atau ahli. Naluri alami ini membuat satu sama lain, baik dari kalangan pakar maupun orang awam serba tahu, akan mempertahankan argumen masing-masing. Orang awam serba tahu lantas akan melakukan tindakan preventif dengan melebih-lebihkan kemampuan mereka sebagai upaya untuk mempertahankan argumen.

Internet digunakan secara tidak terbatas oleh waktu, tempat, dan subjek yang berperan sebagai *user*. Internet memberikan akses terbuka untuk dapat melakukan penelusuran sebebas mungkin yang lantas sering kali disalahartikan orang awam di internet sebagai penelitian. Penelusuran bebas tanpa mengetahui cara mencari informasi yang benar dapat

menyebabkan terdampak Efek Dunning Kruger. Efek Dunning Kruger adalah kondisi di mana orang merasa dirinya lebih tahu banyak dari apa yang benar-benar mereka ketahui. Akibat dari efek ini, sikap arogan untuk memenangkan argumen menjamur di kalangan orang-orang awam yang hanya melakukan penelusuran berjam-jam di depan layar perangkat pribadi mereka. Efek ini berimplikasi terhadap bias informasi yang menjadi penghalang untuk mencapai pembicaraan yang efektif. Nichols memberi contoh pada bukunya, seperti meluasnya masyarakat yang menolak vaksin setelah terpapar ragam situs informasi yang tidak terjamin kredibilitasnya. Masyarakat lantas meresponsnya dengan menolak pengobatan modern sebagai solusi penyembuhan penyakit.

Tumbuhnya Sikap Sinisme dan Masyarakat AntiIntelektual

Perkembangan munculnya orang awam serba tahu dengan sikap sinis hingga antiintelektual terhadap para pakar diperparah dengan telah bergesernya makna perguruan tinggi dan peran media massa saat ini. Keberadaan perguruan tinggi yang seharusnya menghindarkan masyarakat dari kepercayaan bahwa setiap orang memiliki kecerdasan yang sama malah memberikan efek sebaliknya. Orang-orang yang telah menghadiri perguruan tinggi merasa mereka adalah sarjana yang terdidik dan merasa telah menjadi seorang ahli yang berhasil; mereka percaya bahwa mereka mengetahui lebih banyak daripada apa yang sebenarnya mereka lakukan. Peran media massa pada zaman kontemporer juga memperparah sikap antiintelektual atau kebencian masyarakat awam terhadap para pakar. Nichols menyatakan bahwa jurnalisme kontemporer saat ini sudah bersentuhan dengan kapitalisme. Akibatnya, media-media baru dalam pasar jurnalis lebih tertarik untuk mendapatkan laba dengan membuat topik bacaan yang menarik bagi pengunjung portal berita mereka daripada memberikan dan menyiarkan berita dengan fakta yang perlu masyarakat ketahui.

Pakar Juga Bisa Salah

Nichols juga memaparkan kesalahan-kesalahan yang terjadi di antara para pakar. Kesalahan para pakar terbagi menjadi empat. *Pertama*, kegagalan biasa pada sains. Kesalahan berupa proses dalam pengujian dalam sains yang dapat menjadi benar ataupun salah. *Kedua*, saat ahli melakukan kesalahan dalam melebarkan sayapnya ke bidang lain. Pada kesalahan ini, para ahli merasa diri mereka lebih cerdas dalam segala hal hanya karena mereka lebih cerdas dalam hal-hal tertentu. *Ketiga*, ahli selalu berusaha memberikan prediksi. Pada dasarnya, pakar bukanlah orang yang pandai membuat prediksi, tetapi publik selalu menginginkan pakar membuat prediksi tersebut. *Terakhir*, perilaku penipuan dan penyimpangan di antara para pakar. Penipuan di dalam bidang kepakaran dapat berupa memalsukan penelitian atau temuan mereka hingga berbohong mengenai sertifikat atau izin praktik mereka. Hal inilah yang membuat pakar sering diskreditkan hingga tumbuhnya sikap sinisme dan antiintelektual di masyarakat. Meskipun pakar tidak dapat luput dari kesalahan, kemampuan pakar tidak bisa disamakan dengan orang awam yang hanya bermodalkan kemampuan mencari kata kunci di mesin pencari.

Buku ini banyak membahas permasalahan masyarakat kontemporer yang menarik. Nichols menuliskan buku ini secara baik dengan bahasa yang dapat mudah dimengerti oleh pembaca. Ia memaparkan realitas masyarakat era *post-truth* saat ini yang merasa dirinya sudah tahu segalanya dan mulai tidak mempercayai para pakar berkat teknologi informasi yang semakin cepat dan tidak terbatas. Nichols mampu memberikan gambaran umum bagaimana sikap sinisme dan antiintelektual terhadap para pakar dapat memperburuk demokrasi di dalam publik hingga di masa mendatang. Hal ini sebagaimana yang ditulis oleh Nichols di dalam kesimpulannya, "Kematian kepakaran dan serangan terhadap pengetahuan nyatanya memang merusak sistem pemerintahan republik" (hal. 276)—di mana demokrasi sebagai bentuk komunikasi antara masyarakat dengan perwakilan mereka di pemerintahan.

Sayangnya, di dalam buku ini gaya pembahasan Nichols dalam menulis seakan-akan menuduh masyarakat awam sebagai golongan yang bodoh. Argumentasi dalam bagian kesimpulan di buku sangat terasa bahwa Nichols memang menyalahkan orang awam atas sikap antiintelektual yang terjadi dalam masyarakat demokrasi: "Orang awam harus lebih bertanggung jawab terhadap pengetahuan atau kekurangan pengetahuan mereka sendiri. Tak usah beralasan bahwa dunia terlalu rumit, sumber informasi terlalu banyak, dan meratapi bahwa kebijakan berada di tangan pakar tak dikenal yang tidak menghargai pandangan publik" (hal. 250). Dia menggambarkan bahwa orang awam berada dalam golongan terendah dalam hierarki masyarakat demokrasi yang terdiri dari pemimpin negara dan pemerintah, para ahli, dan orang awam.

Tom Nichols, melalui buku *Matinya Kepakaran* ini menjelaskan tentang sikap antiintelektual dan sinisme terhadap para pakar yang dianggap dapat memperburuk makna demokrasi di dalam masyarakat itu sendiri. Kemajuan teknologi dan internet serta inklusivitas pendidikan tinggi menyebabkan masyarakat dalam negara demokratis semakin gigih dalam menuntut kesetaraan termasuk dalam kesetaraan mengutarakan pendapat. Kesetaraan ini lantas menjadi pemicu publik untuk memberi dan menyerap informasi secara tidak terbatas dan menjadi penyebab munculnya fenomena masyarakat yang menolak sains dan rasionalitas. Kematian pakar tidak semata-mata terjadi karena kompleksitas relasi antara pakar dan pemerintah dalam merumuskan kebijakan publik. Ruang publik memiliki peran yang lebih besar dalam bersikap objektif, menghindari bias informasi, dan menerima masukan pakar secara sukarela. **[Elsya, Rania]**

Birokrasi Melambankan Penanganan Kekerasan Seksual di UGM
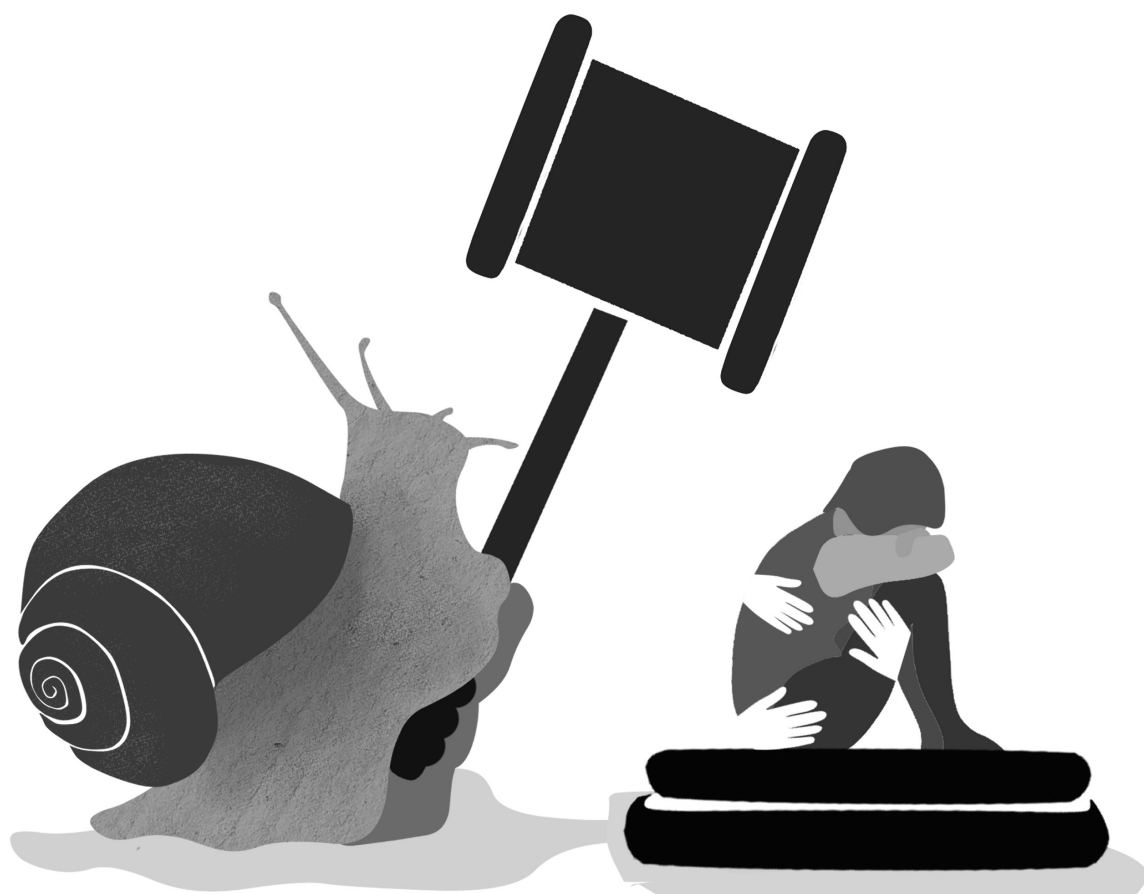
©Rona/Bal

Pencegahan dan penanganan kekerasan seksual masih menjadi tantangan bagi UGM. Terbaru, Rektorat UGM mengeluarkan Peraturan Rektor terkait kekerasan seksual dan ULT khusus penanganan kekerasan seksual. Namun, keberadaannya masih menemukan hambatan di lapangan.

Terungkapnya Kasus Agni yang terjadi di Universitas Gadjah Mada (UGM) pada tahun 2018 menjadi katalis pergerakan penumpasan berbagai bentuk kekerasan seksual di kampus. Media seperti The Jakarta Post, VICE Indonesia, dan Tirto.id sempat melakukan kolaborasi bertajuk #NamaBaikKampus untuk mengungkap tindak kekerasan seksual di kampus. Kolaborasi tersebut membuahkan hasil dengan ditemukannya kasus-kasus serupa di kampus lain.

Dalam rangka memahami penyebab maraknya kekerasan seksual, Wening Udasmoro, Dekan Fakultas Ilmu Budaya UGM, menjelaskan bahwa sejatinya kekerasan seksual di lingkungan kampus tidak lepas dari belenggu maskulinitas beracun (*toxic masculinity*) yang berkembang luas di masyarakat. Ia menyampaikan, dalam perkembangan sejarah, nilai-nilai maskulinitas tersebut kerap diasosiasikan dengan sifat-sifat kekerasan, kebrutalan, ataupun keberanian. “Misalnya, cerita rakyat atau wacana agama yang sering menceritakan peperangan atau narasi penguasaan dengan kekerasan,” jelas Wening.

Wening menambahkan bahwa narasi-narasi kekerasan juga sering dimanifestasikan dalam bentuk kekerasan fisik, verbal, dan seksual. Parahnya, menurut Wening, manifestasi nilai-nilai maskulinitas beracun tersebut sering diamini oleh sistem budaya, sosial, dan politik saat ini. Ia menyampaikan, kemungkinan dahulu masyarakat lebih memilih bungkam karena kasus kekerasan seksual masih dianggap sebagai aib yang harus ditutupi. "Kalau sekarang, masyarakat lebih berani untuk melaporkan kasus-kasus tersebut berkat perkembangan informasi dan pemikiran," imbuh Wening.

Anggapan bahwa kasus kekerasan seksual adalah aib sehingga harus ditutup-tutupi dapat dimengerti lewat penjelasan Sri Wiyanti Eddyono, Dosen Fakultas Hukum UGM. Iyik, begitu sapaan akrabnya, menjelaskan bahwa tindak kekerasan seksual kerap dipengaruhi oleh relasi kuasa yang tidak seimbang. Ia mencontohkan relasi timpang antara dosen dan mahasiswa, kiai dan santri, atasan dan bawahan, ataupun ketimpangan gender antara laki-laki dan perempuan.

"Karena yang satu seakan memiliki otoritas lebih tinggi, maka bentuk kekerasan yang merendahkan individu lain sangat mungkin terjadi," jelas Iyik.

Dalam lingkup UGM, penyebab kekerasan seksual yang dijelaskan Iyik tampaknya benar ada. Tulisan The Jakarta Post (02-06-2016) berjudul "Sexually Harassed and Abused on Campus" mengekspos tindak kekerasan seksual akibat adanya ketimpangan kuasa. Dalam tulisan tersebut, Maria (bukan nama asli) dilecehkan oleh salah satu dosen di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIPOL) UGM yang berinisial EH pada 2015. Hasil investigasi tersebut memperkuat pendapat Iyik bahwa kekerasan seksual sangat mungkin terjadi karena adanya ketimpangan kuasa.

Serangkaian peristiwa tersebut, mulai dari kasus Maria hingga kasus Agni, sepertinya cukup untuk membuat mahasiswa UGM muak dan lekas mengambil tindakan. Dilansir dari Tirto.id (19-12-2019), puluhan mahasiswa UGM menggelar aksi tuntutan agar rancangan Peraturan Rektor (Pertor) tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual segera disahkan. Tuntutan tersebut mendapat jawaban dari pihak Rektorat UGM.

Pada 24 Januari 2020, UGM mengesahkan Pertor Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual. Namun, dilansir dari Balairungpress (23-09-2020), terdapat ketidaksamaan draf peraturan dengan Pertor yang ditetapkan. Ketidaksamaan ini merujuk pada penghilangan pasal terkait pengarusutamaan gender dan pembentukan *gender focal point*.

Perihal pengarusutamaan gender, Wening menyampaikan bahwa prinsip ini berfungsi agar pemahaman terhadap keadilan gender dapat masuk dalam setiap pola kehidupan masyarakat. Sayangnya, menurut Iyik, baik prinsip tersebut maupun rencana pembentukan *gender focal point* tidak berhasil direalisasikan. Hal ini disebabkan penyusunan kebijakan kerap dipengaruhi oleh proses politik, negosiasi, dan kompromi.

Sebagai bagian dari tim perumus Pertor, dahulu, Iyik bersepakat bahwa *gender focal point* merupakan aspek penting yang perlu ada. Namun, ia memahami bahwa rencana kerap berkembang sehingga dimungkinkan adanya pergeseran ide. "Sekarang, memang belum ada pengarusutamaan gender ataupun *gender focal point*, tetapi sudah ada penekanan diskusi kekerasan seksual di fakultas-fakultas," imbuh Iyik.

Kendati demikian, salah satu fakultas yang memiliki unit khusus penanganan kekerasan seksual adalah FISIPOL. Pada Februari 2021, FISIPOL meresmikan FISIPOL Crisis Center (FCC). Berdasarkan penjelasan Arie Eka Junia, pegawai FCC, pendirian lembaga ini bertujuan untuk memberikan penanganan, pemulihan, sosialisasi, dan edukasi terkait kekerasan seksual di lingkup FISIPOL.

Secara sederhana, Arie menjelaskan bahwa alur penanganan tindak kekerasan seksual di FCC dimulai ketika penyintas melaporkan tindak kekerasan seksual kepada pihak FCC. Kemudian, penyintas akan dihubungkan dengan pihak konselor. Berikutnya, konselor akan membuat laporan dokumentasi kasus berdasarkan penjelasan penyintas. Laporan ini akan diserahkan kepada pihak dekanat. Kemudian, pihak dekanat akan melakukan musyawarah putusan dan hasil putusan tersebut diberikan pada pelaku. Namun, Arie mengakui bahwa birokrasi ini masih cenderung lamban dan panjang. Menurutnya, hal ini disebabkan oleh usia FCC yang masih seumur biji jagung. "Karena perlu melakukan banyak koordinasi dengan berbagai pihak, makanya belum tercipta penanganan jalur cepat di FCC," jelas Arie.

Berdasarkan survei Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa (BEM KM) UGM pada April 2021, 124 dari 592 responden menginginkan adanya unit pelayanan dan pencegahan kekerasan seksual khusus di tingkat fakultas. Selain itu, tercatat hanya 8 dari 18 fakultas di UGM yang dinilai oleh mahasiswa serius dalam menangani perkara kekerasan seksual. Fakultas-fakultas tersebut, meliputi FISIPOL; Fakultas Psikologi; Fakultas Ilmu Budaya; Fakultas Hukum; Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan; Fakultas Pertanian; Fakultas Peternakan; dan Fakultas Kedokteran Gigi.

Sebenarnya, pada tingkat universitas, UGM telah memiliki Unit Layanan Terpadu (ULT) khusus dalam menangani permasalahan kekerasan seksual di lingkungan kampus. Sayangnya, survei BEM KM UGM menunjukkan lebih dari separuh responden tidak mengetahui keberadaan ULT tersebut dan tidak mengetahui alur pelaporan serta layanan pengaduan yang disediakan. Kesimpulan Tim Riset BEM KM UGM menyatakan bahwa sosialisasi mengenai keberadaan ULT dan proses pencegahan kekerasan seksual di kampus masih belum maksimal.

Menanggapi hasil survei tersebut, Iyik merekomendasikan agar proses sosialisasi dilakukan oleh banyak kaki. Dalam hal ini, yang dimaksud Iyik adalah adanya optimalisasi peran setiap fakultas dalam memberikan pemahaman kepada mahasiswa mengenai alur penanganan dan pencegahan kekerasan seksual. "Jadi, optimalisasi dapat dilakukan dengan memasukkan bahasan gender ke dalam materi-materi perkuliahan," tegasnya. **[Hanif, Nabila, Farah]**

© Ingga/BAL

Politisasi Riset dalam Bayang-Bayang Ideologi

Sejarah ilmu pengetahuan adalah riwayat tentang pencarian yang tak pernah berujung. Bagi seorang ilmuwan atau peneliti, setiap tindak merumuskan hipotesis, bereksperimen, dan mengolah data yang diperoleh niscaya memiliki tujuan, meski tak pernah jelas—dengan kata lain, ada yang senantiasa tertunda, dan hal tersebut tak lain adalah kepastian. Penundaan atas kepastian itulah yang menjadi kunci bagi kekuatan ilmu pengetahuan, dan hal ini sebagaimana diungkapkan Otto Neurath (1983, hal.92) dalam metaforanya yang termasyhur: "Kita layaknya pelaut yang harus membangun kembali kapalnya di laut lepas, tanpa pernah bisa membongkarnya di dermaga yang kering dan mendirikannya kembali dari komponen terbaiknya." Aktivitas keilmuan, dengan kata lain, adalah sebuah pelayaran yang tak berkesudahan. Namun tentu saja, pelayaran tersebut tidaklah bebas dari berbagai hambatan.

Pada April lalu, pemerintah telah resmi menunjuk Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) sekaligus Ketua Dewan Pengarah Badan Pembina Ideologi Pancasila (BPIP), sebagai Ketua Dewan Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Keputusan ini tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) No. 33 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) sebagai bagian dari reformasi kelembagaan badan-badan riset nasional. Peristiwa pengangkatan sosok Megawati ini bertentangan dengan Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (SISNAS IPTEK), yang tidak mengamanatkan kehadiran Dewan Pengarah di dalam struktur kelembagaan BRIN, apalagi mengingat Megawati tengah aktif memegang dua jabatan sekaligus, yang tentunya semakin membuka lebar peluang penyalahgunaan kekuasaan pada bidang riset di bawah BRIN. Keputusan yang gegabah ini berisiko besar untuk dapat menghilangkan otonomi BRIN sebagai lembaga riset ilmu pengetahuan, sehingga agenda riset menjadi tidak lagi bersifat objektif dan rawan diintervensi oleh kepentingan politis. Sejumlah pihak yang mendukung keputusan pengangkatan ini menyatakan bahwa keputusan tersebut sudah sangat tepat dan strategis dengan menempatkan agenda riset dan inovasi di bawah terang ideologi Pancasila. Sekretaris Jendral PDIP Hasto Kristiyanto mengungkapkan bahwa gagasan ini telah lama dicetuskan oleh Megawati sejak 2014 lalu sebagai bagian dari kepentingan bangsa dan negara untuk berdikari (Amirullah, 2021). Namun, memahami terang persoalan ini sebatas dari pernyatan-pernyatan aktor-aktor politik tidaklah banyak membantu, dan oleh karena itu memahami politik dan yang-politis secara fundamental menjadi perlu.

Dalam pengertian tradisional, politik telah umum dipahami sebagai perkara seluruh aspek kekuasaan yang menubuh dan mengejawantah dalam berbagai aspek sosial, legal, dan kultural dari kenyataan, seperti negara, institusi pemerintah, pengambilan keputusan, kebijakan, dsb. Akan tetapi, pendefinisian ini masihlah terlalu sempit oleh karena tidak mencakup kasus-kasus hipotetis, seperti: apakah suatu masyarakat tanpa negara tidak memiliki politik? Bagaimana dengan suatu negara dengan model perangkat serta tata pemerintahan yang berbeda dengan negara modern? Dan lain sebagainya. Oleh karena itu, kita dapat mereduksi pengertian politik pada tataran yang paling elementer sebagai "perkara hubungan sosial" (Suryajaya, 2017, hal. 3), dengan kekuasaan (*power*) sebagai konsep kuncinya. Dengan kata lain, segala persoalan yang mencakup hubungan lebih dari satu orang tak elak memiliki dimensi politis—tak terkecuali dalam persoalan pengangkatan Ketua Dewan Pengarah BRIN ini, meski kita tentu saja dapat berspekulasi tentang kepentingan politiko-ideologis macam apa yang bersembunyi di balik keputusan tersebut. Namun, bagaimana sesungguhnya hubungan antara politik dan ilmu pengetahuan?

Peran politik memang telah lama menjadi topik perdebatan di berbagai bidang, seperti filsafat, pendidikan, metodologi, dan sosiologi pengetahuan. Fenomena potensi politisasi riset dalam struktur kelembagaan BRIN ini membuka perdebatan menyejarah tentang sejauh mana agenda riset sains dan teknologi bersinggungan dengan pemerintah berikut kepentingan yang bersembunyi di baliknya. Kita dapat melihat semisal dalam kasus "Lysenkoisme" yang terkenal di Rusia, Uni Soviet (Graham, 1993, hal. 121-134), tatkala seorang agronomis bernama Trofim Lysenko yang menentang prinsip seleksi alam dan genetika Mendelian justru mendapatkan panggung oleh karena dukungan politis Josef Stalin, pemimpin Negeri Beruang Merah kala itu. Bagi Lysenko, kecenderungan mutasi acak pada diri individu dalam genetika Mendelian dipandang memiliki tendensi terhadap nilai-nilai individual-liberalistik dan bertentangan dengan nilai-nilai kolektivis sebagaimana pandangan ideologi Marxisme-Leninisme, membuat prinsip pewarisan tersebut dituduh sebagai "pseudosains borjuasi"—sains gadungan yang dipandang sarat akan pengaruh dan kepentingan kelas pemilik modal dalam struktur teoretisnya. Lysenko dianugerahi kehormatan dan jabatan prestisius dalam skena akademik Soviet seiring dengan pelarangan dan kriminalisasi yang dilakukan oleh pemerintah Moskow terhadap pihak-pihak yang menentang pandangan Lysenko—membuat riset di bidang genetika dan praktik agrikultur Soviet mengalami kemunduran, di saat hasil panen maupun temuan-temuan

keilmuan baru pada bidang-bidang yang sama di negara-negara blok Barat semakin mengalami peningkatan.

Di lain kesempatan, tatkala para ilmuwan terkemuka Jerman memprotes dampak dari kebijakan pengusiran para ilmuwan Yahudi oleh pemerintah partai Nazi, yang mengakibatkan kemunduran pada bidang riset dan perkembangan sains dan teknologi nasional, Hitler pun merespons, "Apabila pengusiran para ilmuwan Yahudi berujung pada kehancuran ilmu pengetahuan Jerman kontemporer, maka kita akan bertindak tanpa ilmu pengetahuan selama beberapa tahun kedepan" (Hartshorne dalam Beyerchen, 1992, hal. 618). Jerat benang kusut ideologi pada bidang riset bahkan bisa jauh lebih mendalam daripada yang dapat kita bayangkan, membentuk kompleksitas tersendiri dalam kaitannya dengan intervensi politik, spesifiknya melalui laku politisasi.

Palonen (2003, hal. 171) memberikan terang pengertian politisasi sebagai "pembukaan suatu hal sebagai yang-politis atau 'dapat-dipermainkan'", dan dengan demikian menjadikan hal tersebut—dalam konteks pembahasan ini yakni aktivitas riset—sebagai medan operasi kekuasaan (*power struggle*). Dalam konteks ancaman terhadap agenda riset yang tengah dihadapi oleh BRIN, proses politisasi tersebut dapat termanifestasi melalui tindak manipulasi secara konstruktif maupun disruptif yang tertuju pada berbagai aspek dalam aktivitas riset, meliputi rumusan persoalan, data dan hasil riset, maupun subjek pelaku (peneliti). Lebih spesifik lagi, dalam proses riset, isu-isu menjadi permainan politis tatkala pihak atau kelompok berkepentingan melakukan intervensi, melalui penolakan maupun pengarahan atas temuan yang telah diperoleh pada tataran empiris, maupun melalui penentangan atas suatu perspektif keilmuan pada tataran teoretis. Intervensi politis ini dapat kemudian menciptakan basis legitimasi ilmiah bagi suatu tujuan atau cita-cita yang telah ditentukan oleh elit politik, yang diarahkan pada masyarakat luas—terutama dari kalangan awam—untuk menciptakan dukungan populer terhadap suatu kebijakan. Sebaliknya, agenda-agenda riset yang tidak sesuai atau bahkan bertentangan dengan agenda politik atau haluan ideologi elit politik akan mendapat hambatan, seperti pengurangan alokasi dana, deprioritisasi agenda riset, bahkan kriminalisasi ataupun pengucilan subjek peneliti.

Terkait persinggungan antara agenda politik dan riset, kita sering kali dihadapkan pada pandangan yang bertentangan antara peneliti dan politisi mengenai pengertian fundamental dari "ilmu pengetahuan yang baik". Operasi kekuasaan—baik secara disadari (melalui intervensi politis dari pihak-pihak berkepentingan) maupun tidak disadari (melalui proses normalisasi nilai-nilai politis)—berpotensi untuk menggeser lokus bagi penentuan standar kualitas ilmu pengetahuan bukan pada tataran saintifik (pertanggungjawaban metodologi, konsep, dan penalaran), melainkan pada tataran ekstra-saintifik (kepentingan pembangunan, promosi ideologi, kesesuaian dengan kebijakan pemerintah, dsb). Dengan kata lain, suatu teori atau hasil riset yang memiliki kualitas data, prosedur penelitian, atau penyimpulan yang buruk dapat tetap mendapat dukungan atau dianggap 'baik' oleh karena sesuai dengan kepentingan politis pihak-pihak berkepentingan—yang dalam terang isu ini tidak lain adalah para pemangku kebijakan.

Untuk menjawab kemelut standarisasi ini, adalah perlu untuk mengajukan pendekatan yang tepat. Sebagaimana proses pemaknaan atas suatu fakta membutuhkan gerak abstraksi pikiran dari tingkatan empiris menuju tingkatan teoretis, maka perumusan standar atas proses pemaknaan yang baik terhadap fakta tersebut—dengan kata lain, standar teori yang baik—perlu melakukan gerak melampaui tingkatan teoretis tersebut. Tingkatan tersebut adalah tingkatan meta-teoretis atau meta-sains (Neufeld, 1993, hal. 54). Meta-sains, yang secara harfiah berarti 'melampaui', 'di atas', atau 'pada-tingkatan yang lebih tinggi' dari sains (Oxford English Dictionary), adalah kajian yang menempatkan sains itu sendiri sebagai objeknya. Pendekatan ini, maka dari itu, adalah sebuah upaya untuk menjawab pertanyaan di muka pertama-pertama dan terutama secara intra-teoretis (melalui meta-sains) dan bukannya ekstra-teoretis (melalui pertimbangan pembangunan, keamanan dan ketertiban, ideologi, dsb).

Dalam pendekatan meta-sains, setidaknya dapat disepakati bahwa, secara fundamental, aktivitas riset seorang peneliti niscaya melibatkan suatu komitmen ontologis terhadap kondisi kebenaran kebenaran (*truth condition*) segala entitas yang ia selidiki (Rayo, 2007, hal. 428)—bahwa seluruh entitas yang dinyatakan di dalam suatu kalimat atau teori adalah benar. Dalam menjalankan komitmen tersebut, objektivitas tak elak menjadi prasyarat bagi seorang peneliti dalam proses perumusan teori atau hasil risetnya. Sebab, dalam menjalankan aktivitas riset, adalah niscaya bagi para peneliti untuk memiliki cara pandang, praktik, dan perumusan hasil riset atau konstruksi teoretis yang beragam dan juga rawan terdistorsi. Tuntutan akan objektivitas bagi peneliti ditujukan supaya faktor-faktor ekstra-teoretis—seperti subjektivitas individu maupun agenda politik dari pihak atau kelompok berkepentingan—maupun intra-teoretis—seperti ambiguitas struktur linguistik, kesalahan alih bahasa, dsb— tidak mendorong suatu teori atau hasil riset untuk mengingkari komitmen terhadap kondisi kebenarannya, dan begitu pula terhadap kredibilitas dari keseluruhan teori atau temuan hasil riset sang peneliti.

Selain itu, terkait dengan komitmen ontologis sang peneliti ini, Max Weber mengajukan gagasannya yang termasyhur mengenai "netralitas aksiologis" (*Wertfreiheit*), yang berfungsi untuk memperingatkan seorang peneliti atas dominasi nilai (*value*) yang ia miliki terhadap aktivitas keilmuan—bukan hanya karena tidak ada kepastian atas doktrin atau pandangan dunia yang bersifat final, melainkan juga karena setiap nilai niscaya melatari perolehan makna yang berbeda-beda atas dunia (Raphael, 1990, hal. 176). Dengan kata lain, oleh karena penyelidikan ilmiah atas dunia hanya dapat menangkap fakta atasnya secara parsial, netralitas aksiologis ditujukan untuk menghindarkan seorang peneliti dari tindak mereduksi dunia pada kategori-kategori teoretis atau konseptual—sesuatu hal yang nyaris bersifat niscaya melalui dorongan atau intervensi kepentingan politis.

Tuntutan netralitas dan objektivitas peneliti dalam sebuah lingkungan riset layaknya BRIN dapat menjadi kendala tersendiri, terlebih mengingat ancaman yang tengah dihadapi bersifat struktural dan terlembagakan oleh jejaring relasi kekuasaan elit-elit politik dan aktor-aktor korporat industri nasional. Sudah seharusnya bagi pemerintah untuk hendaknya menjauhkan kepentingan kelompok-kelompok berkepentingan—termasuk dirinya sendiri—dari riset sains dan teknologi. Dengan demikian, ilmu pengetahuan tidaklah perlu berakhir sebagai anjing penjaga kepentingan pemerintah, dan sebaliknya, justru dapat bersikap kritis terhadap kebijakan-kebijakan yang lemah secara basis ilmiah. Hal ini sebab, urusan yang menyangkut hajat hidup orang banyak tentu memerlukan basis ilmiah yang kredibel, yang dihasilkan melalui riset yang objektif dan bebas dari intervensi politis sebagaimana ia semestinya. Kapal yang kita kenal dengan sebutan ilmu pengetahuan pada akhirnya perlu untuk terus berlayar, setidaknya di bawah nakhoda BRIN. **[Penginterupsi]**

Kesadaran untuk Bertahan

Dalam salah satu arsip, diceritakan bahwa dua orang Pemimpin Majalah *Clapeyron*, jurusan Teknik Sipil, menghadap ke Teuku Jacob, Rektor UGM kala itu.[1] Keduanya bermaksud mengadakan pameran pers mahasiswa se-Indonesia. Namun, pembredelan Gelora Mahasiswa sebelumnya menyebabkan birokrasi tak mudah dilalui. Selain itu, UGM sendiri belum memiliki pers mahasiswa tingkat universitas. Kemudian niat awal membuat pameran pers mahasiswa, diubah menjadi mengadakan seminar pers mahasiswa tingkat UGM. Di akhir acara, disepakatilah pembentukan Tim Perumus yang selanjutnya menggagas persiapan penerbitan baru. Dari sinilah, tepatnya 29 Oktober 1985, sejarah Balairung dimulai.

Pada 8 Januari 1986, Balairung menerbitkan produk perdananya, yakni Majalah *Balairung*. Fahmi Sirma Pelu mencatat bahwa Balairung mulai menyajikan rubrik laporan jurnalistik bernama 'Berita Tema' pada 1989.[2] Seperti yang ditulis oleh Kurniawan pada edisi 10/1989: "Sejak edisi inilah dimunculkan rubrik Berita Tema yang sedikit banyak mengawali peralihan orientasi redaksionalnya, dan sejak edisi ini pula teknik *investigative reporting* dilakukan dan ditulis dengan gaya *feature*".[3] Semenjak itu, Balairung mulai banyak menerbitkan laporan jurnalistik dengan tema-tema yang berhubungan dengan rezim, situasi politik nasional, dan gerakan mahasiswa.

Dua dekade kemudian, dinamika gerakan mahasiswa dan situasi dunia cukup berbeda. Sepanjang tahun 2020 berjalan, banyak hal mengejutkan terjadi. Mulai dari bencana alam, gejolak politik di berbagai negara, gerakan massa yang merespons berbagai isu kemanusiaan, hingga pandemi COVID-19 yang tak kunjung selesai. Sejak setahun terakhir, kata pandemi, kematian, adaptasi pun telah lalu-lalang di setiap diskusi dan tulisan di sekitar kita. Dalam setiap kesempatan, perbincangan kerap diselingi dengan pertanyaan: kapan pandemi ini selesai dan bagaimana cara untuk bangkit dari situasi ini?

Tahun lalu, saya berkesempatan menulis editorial di Jurnal Balairung yang mengangkat "Pandemi" sebagai bahasan utama. Dalam tulisan itu, saya berpendapat bahwa pandemi bukan hanya memunculkan masalah bagi manusia, melainkan memperlihatkan masalah yang sebenarnya ada di sekitar manusia.[4] Sebab, bagi saya, rententan kekacauan yang muncul ini bukan hanya karena virus semata. Akan tetapi, kegagalan manusia dalam merumuskan sistem mitigasi yang tepat juga memperkeruh keadaan saat pandemi melanda. Semua lini kehidupan manusia berikut aktivitasnya pun menjadi terkendala. Mulai dari kesehatan, ekonomi, sosial budaya, agama, pendidikan, hingga kegiatan mahasiswa di kampus. Tak terkecuali kegiatan pers mahasiswa.

Lalu, di tengah hiruk-pikuk situasi pandemi. Di tengah situasi Indonesia yang tak menentu dan cenderung ke arah kacau. Di tengah demokrasi Indonesia yang dinilai telah mundur teratur. Bagaimana kondisi pers mahasiswa saat ini?

Rasanya, pers mahasiswa di tiap generasi selalu memiliki kendalanya sendiri. Sebut saja kendala waktu, amatirisme, dan pendanaan. Akibat dari kendala-kendala ini, ciri yang melekat pada pers mahasiswa adalah "diskontinuitas".[5] Terlihat dari produk yang terbit tidak beraturan, jumlah artikel yang pasang-surut, iklan yang tak kunjung terisi, produk yang menumpuk karena tidak didistribusikan, tanggungan produk dari periode sebelumnya, dan sebagainya. Hal-hal semacam itulah yang terjadi di dapur pers mahasiswa setiap tahunnya yang secara tidak langsung mengganggu produktivitasnya sendiri.

Di tengah kendala dan kesibukan anggotanya, Balairung mencoba untuk terus menelurkan wacana kritis dan melahirkan produk berkualitas tiap

tahunnya. Dalam usahanya itu, Balairung meleburkan sekat-sekat disiplin studi dan berpegang teguh pada tugas intelektual agar tak terbuai dengan iming-iming karier atau kultus individu lainnya. Ikhtiar itu terus dilangsungkan selama bertahun-tahun hingga di usianya yang menjelang 36 tahun.

Sialnya, atau apa pun kata yang tepat, datangnya pandemi menambah beban kerja Balairung. Kegiatan-kegiatan lembaga terpaksa dialihkan ke daring. Pengalaman dasar, seperti turun lapangan, tidak dapat dilakukan. Ancaman penyakit pun tak bisa disepelekan. Terlebih lagi, muncul tren magang dan kerja paruh-waktu di awal semester sebagai imbas dari kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka, yang membuat kegiatan pers mahasiswa kurang diminati lagi oleh anggotanya.

Dengan kendala dan kondisi yang demikian, apakah Balairung sebagai pers mahasiswa masih mampu menerbitkan produk-produknya?

Sebagai salah satu pers mahasiswa dengan sejarah yang panjang, Balairung memilih untuk tetap konsisten menerbitkan produk-produknya. Tahun lalu, di tengah pandemi, Balairung tetap aktif menghidupi situsnya, yakni balairungpress.com. Meski dengan ruang gerak yang terbatas, Balairung tetap menjalankan perannya sebagai pers komunitas yang ada di lingkup kampus. Tampak dari beberapa artikel yang disajikan. Contohnya adalah laporan utama yang menyoal efektivitas KKN daring.

Meski sempat vakum satu bulan, balairungpress.com terus menghadirkan berita dan artikel ilmiah yang digarap secara mendalam oleh anggotanya. Di satu sisi, ini menandakan bahwa ruang gerak kerja Balairung menjadi terbatas. Namun, di sisi lain ini juga menunjukkan Balairung mampu mengatasi kendala yang ada untuk terus membagikan informasi yang layak diketahui oleh publik. Misalnya, pada 8 Oktober 2020, bertepatan dengan aksi menolak UU Cipta Kerja, Balairung memberitakan dua aksi besar yang ada di yogyakarta dan Jakarta. Posisi Balairung jelas: berkomitmen terhadap kebenaran dan berpihak pada mereka yang tertindas–rakyat.

Selain balairungpress.com, Balairung juga menggarap tiga produk cetaknya, yaitu bunga rampai, jurnal, dan majalah. Masing-masing mengangkat topik yang berbeda, yakni manajemen air, pandemi, dan partai rakyat. Ketiganya dikerjakan dengan menjalankan perannya sebagai pers komunitas dan pers wacana.

Peran itu akan terus kami jalankan. Bersamaan dengan itu, kami juga berupaya meningkatkan kualitas dan mematangkan sisi manajerial yang mungkin kurang diperhatikan sebelumnya. Kami ingin memaksimalkan distribusi agar produk kami dibaca secara luas. Dalam prosesnya, kami akan menggandeng beberapa pihak, seperti jejaring pers mahasiswa, organisasi mahasiswa, LSM, institusi terkait, dan para mitra lainnya. Sebab, apa lah kami ini tanpa bantuan pihak-pihak lain, tanpa bantuan publik? Mungkin, tidak akan ada Balairung yang dikenal seperti sekarang ini, jika publik tidak terlibat dalam prosesnya.

Sebab, salah satu aspek penting yang saya yakini dari dunia penerbitan adalah pembaca. Maka dari itu, pers mahasiswa (Balairung) perlu memperhatikan pembaca. Jangan sampai punya pikiran: setelah menerbitkan produk itu berarti telah melaksanakan program kerja dan menjaga eksistensi lembaga. Jangan sampai proses penerbitan produk yang melelahkan itu hanya untuk kepuasan diri sendiri. Pemikiran pragmatis semacam ini menuntun pers mahasiswa menuju pengabaian terhadap tanggung jawab sosial pada pembaca.[6]

Pembaca punya posisi yang penting. Tujuan menulis setidaknya untuk dibaca. Sayangnya, sering kali pers mahasiswa tidak benar-benar berupaya membagikan produk tulisannya. Jadinya, produk mereka tidak dibaca oleh publik. Jangankan publik, sesama anggota pers mahasiswa saja belum tentu membaca tulisan temannya sendiri. Seperti yang saya sebutkan di atas, banyak produk yang dibiarkan menumpuk di gudang hanya karena tidak didistribusikan. Maka dari itu, kami berupaya secara serius mendistribusikan produk-produk kami.

Majalah *Balairung* edisi 57 yang sedang pembaca baca ini, merupakan bukti keseriusan kami dalam memproduksi dan mendistribusikan produk kami. Ada yang membaca dalam bentuk fisiknya, ada juga yang membaca melalui gawainya. Sejauh ini kami konsisten untuk menerbitkan produk cetak, meski biayanya cukup besar. Alasannya sederhana, kami sadar ada pembaca yang setia dengan produk cetak. Maka, biarkanlah Majalah *Balairung* menghampiri mereka untuk disentuh, dicoret, dipajang, maupun dibakar. Silakan saja.

Salah satu aspek penting yang saya yakini dari dunia penerbitan adalah pembaca. Maka dari itu, pers mahasiswa perlu memperhatikan pembaca.

Akan tetapi, kami juga sadar bahwa cukup banyak pembaca yang beralih ke platform digital. Kecepatan akses, fleksibilitas, dan sederhana menjadi faktor penyebab peralihan ini. Maka, dengan senang hati, kami menyajikan produk-produk kami dalam platform digital. Artikel reguler dan majalah dapat pembaca akses melalui balairungpress.com. Beberapa artikelnya telah kami alih bahasakan ke bahasa Inggris,[7] karena kami sadar bahwa cukup banyak pembaca yang lebih fasih berbahasa Inggris. Jurnal *Balairung* dapat diakses di jurnal.ugm.ac.id/balairung. Lalu, semua kabar terbaru mengenai artikel, produk, maupun kegiatan kami dapat dipantau melalui media sosial @bppmbalairung.

Berbicara mengenai pers mahasiswa memang tidak cukup hanya dari produknya. Sebab, ada banyak hal lain yang dilakukan oleh pers mahasiswa, misalnya diskusi kultural. Namun, produk yang sampai ke publik itulah cerminan sudut pandang pers mahasiswa dalam membaca zaman. Dan, inilah hasil pembacaan kami. Di tengah terjangan badai pandemi, di antara masalah-masalah yang lain, kami berupaya merumuskan cara untuk tetap bertahan. Pembacaan mendalam mengenai situasi dan kemampuan dibarengi kerja sama dengan berbagai pihak. Harapannya, gerak bersama ini mampu membuat kita bertahan dari segala terjangan yang menghampiri. Mari selesaikan masalah yang ada di sekitar kita secara bersama. Terakhir, saya kutipkan seruan yang ada di tembok rumah kami di B21: "Jangan takut, jangan khawatir!"– Haji Misbach. **[Penjaga Dapur]**

---

[1] Fitria Nurhayati, "Masa dan Keputusan yang Dibuat di Dalamnya," disampaikan dalam Diklat Umum *Open Recruitment* Awak Baru BPPM Balairung 2014 di Hall Teater Gadjah Mada.
[2] Fahmi Sirma Pelu, "Berlayar bersama Ombak, dari Orba sampai Wabah," *Bunga Rampai: Mengalir dari Manfaat sampai Sekelumit Masalah* (2020), hlm. 54-55.
[3] Kurniawan, "Membuka Jendela, Memanah Rembulan," Majalah Balairung Edisi 10/1989.
[4] M.R Akbar, "Respons Indonesia dalam Menghadapi Pandemi COVID-19," BALAIRUNG: *Jurnal Multidisipliner Mahasiswa Indonesia*, Vol. 2 No. 2, (Yogyakarta: Balairung), hlm. 122-129.
[5] Satrio Arismunandar, "Sejarah dan Fenomena Pers Mahasiswa," https://www.academia.edu/4979961/Sejarah_dan_Fenomena_Pers_Mahasiswa diakses pada 1 Juli 2021.
[6] Elyvia Inayah, *Melawan dari dalam: pers mahasiswa Malang pasca-reformasi*, (Yogyakarta: I:boekoe, 2018), hlm 238.
[7] Please visit our English version: balairungpress.com/en/

Pendidikan Pers Se-Indonesia yang dilaksanakan di Yogyakarta, 27-29 Agustus 1987

MIMPI ATAU GAJI?
SEBUAH KOMIK
SEJAK KECIL AKU IKUT TANTE DI KOTA, SEKARANG SAATNYA UNTUK KEMBALI DAN MENGABDIKAN DIRIKU DEMI PENDIDIKAN ANAK-ANAK DI DESA
YOSH, SEBENTAR LAGI AKU LULUS!
KARENA ITU ADALAH MIMPIKU!
TAP...
TAP...
TAP...
ALI AYO IKUT BAPAK, ADA YANG INGIN BAPAK TUNJUKKAN
SHHH!!
ITU ALI KAN? PASTI NUNGGAK UKT LAGI, DASAR
GAWAT... JANGAN-JANGAN MASALAH ITU LAGI
FS
FRESHGRADUATE STORE 100% ORIGINAL
WELCOME
SALE
P
TUNGGU PAK....
S1 HUKUM
GABRIEL SUHERMAN
SKILL:
BAHASA:
INDONESIA
INGGRIS
JEPANG
PERANCIS
DISKON HINGGA 50%
T-TEMAN TEMAN... APA YANG KALIAN LAKUKAN DISINI!??
SINGKATNYA MEREKA ITU REALISTIS
KAMU ITU TERLALU NAIF, AYOLAH... KAMU KULIAH MAHAL-MAHAL SAYANG BANGET KAN KALAU SKILL YANG KAMU DAPAT DIPAKE SECARA GRATISAN? MENDING "DIJUAL" UNTUK DAPAT PENGHASILAN
INGAT MIMPIMU ALI...
BODOAMAT YANG PENTING DAPAT GAJI GEDE!
SIAL, AKU BENCI KONFLIK
RNLDY

©Nanda/Bal

FRESH GRADUATE
DISCOUNT UP TO 50%
SARJANA KEDOKTERAN
RP 20,5 JT/BLN
SARJANA TEKNIK
RP 18,9 JT/BLN
SARJANA HUKUM
RP 15,5 JT/BLN
©Leo/Bal

Segera Hadir

Rekrutmen Terbuka
BPPM Balairung UGM

Redaksi ▪ Penelitian dan Pengembangan
Produksi dan Artistik ▪ Perusahaan

Kompleks Perumahan Dosen UGM
Jalan Kembang Merak B21, Bulaksumur, Caturtunggal, Depok, Sleman, DIY

@bppmbalairung /bppmbalairungugm @bppmbalairung @GSJ9240C /balairungpress.com

Selamat datang
mahasiswa biasa
di kampus biasa-biasa saja

Yuk, Ikut Kontribusi
di BPPM Balairung UGM!
Kontributor terpilih akan
mendapatkan honorarium

Rubrik yang dapat dikirimkan

Sastra	*Opini*	*Resensi*
(1400-2500 Kata)	(1000-1200 Kata)	(1200-1500 Kata)

Kirim naskah ke balairungpress@gmail.com dengan subjek Kontribusi_Nama Rubrik. Akan dipilih satu artikel bagi masing-masing rubrik di setiap bulannya!

Ketentuan lebih lanjut, kunjungi:
balairungpress.com/kontribusi

@bppmbalairung /bppmbalairungugm @bppmbalairung @GSJ9240C /balairungpress.com